



2025

LAPORAN KINERJA

Tahunan



Disiapkan oleh:

**Pelabuhan Perikanan Samudera
Nizam Zachman Jakarta**

Lembar Pengesahan



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

Jakarta, 05 Februari 2026

Disetujui oleh,
Penanggung Jawab
Kepala PPS Nizam Zachman Jakarta

Disusun oleh
Ketua Tim
Kepala Subbagian Umum



Andi Marnojengi

Mohamad Yusuf Santoso

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas perkenaan dan karunia-Nya, sehingga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025. Laporan Kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta disusun sebagai pertanggungjawaban organisasi kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Proses penyusunan laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Dirjen Perikanan Tangkap dengan Kepala PPS Nizam Zachman Jakarta yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta dengan menyajikan analisa realisasi dengan target atas indikator kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025.

Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada Tahun 2025, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sebagai bahan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja kedepan.

Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

PPS Nizam Zachman Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan di pelabuhan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Dalam mendukung pencapaian visi PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong" yang merupakan adopsi langsung dari visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sehingga PPS Nizam Zachman Jakarta mempunyai peran penting dalam kemajuan dan keberlanjutan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan serta mewujudkan masyarakat perikanan tangkap yang mandiri dan sejahtera khususnya di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Sedangkan misi PPS Nizam Zachman Jakarta dalam mencapai visinya, ditetapkan misi PPS Nizam Zachman Jakarta yaitu PPS Nizam Zachman Jakarta melaksanakan 2 (dua) misi yaitu :

- 1) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, meliputi peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur perikanan tangkap dan melanjutkan revitalisasi industri perikanan tangkap dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0.
- 2) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, meliputi reformasi birokrasi PPS Nizam Zachman Jakarta.

Dalam mendukung visi dan misi PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2025-2029, pelabuhan perikanan mendapatkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 46.370.440.000,- (empat puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Alokasi anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tersebut terbagi dalam 2 (dua) program, yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
 - Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
 - Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- 2) Program Dukungan Manajemen
 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Realisasi pagu anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2025 atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 33.755.442.412,- (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau 72,79%,- dari total pagu anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2025 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

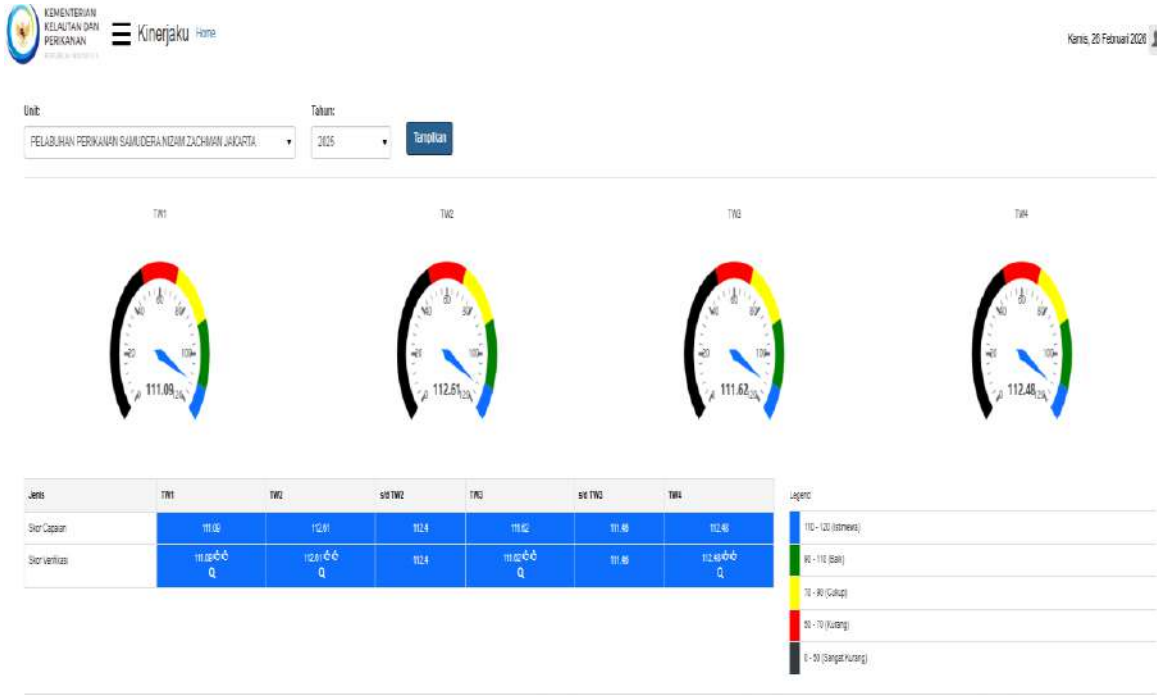
IKU 2025	URAIAN KEGIATAN	TW IV	
		REALISASI	SISA
1	2	10	

IKU 2025	URAIAN KEGIATAN	TW IV	
		REALISASI	SISA
IK 5	Kegiatan Monitoring Wilayah Kerja Operasional Perairan PPS Nizam Zachman Jakarta	8.439.994	6
IK 5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Kapal di Kolam Pelabuhan	7.950.000	-
IK 18	Kegiatan Forum Konsultasi Pelayanan Publik	30.850.000	30.000
IK 5	Deseminasi Kegiatan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Binaan	-	6.600.000
IK 5	Sosialisasi Penanganan Kebakaran, Keselamatan dan Keamanan Kapal di Pelabuhan	-	16.155.000
IK 5	Patroli Gabungan Penertiban Kapal di Kolam Pelabuhan	-	24.100.000
IK 5	Operasional Port State Measure (PSMA) di Pelabuhan	-	3.795.000
IK 18	Implementasi ISO 14001:2015 dan ISO 9001:2015 di Pelabuhan	-	36.220.000
IK 5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kesyahbandaran	-	14.355.000
IK 5	Sosialisasi Zonasi Dermaga dan Kolam Pelabuhan	-	15.255.000
IK 18	Evaluasi Pelaksanaan SOP Pelayanan Publik di Pelabuhan	-	14.855.000
IK 5	Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran Perikanan di Pelabuhan	160.815.437	96.756.563
IK 4	Operasional Pelayanan Penerbitan SHTI di Pelabuhan	-	31.470.000
IK 4	Sosialisasi Penerbitan SHTI dan Penerbitan Lembar Awal di Pelabuhan Perikanan	-	13.535.000
IK 4	Pelaksanaan Pembinaan Inspeksi Pembongkaran Ikan dan CPIB di Pelabuhan	3.850.000	11.600.000
IK 4	Sosialisasi Pelaksanaan Inspeksi Pembongkaran Ikan dan CPIB di Pelabuhan	-	14.355.000
IK 1	Tata Kelola dan Operasional Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Perikanan	304.711.384	444.659.616
IK 3	Evaluasi Penggunaan Bangunan Kantin dan Penandatanganan Perjanjian Tahun 2026	21.710.000	-
IK 1	Operasional Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Perikanan	122.658.974	620.639.026
IK 6	Perencanaan dan Supervisi Kegiatan Pengembangan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelabuhan	-	88.700.000
IK 6	Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan	2.491.400	480.153.600
IK 1	Pelaksanaan Sistem Toll Gate Pas Masuk Pelabuhan secara Cashless	122.709.237	763
IK 7	Dukungan Kegiatan dalam Pencapaian Kinerja Operasional Pelabuhan	680.768.143	1.122.778.857
IK 7	Penataan Kebersihan Kawasan serta Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Pelabuhan	-	870.532.000
IK 7	Supervisi Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dalam Mendukung Aplikasi Selaraskan di Pelabuhan	-	61.100.000
IK 4	Pengelolaan PIPP di Pelabuhan	13.610.000	10.035.000
IK 4	Evaluasi Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Pelabuhan (Evkin)	-	14.885.000

IKU 2025	URAIAN KEGIATAN	TW IV	
		REALISASI	SISA
IK 4	Publikasi dan Informasi Pelabuhan Perikanan	16.560.000	48.286.000
IK 4	Sosialisasi Pelaksanaan PPID di Pelabuhan	-	14.214.000
IK 2	Inhouse Training Petugas Pendataan dan pengolahan data	-	17.247.000
IK 2	Survei Harga Ikan Dalam Rangka Pemenuhan Data dan Harga Acuan Ikan di Pelabuhan	-	18.540.000
IK 2	Kegiatan Kalibrasi Timbangan Hasil Bongkaran Ikan	-	14.355.000
IK 2	Rekonsiliasi Data Produksi hasil tangkapan dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan PNBP Pascaproduksi	-	150.960.000
IK 2	Optimalisasi Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan PNBP Pasca Produksi Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Binaan	-	303.360.000
IK 2	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi E-PIT dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan	-	6.855.000
IK 2	Dukungan Kegiatan dalam Pencapaian PNBP Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur	198.349.131	499.859.869
IK 2	Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan	-	-
IK 16	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi di Pelabuhan	875.596.967	593.033
IK 10	Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas	-	2.040.000
IK 16	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	2.044.288.809	6.114.634.191
IK 16	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	1.923.501.558	3.208.150.442
IK 16	Operasional Pemeliharaan Kantor	3.921.192.996	9.530.601.004
IK 16	Buka Blokir Efisiensi	14.000.000	-
IK 6	Pengadaan dan Perbaikan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	1.984.857.666	4.579.694.334
IK 7	Pengangkutan Sampah Padat Kawasan Pelabuhan Perikanan	-	1.808.384.000
IK 6	Rehabilitasi Bangunan Pas Masuk dan Loket Pelabuhan Perikanan	-	3.360.000.000
IK 6	Pengembangan Fasilitas Prasarana Pelabuhan Perikanan	45.841.350	158.198.650
IK 13	Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Penerapan Disiplin Pegawai	-	2.040.000
IK 12	Pelaksanaan Rencana Kerja Teknis dan Penyusunan RKAKL Pelabuhan	170.000	11.879.000
IK 12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran di Pelabuhan	-	2.040.000
IK 11	Pelaporan Keuangan di Pelabuhan	-	1.020.000
IK 11	Pemutakhiran Data SPIP		
IK 11	Verifikasi Dokumen Pertanggung Jawaban Keuangan		
IK 11	Pengelolaan Kinerja Pelabuhan		
	TOTAL	12.504.923.046	33.865.516.954

Tabel 1 Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Program/Kegiatan

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dengan dukungan anggaran Rp 46.370.440.000,- (empat puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah),- yang terealisasi sebesar Rp 33.755.442.412,- tiga puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau 72,79%,- dari total pagu anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2025. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 112,48%. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 yaitu sebesar 112,58%, sesuai gambar di bawah ini:



Gambar 1 Dashboard NPSS PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025

Berdasarkan hasil NPSS PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 sebesar 112,48%, merupakan hasil capaian dari indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja dengan ditandatangani antara Dirjen Perikanan Tangkap dengan Kepala PPS Nizam Zachman Jakarta. Namun jika dilihat dari frekuensi capaian targetnya, jumlah indikator kinerja pada Tahun 2025 sebanyak 18 indikator kinerja yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) sasaran. Secara rinci target kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 2 Target Indikator Kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPS Nizam Zachman	1.	Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Nizam Zachman (Rp juta)	27.676,40
2.	Produktivitas perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman meningkat	2.	Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Nizam Zachman (Ton)	270.577
3.	Pengelolaan PPS Nizam Zachman yang optimal dan bertanggung jawab	3.	Persentase Permohonan Pengusahaan Yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Nizam Zachman (Persen)	100
		4.	Tingkat Kinerja PPS Nizam Zachman (Nilai)	87
		5.	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Nizam Zachman (Persen)	84
		6.	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Nizam Zachman (Persen)	90
		7.	Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Nizam Zachman (Nilai)	30,10
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPS Nizam Zachman	8.	Kapal Perikanan Izin Daerah Yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	976
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan PPS Nizam Zachman	9.	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awal Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
		10.	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPS Nizam Zachman (Nilai)	45,5
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja PPS Nizam Zachman (Persen)	85
		12.	Nilai PM SAKIP PPS Nizam Zachman (Nilai)	88
		13.	Indeks Profesionalitas ASN di PPS Nizam Zachman (Indeks)	87
		14.	Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPS Nizam Zachman (Persen)	76
		15.	Presentase Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman (Persen)	81
		16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPS Nizam Zachman (Nilai)	92
		17.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman (Nilai)	71,5
		18.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPS Nizam Zachman (Nilai)	88,5

Berdasarkan tabel di atas, 18 indikator kinerja lingkup PPS Nizam Zachman Jakarta pada Tahun 2025, indikator kinerja yang digunakan yaitu :

1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp juta)
2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Ton)
3. Persentase Permohonan Pengusahaan Yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)
5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)
8. Kapal Perikanan Izin Daerah Yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)
9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
10. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)
11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)
13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Indeks)
14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)
17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)
18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Indeks)

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi	2
1.3 Sumber Daya Manusia PPS Nizam Zachman Jakarta.....	7
1.4 Sistematika Laporan.....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Visi dan Misi Pelabuhan	9
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Pelabuhan.....	9
2.2 Target Kinerja Tahun 2025.....	10
2.2 Rencana Aksi Penetapan Kinerja	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Akuntabilitas Keuangan	53
BAB IV. PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran	57

Daftar Tabel

Tabel 1 Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Program/Kegiatan	v
Tabel 3 Target Indikator Kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025	vii
Tabel 4 Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025	11
Tabel 5 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta s/d Tahun 2025	14
Tabel 6 Target dan realisasi IKU Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp Juta)	15
Tabel 7 Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama IKU Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	15
Tabel 8 Perbandingan target menengah IKU Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp Juta)	16
Tabel 9 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp Juta)	17
Tabel 10 Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta (ton)	18
Tabel 11 Perbandingan volume produksi di PPS Nizam Zachman Jakarta dengan tahun sebelumnya	18
Tabel 12 Perbandingan target menengah IKU Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta (ton)	18
Tabel 13 Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025	19
Tabel 14 Target dan realisasi Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	20
Tabel 15 Perbandingan Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	21
Tabel 16 Perbandingan target menengah IKU Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta (ton)	21
Tabel 17 Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025	21
Tabel 18 Target dan Realisasi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025	22
Tabel 19 Perbandingan Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai) Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	23
Tabel 20 Perbandingan target menengah IKU Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta (ton)	23
Tabel 21 Analisa Efisiensi Penggunaan Tingkat Kinerja Tahun 2025	24
Tabel 22 Target dan realisasi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	24
Tabel 23 Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	25
Tabel 24 Perbandingan target menengah IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	25
Tabel 25 Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2024	26
Tabel 26 Target dan realisasi Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	27
Tabel 27 Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	27
Tabel 28 Perbandingan target menengah IKU Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	27
Tabel 29 Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025	28
Tabel 30 Target dan realisasi IKU Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)	29
Tabel 31 Perbandingan IKU Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai) tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	29
Tabel 32 Perbandingan target menengah IKU Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)	30
Tabel 33 Target dan realisasi Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	31
Tabel 34 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal) tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	31
Tabel 35 Perbandingan target menengah IKU Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	32
Tabel 36 Tabel Analisa Efisiensi Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025	32
Tabel 37 Presentase peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (persen)	33
Tabel 38 Presentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	33
Tabel 39 Perbandingan target menengah IKU Presentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan	34

Tabel 40	Tabel Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan Tahun 2025.....	34
Tabel 41	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2024	35
Tabel 42	Perbandingan Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025 dengan tahun sebelumnya.....	36
Tabel 43	Perbandingan dengan target menengah IKU Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2024	36
Tabel 44	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025	37
Tabel 45	Target dan realisasi IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.....	38
Tabel 46	Perbandingan Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan (persen) tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.....	38
Tabel 47	Perbandingan target menengah IKU dengan Realisasi Tahun 2025 Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	38
Tabel 48	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025	39
Tabel 49	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025	40
Tabel 50	Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025 dengan tahun sebelumnya	40
Tabel 51	Perbandingan dengan target menengah IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025	40
Tabel 52	Efisiensi Penggunaan Sumber Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	41
Tabel 53	Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta	42
Tabel 54	Perbandingan Nilai Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta dengan tahun sebelumnya	43
Tabel 55	Perbandingan dengan target menengah IKU Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta 2025.....	43
Tabel 56	Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta	44
Tabel 57	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta	44
Tabel 58	Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta dengan tahun sebelumnya	45
Tabel 59	Perbandingan dengan target menengah IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta	45
Tabel 60	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta	46
Realisasi Tabel 61	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta	46
Tabel 62	Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta dengan tahun sebelumnya	47
Tabel 63	Perbandingan dengan target menengah IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta 2025	47
Tabel 64	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta	47
Tabel 65	Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta	48
Tabel 66	Perbandingan Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta dengan tahun sebelumnya	49
Tabel 67	Perbandingan dengan target menengah IKU Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta 2025	49
Tabel 68	Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta	49
Tabel 69	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta	50
Tabel 70	Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta dengan tahun sebelumnya	50
Tabel 71	Perbandingan dengan target menengah IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta 2025	51
Tabel 72	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta 2025	51
Tabel 73	Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025.....	52
Tabel 75	Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta dengan tahun sebelumnya	52
Tabel 76	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 2025.....	53
Tabel 77	Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Program/Kegiatan	53

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi di Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan salah satu Eselon I dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai peran utama dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan yaitu sebagai stakeholder bidang perikanan tangkap yang merupakan salah satu target sasaran pembangunan kelautan dan perikanan melalui upaya mewujudkan keberlanjutan sumberdaya perikanan dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel serta penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi tolok ukur penilaian kinerja suatu Instansi Pemerintah. Dalam rangka mendukung terciptanya tujuan dimaksud, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Kinerja. Dasar dari penyusunan laporan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi yang termaktub di dalam laporan kinerja ini adalah segala pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap khususnya.

PPS Nizam Zachman Jakarta dan dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Adapun tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
- Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja dalam instansi pemerintahan dilakukan guna memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, PPS Nizam Zachman Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada pasal 9, satker Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
- 2) Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- 3) Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat bukti tanda lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- 5) Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- 6) Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- 7) Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- 8) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- 10) Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- 11) Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- 12) Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- 13) Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- 14) Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- 15) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam pelaksanaan tugas operasional PPS Nizam Zachman Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan setingkat eselon II.b dan secara teknis bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara ringkas struktur organisasi PPS Nizam Zachman Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini :



Gambar 2 Struktur organisasi PPS Nizam Zachman Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 66/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, PPS Nizam Zachman Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tim Kerja Operasional Pelabuhan

Tingkat Kinerja Pelabuhan Tim Kerja Operasional Pelabuhan bertanggung jawab atas 4 IKU yakni:

1. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Ton)
2. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Nizam Zachman Jakarta (nilai)
3. Presentase peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (persen)
4. Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (indeks)

Uraian Fungsi:

- Penyiapan data dan statistik Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melakukan evaluasi terkait kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Menyiapkan data mutu perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Menyiapkan Kegiatan pembinaan dan pemeriksaan terhadap mutu ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Menyiapkan Kegiatan pengujian mutu hasil perikanan dan melaporkan hasil pengujian mutu yang telah dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Menyiapkan dan mempublikasikan data dalam bentuk visual dan nonvisual terkait perkembangan operasional di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Menyiapkan pengelolaan aplikasi PIPP.

Tim Kerja Kesyahbandaran

Tim Kerja Kesyahbandaran bertanggung jawab atas 2 IKU yakni:

1. Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (persen)
2. Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (nilai)

Uraian Fungsi:

- Melaksanakan pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam

Zachman Jakarta;

- Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan pemeriksaan Log Book di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan bimbingan teknis kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Menyiapkan pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Menyiapkan pengaturan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan penyaluran bahan perbekalan kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Menyiapkan pemeriksaan perencanaan pelayaran dengan selamat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

Tim Kerja Tata Kelola Prasarana dan Sarana

Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana memiliki tanggung jawab atas 2 IKU yakni:

1. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Nizam Zachman Jakarta (persen)
2. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Nizam Zachman Jakarta (nilai)

Uraian Fungsi:

- Menyiapkan data/informasi yang terkait dengan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Menyiapkan bahan usulan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta

- pendayagunaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan pengawasan penggunaan/ pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan oleh pelabuhan perikanan sendiri ataupun oleh pihak swasta;
- Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan tata kelola sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

Tim Kerja Pelayanan Usaha

Tim Kerja Pelayanan Usaha bertanggung jawab atas 2 IKU yakni:

1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Nizam Zachman Jakarta (Rp. Juta)
2. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Nizam Zachman Jakarta (persen)

Uraian Fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait permohonan pengusahaan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan analisis atas rencana kerja pengusahaan (investasi) di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan publik terkait pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta; Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Menyiapkan tagihan pemanfaatan jasa/layanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

Tim Kerja Dukungan Manajerial

Tim Kerja Dukungan Manajerial bertanggung jawab atas 8 IKU dukungan manajemen yakni:

1. Nilai Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)
2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (persen)
3. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Nizam Zachman Jakarta (nilai)
4. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Nizam Zachman Jakarta (indeks)
5. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (persen)
6. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Nizam Zachman Jakarta (persen)
7. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Nizam Zachman Jakarta (nilai)
8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Nizam Zachman Jakarta (nilai)

Uraian Fungsi:

- Menyiapkan bahan penilaian Pembangunan ZI WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai);
- Melakukan penyusunan bahan konsep penyelesaian tindak lanjut temuan aparaturnya pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekonsiliasi kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Menyiapkan bahan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
- Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan perencanaan dan penganggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan pengelolaan kinerja lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia aparaturnya lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan penyiapan bahan terkait organisasi dan tata laksana di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Sekretariat terkait proses pengadaan barang/jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
- Melaksanakan pengelolaan persuratan dan kearsipan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Melaksanakan urusan kerumahtanggaan lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

1.3 Sumber Daya Manusia PPS Nizam Zachman Jakarta

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Komposisi pegawai PPSNZ terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 49 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 2 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu sebanyak 69 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 43 dan Penyedia Jasa Perorangan Lainnya (PJLP) sebanyak 48 orang berasal dari berbagai bidang keahlian, serta 60 Petugas Enumerator Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang ditugaskan khusus untuk pelaksanaan program prioritas Penangkapan Ikan Terukur di PPSNZ.

1.4 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta s/d Tahun 2024. Capaian Kinerja (Performance Results) S/d Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Target Tahunan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2024 sebagai berikut :

1) RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Bab ini disajikan ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

2) BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan informasi umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia dan Sistematika Laporan

3) BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2024.

4) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan capaian kinerja organisasi (membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi, analisa penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan) serta realisasi anggaran.

5) BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

6) LAMPIRAN

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Pelabuhan

Dalam rangka mendukung program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan prioritas nasional dalam pengelolaan sumber daya kemaritiman dan kelautan serta menguatkan peran sektor kelautan dan perikanan untuk mewujudkan cita-cita nasional, PPS Nizam Zachman Jakarta menetapkan Visi dan Misi PPS Nizam Zachman Jakarta, yaitu:

1) Visi

"Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, PPS Nizam Zachman Jakarta menetapkan Misi pelabuhan perikanan, yaitu:

- a. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
Peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur perikanan tangkap. Melanjutkan revitalisasi industri perikanan tangkap dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0.
- b. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; Reformasi birokrasi PPS Nizam Zachman Jakarta.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Pelabuhan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, PPS Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2024 menetapkan tujuan dan sasaran instansi.

Adapun dalam menjabarkan visi dan misi PPS Nizam Zachman Jakarta, maka tujuan pelabuhan perikanan, yaitu :

1. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
2. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup PPS Nizam Zachman Jakarta, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi PPS Nizam Zachman Jakarta yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Sedangkan, Dalam mencapai visi, misi dan tujuan, PPS Nizam Zachman Jakarta menetapkan sasaran strategis yaitu kondisi yang ingin dicapai PPS Nizam Zachman Jakarta sebagai suatu outcome/impact dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pelabuhan perikanan. Pada tahun 2024, PPS Nizam Zachman Jakarta menetapkan 7 (tujuh) sasaran yaitu :

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta , yaitu:

- IKU 1 : Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp juta)
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta meningkat , yaitu :
IKU 2 : Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta (ton)
3. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing, yaitu :
IKU 3 : Persentase Permohonan Pengusahaan Yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen).
IKU 4 : Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)
IKU 5 : Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman yang optimal, yaitu :
IKU 6 : Presentase pengendalian Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (persen)
IKU 7 : Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)
5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, yaitu:
IKU 8 : Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
6. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikana Samudera Nizam Zachman Jakarta
IKU 9 : Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
7. Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, yaitu:
IKU 10 : Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)
IKU 11 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
IKU 12 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)
IKU 13 : Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (indeks)
IKU 14 : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (persen)
IKU 15 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (persen)
IKU 16 : Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)
IKU 17 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)
IKU 18 : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Indeks)

2.2 Target Kinerja Tahun 2025

Penetapan Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dirumuskan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penetapan indikator dan target kinerja di PPS Nizam Zachman Jakarta yaitu untuk mendukung pencapaian

indikator kinerja dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang didasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2025-2029. Berikut indikator kinerja dan target kinerja PPS Nizam Zachman dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 3 Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	1.	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp juta)	27.676,40
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta meningkat	2.	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Ton)	270.577
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang berdaya saing	3.	Persentase Permohonan Pengusahaan Yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	100
		4.	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	87
		5.	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	84
4.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang optimal	6.	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	90
		7.	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	30,10
5.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	8.	Kapal Perikanan Izin Daerah Yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	976
6.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	9.	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	0,26
7.	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	10.	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	45,5
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	85
		12.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	88
		13.	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Indeks)	87
		14.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	76
		15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	81
		16.	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	92
		17.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	71,5
		18.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Indeks)	88,5

Pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 dapat dikomposisikan dalam Lampiran I Laporan Kinerja ini.

2.2 Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU Perspektif Internal Process dan Learning and Growth yang di sandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga didapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran yang terlampir pada Lampiran II dalam bagian Laporan Kinerja Tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya, baik itu berupa ketercapaian target maupun ketidaktercapaian target. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertahankan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta terbagi menjadi pada 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap melalui evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 diukur melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian untuk Tahun 2025 sebagai berikut:



Gambar 3 Capaian NPSS PPS Nizam Zachman Tahun 2025

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada Tahun 2025 memiliki kategori "ISTIMEWA", ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,48%. Capaian ini merupakan gambaran nilai kinerja organisasi secara keseluruhan. Pada Tahun 2025, terdapat 17 (tujuh belas) yang dapat memenuhi target dan hanya 1 (satu) IKU yang tidak memenuhi target. Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta s/d Tahun 2025

No	IKU	Target 2025	Realisasi 2025
1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp juta)	27.676,40	35.385,69
2	Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta (ton)	270.577	282.910
3	Presentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (persen)	100	100
4	Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)	87	97,58
5	Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (persen)	84	93,45
6	Presentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	90	99,64
7	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)	30,10	83,83
8	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (nilai)	976	1065
9	Presentase peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (persen)	0,26	0,67
10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)	45,5	88,95
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	85	95,83
12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)	88	88,4
13	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (indeks)	87	85,19
14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (persen)	76	100
15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (persen)	81	100
16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)	92	97,45
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)	71,5	100
18	Nilai survei kepuasan masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (indeks)	88,5	93,21

Adapun pembahasan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan (SK) 1 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Indikator Kinerja (IK) 1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp Juta)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi). Formulasi Perhitungan untuk indikator kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

a) Target dan realisasi

Tabel 5 Target dan realisasi IKU Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp Juta)

Nama IKU	Target 2025 (Rp Juta)	Tahun 2025			% Terhadap Target Tahun 2025
		Target (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	%	
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp Juta)	27.676,395	27.676,395	35.385,69	127,86	127,86

Realisasi penerimaan PNBP Non SDA di PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2025 senilai Rp35.385.689.266,- telah mencapai target Indikator kinerja sebesar 127,86% atau melampaui target senilai Rp7.709.294.266,- dibandingkan dengan target indikator kinerja penerimaan PNBP Non SDA di PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 senilai Rp27.676.395.000,00. Tercapainya target penerimaan PNBP Non SDA di PPS Nizam Zachman Jakarta diperoleh dari penerimaan PNBP dari pendapatan umum, pendapatan dari penggunaan/sewa sarana dan prasarana pelabuhan yang meliputi biaya sewa BMN gedung/bangunan, pemeliharaan prasarana, sewa crane truck dan ruang rapat pelabuhan serta pendapatan dari jasa pelabuhan yang meliputi jasa tambat/labuh kapal perikanan dan non perikanan, jasa pas masuk pelabuhan dan jasa kebersihan kolam dan kawasan pelabuhan

b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 6 Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama IKU Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Realisasi Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2021-2025 (Rp Juta)				
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
46.527,73	37.518,14	40.698,24	39.791,13	35.385,69

Dibandingkan dengan target penerimaan PNBP Non SDA di PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2024 senilai

Rp39.790.941.114,00, realisasi penerimaan PNBP Non SDA di PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2025 senilai Rp35.385.689.266,00, mengalami penurunan sebesar 11,07% atau turun senilai Rp4.405.251.848,00. Hal ini disebabkan oleh :

- 1). Penurunan pendapatan umum, yaitu pendapatan dari pemindahtanganan BMN, penerimaan kembali belanja pegawai/barang/modal dan pendapatan anggaran lain-lain.
- 2). Masih terdapat penyetoran kurang bayar PNBP yang cukup banyak atas penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektoran Jendral KKP.
- 3). Kebijakan penghentian pelayanan PNBP untuk penggunaan sarana crane truk, kapal tunda dan ruang rapat serta pemakaian listrik sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran.

c) Perbandingan dengan target menengah (Renstra)

Realisasi penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Target Menengah yang tercantum dalam Renstra tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan target menengah IKU Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp Juta)

Nama IKU	Realisasi Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra	Persentase perbandingan (%)
Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp Juta)	35.385,69	-	-

Belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena Renstra Eselon I DJPT belum menentukan target Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan

d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)

Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah membandingkan Realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2025 PPS Nizam Zachman Jakarta dengan Realisasi Penerimaan PNBP Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap). Pembanding ini didasarkan karena PPS Cilacap merupakan pelabuhan dengan skala yang sama (samudera) dan lokasi masih dalam satu pulau Jawa. Realisasi penerimaan PNBP Non SDA pada satker PPS Cilacap Tahun 2025 senilai Rp 7.612,89 dibandingkan realisasi penerimaan PNBP Non SDA pada satker PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2024 senilai Rp39.792 jauh lebih besar pendapatan PNBP di satker PPS Nizam Zachman Jakarta sampai dengan 522,69%. Hal ini disebabkan di satker PPS Nizam Zachman Jakarta lebih besar aktivitas di pelabuhan perikanan mulai dari jumlah kapal tambat labuh dikolam pelabuhan, jumlah aktivitas kendaraan yang masuk ke pelabuhan dan jumlah perusahaan/tenant yang mengajukan pengelolaan sampah ke pelabuhan.

e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dalam pencapaian target IKU Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2025 disebabkan telah optimalnya pungutan PNBP Non SDA atas pendapatan penggunaan sarana dan prasarana serta pelayanan jasa kepelabuhan perikanan, meliputi : pelayanan jasa tambat labuh kapal perikanan dan non perikanan, pelayanan jasa pas masuk kawasan pelabuhan, pelayanan jasa kebersihan pelabuhan dan kawasan pelabuhan, penggunaan BMN pelabuhan (gedung bangunan, truck crane, penggunaan ruang rapat pelabuhan, dan pemakaian listrik.

f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 8 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp Juta)

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	Efisiensi (%)
Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp Juta)	1.615.379.000	1.255.563.469	2,22

Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung tercapainya indikator kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2025 terdiri dari sumberdaya keuangan dan SDM. Untuk sumber daya keuangan, jumlah alokasi anggaran yang digunakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2025 di alokasi anggaran sebesar Rp.1.615.379.000,- dan realisasinya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.255.563.469,-, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp.359.815.531,-. Sedangkan dalam hal penggunaan sumberdaya manusia dalam pencapaian target indikator kinerja nilai PNBP PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2025 di dukung SDM sebanyak 26 orang.

g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Nizam Zachman Jakarta, yaitu :

Program atau kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2025, diantaranya;

1. Tata Kelola dan Operasional Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Perikanan yaitu pelayanan jasa tambat labuh kapal, jasa pas measuk pelabuhan dan jasa kebersihan serta penggunaan sarana prasarana BMN pelabuhan;
2. Pelaksanaan Sistem Toll Gate Pas Masuk Pelabuhan secara Cashless.

Sasaran Kegiatan (SK) 2 Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Indikator Kinerja (IK) 2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Ton)

Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta merupakan jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah yang didaratkan perusahaan perikanan atau masuk melalui data di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Formulasi perhitungan untuk IKU ini adalah dengan menambahkan produksi perikanan tangkap laut dengan produksi perikanan tangkap darat.

a) Target dan realisasi

Tabel 9 Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta (ton)

Nama IKU	Target Tahun 2025	Tahun 2025			% Realisasi terhadap target 2025
		Target	Realisasi	% Realisasi	
Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta (ton)	270.577	270.577	282.910	104,56%	104,56%

Volume produksi perikanan tangkap TW IV 2025 telah tercapai sebesar 104,56% bila dibandingkan dengan target. Capaian TW IV merupakan pencapaian yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap pencapaian target tersebut, hal ini disebabkan pada TW IV terdapat lonjakan volume produksi ikan yang sangat besar yaitu pada bulan Oktober dan Desember sebagai akibat dari banyaknya kapal perikanan berlabuh dan mendaratkan ikan menjelang berakhirnya masa berlaku izin kapal. Tercapainya realisasi volume produksi perikanan tangkap selain disebabkan oleh meningkatnya aktivitas kapal mendaratkan ikan juga disebabkan oleh semakin akuratnya pendataan yang dilakukan oleh petugas pendataan. Penambahan jumlah petugas pada masa puncak pendaratan ikan yaitu pada TW IV (enumerator program magang dari Kemenaker) juga memberikan dampak signifikan terhadap minimnya hilangnya data. Pengaturan kegiatan bongkar ikan dan penggunaan jembatan timbang juga berdampak positif terhadap akurasi pendataan untuk meminimalisir hilangnya data produksi ikan hasil pencatatan oleh petugas pendataan.

b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Perbandingan volume produksi di PPS Nizam Zachman Jakarta, tersaji sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10 Perbandingan volume produksi di PPS Nizam Zachman Jakarta dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Volume produksi di PPS Nizam Zachman Jakarta	266.578	282.910

Realisasi pencapaian volume produksi ikan tahun 2025 turun sebesar 63,44%, penurunan persentase capaian tersebut disebabkan oleh naiknya nilai target produksi dari 158.686 Ton pada tahun 2024 menjadi 270.577 ton pada 2025. Meskipun persentase capaian turun namun volume realisasi tahun 2025 lebih tinggi 6,12% dari tahun 2024.

c. Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025 PPS Nizam Zachman dibandingkan dengan Target dalam Renstra tersaji dalam tabel berikut

Tabel 11 Perbandingan target menengah IKU Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta (ton)

Nama IKU	Realisasi 2025 (ton)	Target Menengah dalam Renstra (ton)	Persentase Pervandingan (%)
Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta (ton)	282.910	-	-

Belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena Renstra Eselon I DJPT belum menentukan target volume produksi.

d. Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)

Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah membandingkan Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025 PPS Nizam Zachman Jakarta dengan Volume Produksi Perikanan

Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap). Pembandingan ini didasarkan karena PPS Cilacap merupakan pelabuhan dengan skala yang sama (samudera) dan lokasi masih dalam satu pulau Jawa. Pada Tahun 2025 Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Cilacap sebesar 38.540,64 ton sementara untuk Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta pada Tahun 2025 sebesar 282.910 ton. Salah satu faktor pendukung tingginya volume produksi di PPS Nizam Zachman adalah tingginya jumlah armada kapal yang mendaratkan ikan di PPS Nizam Zachman Jakarta.

e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta dapat melebihi target dengan sangat tinggi dipengaruhi salah satunya karena terjadi peningkatan volume pendaratan ikan per kapal. Keberhasilan dalam mencapai target Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta juga karena dilakukan perbaikan terhadap penambahan jumlah personil jumlah pendataan dimana pada awal tahun 2022 hanya 28 (dua puluh delapan) orang dan pada tahun 2025 berjumlah 60 (enam puluh) orang. Target volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta dapat berhasil dicapai karena dukungan jumlah petugas pendataan yang memadai, kompetensi petugas pendataan yang sesuai kriteria dimana petugas pendataan di PPS Nizam Zachman Jakarta didominasi oleh lulusan S1 Perikanan serta integritas yang tinggi. Hal yang mempengaruhi besarnya volume produksi perikanan tangkap antara lain jumlah kapal bongkar, jumlah SDM pendataan yang sebanding dengan jumlah kapal bongkar, jembatan timbang yang berfungsi dengan baik, kapasitas petugas pendataan serta peralatan pendataan yang memadai seperti kertas kerja/borang, perangkat komputer/laptop, kalkulator, tablet dan jaringan internet dengan bandwidth yang tinggi serta aplikasi PIPP yang stabil/minim gangguan. Kesadaran pemilik kapal terhadap pentingnya menyampaikan data pendaratan ikan secara jujur kepada petugas pendataan juga memiliki peran yang penting.

f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 12 Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta (ton)	1.209.526.000	563.624.791	46,59

i. Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang kinerja dalam pencapaian target volume produksi perikanan tangkap antara lain:

Program/kegiatan yang menunjang kinerja antara lain:

- Bimtek pengenalan jenis ikan kepada petugas pendataan
- Bimtek pengoperasian aplikasi PIPP Mobile
- Pencetakan kertas kerja/borang
- Monev petugas pendataan dan sosialisasi pendataan kepada pemilik kapal

Sasaran Kegiatan (SK) 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang berdaya saing

Indikator Kinerja (IK) pada SK 3 yaitu Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta; Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta; dan Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

Indikator Kinerja (IK) 3 Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan. Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusahaan. Formulasi Perhitungan untuk IKU ini adalah dengan menambahkan indikator hasil bagi antara hasil analisis kesesuaian permohonan pengusahaan terhadap usulan usulan pengusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi yang dibagi dengan total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang kemudian ditambah dengan Ruang lingkup yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 %. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dihitung berdasarkan jumlah usulan pengusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

a) Target dan realisasi

Tabel 13 Target dan realisasi Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Target Tahun 2025	Tahun 2025			% Realisasi terhadap target 2025
		Target	Realisasi	% Realisasi	
Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	100	100	100	100	100

Dibandingkan dengan target presentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 sebesar 100%, realisasi IKU presentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 sebesar 100%, telah tercapai target Indikator kinerja tahun 2025 sebesar 100%. Tercapainya target persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta disebabkan dari hasil evaluasi dan analisa terhadap 86 tenant yg menggunakan aset gedung bangunan BMN masih layak mengusahakan aset gedung bangunan BMN milik PPS Nizam Zachman Jakarta.

- b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 14 Perbandingan Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	100	100

Dibandingkan dengan target persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2024 sebesar 100%, realisasi persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2025 sebesar 100% atau tetap. Hal ini disebabkan adanya seluruh permohonan perusahaan aset gedung bangunan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta sebanyak 86 tenant telah dilakukan analisa dan/atau evaluasi terhadap kelayakan usaha/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

- c) Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dibandingkan dengan Target dalam Renstra tersaji dalam tabel berikut

Tabel 15 Perbandingan target menengah IKU Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta (ton)

Nama IKU	Realisasi 2025	Target Menengah Renstra	Persentase Perbandingan
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	100	-	100

Belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena Renstra Eselon I DJPT belum menentukan target volume produksi.

- d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)

Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah membandingkan Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dengan PPS Cilacap. Pembanding ini didasarkan karena PPS Cilacap merupakan pelabuhan dengan skala yang sama (samudera) dan lokasi masih dalam satu pulau Jawa. Pada Tahun 2025 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tercapai 100%, sementara persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Cilacap sebesar 100%.

- e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dalam pencapaian target IKU persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 sebesar 100% disebabkan seluruh permohonan perusahaan aset gedung bangunan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta sebanyak 86 tenant telah dilakukan analisa dan/atau evaluasi terhadap kelayakan usaha/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

- f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 16 Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	21.710.000	21.710.000	100

Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung tercapainya indikator kinerja presentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 sebesar 100% terdiri dari sumberdaya keuangan dan SDM. Untuk sumber daya keuangan, jumlah alokasi anggaran yang digunakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja presentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2025 di alokasi anggaran sebesar Rp21.710.000,- dan realisasinya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp21.710.000,-, tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dan penggunaan sumberdaya manusia dalam pencapaian target indikator kinerja presentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 di dukung SDM sebanyak 26 orang.

- g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja
Program atau kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator kinerja presentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025, yaitu Evaluasi Penggunaan Bangunan Kantin dan Penandatanganan Perjanjian Tahun 2026.

Indikator Kinerja (IK) 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Tingkat kinerja pelabuhan merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan.

Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

- a) Target dan Realiasi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Tabel 17 Target dan Realiasi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025

Nama IKU	Target Tahun 2025	Tahun 2025			% Realisasi terhadap target 2025
		Target	Realisasi	% Realisasi	
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	87	87	97,58	112,16	112,16

Pada Tahun 2025, PPS Nizam Zachman Jakarta berhasil melampaui target kinerja yang ditetapkan. Dari target sebesar 87, realisasi capaian mencapai 97,58 atau setara dengan 112,16% dari target.

- b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Perbandingan tingkat kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, tersaji sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18 Perbandingan Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai) Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	98,6	98,58

Pada Triwulan IV Tahun 2025, PPS Nizam Zachman Jakarta mengalami penurunan capaian kinerja dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2024. Realisasi capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebesar 97,58, menurun dari capaian Triwulan IV Tahun 2024 yang mencapai 98,6.

c) Perbandingan dengan target menengah

Realisasi Tingkat Kinerja Tahun 2024 PPS Nizam Zachman dibandingkan dengan Target dalam Renstra tersaji dalam tabel berikut

Tabel 19 Perbandingan target menengah IKU Volume produksi perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta (ton)

Nama IKU	Realisasi Tahun 2025 (nilai)	Target Menengah dalam Renstra (nilai)	Persentase perbandingan (%)
Tingkat Kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta (nilai)	98,58	-	-

Belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena Renstra Eselon I DJPT belum menentukan target tingkat kinerja.

d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)

Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah membandingkan Tingkat Kinerja Tahun 2025 PPS Nizam Zachman Jakarta dengan Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap). Pembandingan ini didasarkan karena PPS Cilacap merupakan pelabuhan dengan skala yang sama (samudera) dan lokasi masih dalam satu pulau Jawa. Pada Tahun 2025 Tingkat Kinerja di PPS Cilacap sebesar 92,46 (nilai) sementara untuk Tingkat Kinerja di PPS Nizam Zachman Jakarta pada Tahun 2025 sebesar 98,58 (nilai). Salah satu faktor pendukung tingginya tingkat kinerja di PPS Nizam Zachman adalah tingginya jumlah armada kapal yang mendaratkan ikan di PPS Nizam Zachman Jakarta yang berpengaruh terhadap tingginya volume produksi yang merupakan salah satu faktor tingginya tingkat kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Tingkat kinerja di PPS Nizam Zachman Jakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan pula faktor penghambat. Faktor pendukung pencapaian target tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yaitu :

- Kontribusi dan komitmen dari setiap kelompok kerja yang melakukan tugasnya serta melaporkan dan mengumpulkan data dukung pelaksanaan kegiatan;
- Keaktifan operator PIPP dalam melaksanakan input data, baik harian maupun bulanan secara tepat waktu;
- Monitoring dan evaluasi serta validasi dan supervisi secara berkala terhadap input data yang telah dilakukan;
- Dilaksanakannya tindak lanjut monitoring evaluasi dan supervisi pelaksanaan input data PIPP.

Selain faktor pendukung, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat ketercapaian Tingkat Kinerja di PPS Nizam Zachman Jakarta, sebagaimana berikut:

- Adanya human error atau kurangnya ketelitian operator PIPP dalam penginputan data;
- Nilai tingkat kinerja bersifat fluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh 27 (dua puluh tujuh) parameter penilaian;
- Penginputan data PIPP hanya dapat dilakukan melalui PIPP mobile membutuhkan sarana serta waktu yang lebih lama. Selain itu, terdapat menu verifikasi yang sangat mempengaruhi pada capaian kriteria produksi, frekuensi

kunjungan kapal, daya tampung kolam, dan penyerapan tenaga kerja.

Upaya yang telah dan akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Menyusun jadwal entry PIPP;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan input data PIPP dan capaian tingkat kinerja bulanan;
- Menginput data kapal izin daerah secara bertahap berdasarkan kapal aktif;
- Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap unsur capaian yang belum maksimal.

f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 20 Analisa Efisiensi Penggunaan Tingkat Kinerja Tahun 2025

Nama IKU	Anggaran/Pagu (Rp)	Realisasi 2025	%
Tingkat Kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)	192.400.000	60.870.000	31,63

Efisiensi untuk penggunaan anggaran IKU Tingkat Kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tercapai sebesar 60.870.000 dari total pagu anggaran sebesar 192.400.000. Untuk mendukung tercapainya Tingkat Kinerja di PPS Nizam Zachman Jakarta didukung oleh 5 (lima) orang PIC utama untuk masing-masing tim kerja dan 60 petugas enumerator yang membantu penginputan data produksi.

g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta yaitu program Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang Dikelola dan Operasional sesuai Standar, melalui kegiatan pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan dan PP Binaan.

Indikator Kinerja (IK) 5 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Tingkat pelayanan kesyahbandaran merupakan indikator yang menunjukkan pelayanan kesyahbandaran yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen yaitu :

- Jumlah persetujuan yang diterbitkan (bobot 40%) : Dihitung berdasarkan jumlah kapal yang diterbitkan persetujuan berlayarnya dibagi dengan jumlah kapal aktif.
- Jumlah Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%): Dihitung berdasarkan kapal yang diterbitkan STBLK dibandingkan jumlah kapal aktif.
- Jumlah Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%): Formula penghitungan = $(100 - (\text{jumlah permintaan verifikasi SHTI yang diterbitkan} : \text{jumlah SHTI yang diterbitkan}) \times 100\%$.

a) Target dan realisasi

Tabel 21 Target dan realisasi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	84	93,45	111,25

Pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi dari IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai sebesar 93.45. Capaian ini juga melampaui dari realisasi pada TW IV Tahun 2024. Faktor keberhasilan capaian ini diantaranya dikarenakan, proses pelayanan STBLKK, SPB, dan SHTI yang dilaksanakan di PPS Nizam Zachman Jakarta telah sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga waktu penyelesaian dan mutu baku layanan terlaksana secara optimal.

b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 22 Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	92,81	93,45

Realisasi capaian IKU Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Pada tahun 2024 adalah sebanyak 92,81% sedangkan pada tahun 2025 adalah sebanyak 93,45%. Capaian IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran pada TW IV 2025 sebesar 93.45 dan capaian pada TW IV Tahun 2024 sebesar 92.81. Terdapat perbedaan capaian sebesar 0.64 poin antara capaian TW IV 2025 dan TW IV 2024, yang menunjukkan capaian TW IV 2025 terpantau lebih tinggi.

c) Realisasi Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dibandingkan dengan Target dalam Renstra tersaji dalam tabel berikut

Tabel 23 Perbandingan target menengah IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Realisasi 2025	Target Menengah Renstra	Presentase Perbandingan
Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	93,45	-	-

Belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena Renstra Eselon I DJPT belum menentukan target Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)

Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah membandingkan Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2024 dengan PPS Cilacap. Pembandingan ini didasarkan karena PPS Cilacap merupakan pelabuhan dengan skala yang sama (samudera) dan lokasi masih dalam satu pulau Jawa. Pada Tahun 2024 Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta sebesar 92,81 sementara PPS Cilacap sebesar 95,66. Perbedaan ini disebabkan salah satunya karena jumlah pelayanan yang diberikan oleh PPS Nizam Zachman lebih banyak sehingga masih perlu peningkatan di beberapa pelayanan.

e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dalam capaian IKU Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran diantaranya dikarenakan petugas pelayanan telah memiliki kemampuan teknis yang cukup dalam memberikan pelayanan; mekanisme pelayanan telah dilakukan

sesuai dengan SOP yang berlaku; proses layanan dilakukan secara terpadu dalam satu gedung yang memudahkan akses pengguna jasa dalam melakukan permohonan layanan.

f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 24 Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2024

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	354.222.000	177.205.431	50,02

Kegiatan pelayanan kesyahbandaran memiliki nilai anggaran Rp 354.222.000 namun realisasi hanya mencapai Rp. 177.205.431. Hal ini dikarenakan banyak anggaran kegiatan pelayanan kesyahbandaran terkena *automatic adjustment*, namun dengan adanya sumber daya manusia yang memadai sebanyak 30 orang kegiatan pelayanan utama kesyahbandaran tetap dapat terlaksana dengan optimal.

g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi

- Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran Perikanan di Pelabuhan
- Patroli Gabungan Penertiban Kapal di Kolam Pelabuhan
- Sosialisasi Kesyahbandaran dalam Rangka Penanganan Kebakaran, Keselamatan dan Keamanan Kapal di Pelabuhan
- Sosialisasi Aplikasi Manajemen Kolam Pelabuhan
- Forum Konsultasi Pelayanan Publik di Pelabuhan
- Evaluasi Pelaksanaan SOP Pelayanan Publik di Pelabuhan
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kesyahbandaran di Pelabuhan.

Sasaran Kegiatan (SK) 4 Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang Optimal

Indikator Kinerja (IK) pada SK 4 yaitu Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dan Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

Indikator Kinerja (IK) 6 Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau

bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Indikator kinerja "Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPS Nizam Zachman" dihitung berdasarkan persentase pengembangan fasilitas dibandingkan dengan masterplan / draft perubahan masterplan.

Tabel 25 Target dan realisasi Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	90	97,53	110,71

Pada Triwulan IV Tahun 2025 telah tercapainya target Triwulan IV dengan realisasi sebesar 97,53% karena kegiatan pemeliharaan/perbaikan telah dilakukan untuk yang tidak terkena blokir/efisiensi anggaran dapat terlaksana dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan pemeliharaan rutin.

- b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 26 Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	99,64	97,53

UPT PPS Nizam Zachman Jakarta hanya dapat melakukan pemeliharaan namun tidak dapat melakukan pengembangan fasilitas di kawasan pelabuhan hal ini disebabkan karena PT. Perindo memiliki hak atas lahan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dan UPT PPS Nizam Zachman Jakarta tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengembangan fasilitas di lahan kawasan pelabuhan. Namun pada tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 2% hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana karena tidak ketersediaan anggaran.

- c) Realisasi Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dibandingkan dengan Target dalam Renstra tersaji dalam tabel berikut

Tabel 27 Perbandingan target menengah IKU Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Realisasi 2025	Target Menengah Renstra	Persentase Perbandingan
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	97,53	-	-

- d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)
Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah membandingkan

Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 PPS Nizam Zachman Jakarta dengan PPS Cilacap. Perbandingan ini didasarkan karena PPS Cilacap merupakan pelabuhan dengan skala yang sama (samudera) dan lokasi masih dalam satu pulau Jawa. Pada Tahun 2025 Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta sebesar 97,53 sementara PPS Cilacap 41,56.

e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target disebabkan karena terdapatnya anggaran yang mencukupi untuk melakukan pemeliharaan fasilitas serta kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan sesuai dengan pagu anggaran dan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan. Namun beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalan yaitu tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengembangan fasilitas di lahan kawasan pelabuhan. Adanya efisiensi anggaran secara nasional sehingga terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana karena tidak ada ketersediaan anggaran. Beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana pada tahun 2025 akibat efisiensi anggaran akan diajukan lagi di tahun 2026 dan pada saat pengajuan KAK RKAKL telah dijelaskan permasalahan dan perlunya diprioritaskan untuk dilakukan pemeliharaan/perbaikan.

f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 28 Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	10.699.937.000	2.566.909.077	23,98

Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta memiliki nilai anggaran sebesar Rp. 10.699.937.000 dan dengan pagu anggaran tersebut telah dilakukan penyerapan anggaran untuk melakukan pemeliharaan 2.566.909.077 serta sebagian besar kegiatan pemeliharaan dilakukan oleh pihak ketiga/penyedia yang memiliki pengalaman di bidang tersebut. Serapan anggaran ini hanya tercapai sebesar 23,98% dikarenakan adanya *automatic adjustment* atau blokir anggaran secara nasional.

g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi kegiatan:

- Supervisi Kegiatan Pengembangan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan
- Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan PNPB Pasca Produksi di Pelabuhan
- Rehabilitasi Bangunan Pas Masuk dan Loker Pelabuhan
- Pengembangan Fasilitas Prasarana Pelabuhan Perikanan
- Operasional Pemeliharaan Kantor

Indikator Kinerja (IK) 7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formulari UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan. Indikator hasil meliputi kebersihan pelabuhan, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3, dan kepatuhan regulasi.

a) Target dan realisasi

Tabel 29 Target dan realisasi IKU Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)

Nama IKU	Target 2025	Tahun 2025			% Terhadap Target Tahun 2025
	Target	Target	Realisasi	%	
Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)	30,10	30,10	83,83	278,5	278,5

Pada Triwulan IV Tahun 2025 telah tercapainya target Triwulan IV berdasarkan aplikasi SELARASKAN dengan realisasi sebesar 251,48 dan Skor Rata-rata 83,83%. Pada Triwulan IV Tahun 2025 PPS Nizam Zachman Jakarta masuk dalam peringkat ke-16 dan dalam kategori penilaian Sangat Baik. Hal ini disebabkan karena PPS Nizam Zachman Jakarta berhasil melaksanakan program mandatory dan beberapa program voluntary serta mendapatkan nilai maksimal karena semua data dukung dan pelaksanaan sudah sesuai dengan standar penilaian.

b) Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 30 Perbandingan IKU Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai) tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2024
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	89,94	83,83

Pada Triwulan IV Tahun 2024 realisasi adalah 89,94 sedangkan pada tahun 2025 turun menjadi 83,83 hal ini disebabkan karena beberapa program tidak mendapatkan nilai maksimal seperti pengolahan dan pemilahan sampah serta pengujian kualitas lingkungan. Pengolahan dan pemilahan sampah tidak dapat dilakukan di PPSNZJ karena jumlah dan jenis sampah yang sangat beragam serta tidak adanya SDM yang akan melakukan kegiatan tersebut, selain itu pada program pengujian pada tahun 2025 tidak dapat melakukan uji laboratorium untuk pengujian kualitas air kolam pelabuhan, kualitas udara, dan kualitas air limbah karena adanya efisiensi anggaran pada kegiatan

tersebut sehingga hanya dapat dilakukan pengujian dengan alat sederhana dan tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal.

c) Perbandingan dengan target menengah

Tabel 31 Perbandingan target menengah IKU Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)

Nama IKU	Realisasi Tahun 2025	Target Menengah dalam Renstra (2025)	Persentase perbandingan (%)
Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai)	83,83	-	-

Belum dapat dibandingkan dengan target menengah Renstra karena Renstra Eselon I DJPT belum memuat target menengah Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai).

d) Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional (Satuan Kerja) Lain

Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah membandingkan Nilai Pengendalian Lingkungan Tahun 2025 PPS Nizam Zachman Jakarta dengan Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap). Pembandingan ini didasarkan karena PPS Cilacap merupakan pelabuhan dengan skala yang sama (samudera) dan lokasi masih dalam satu pulau Jawa. Pada Tahun 2025 Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Cilacap sebesar 94,96 (nilai) sementara untuk Nilai Pengendalian Lingkungan di PPS Nizam Zachman Jakarta pada Tahun 2025 sebesar 83,83 (nilai).

e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Tercapainya target ini karena pada tahun 2025 telah dilakukan pembagian tugas berdasarkan SK Tim yang berlaku dengan melibatkan seluruh tim kerja, salah satunya adalah penimbangan total sampah laut darat serta pengelolaan sampah. Selama ini sebenarnya PPS Nizam Zachman Jakarta telah melakukan kegiatan yang terdapat pada program mandatory maupun voluntary sebagai kegiatan rutin namun terkadang belum di dokumentasikan dengan baik sehingga pada tahun 2025 telah dilakukan pencatatan dan dokumentasi dengan lebih baik sehingga dapat melengkapi data dukung yang diperlukan. dalam pelaksanaannya setiap program membutuhkan kerjasama dari seluruh tim kerja karena kegiatan lingkungan baik pada kawasan darat maupun kawasan kolam pelabuhan melibatkan seluruh tim kerja PPS Nizam Zachman Jakarta, namun saat ini petugas operator dan pengumpulan data dukung dilakukan oleh tim kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana.

f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa program yang sudah ada di RKAKL tidak dapat terlaksana karena anggaran tersebut di blokir seperti kegiatan pengangkutan sampah dan pengujian kualitas lingkungan di laboratorium. Selain itu, saat ini PPSNZJ juga mengalami pengurangan sumber daya manusia khususnya pada petugas kebersihan karena beberapa petugas telah diangkat menjadi P3K sehingga setelah dilakukan analisa, diperlukan penambahan 30 orang petugas kebersihan serta penambahan anggaran untuk kegiatan kebersihan kawasan pelabuhan. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Dalam pelaksanaannya setiap program membutuhkan kerjasama dari seluruh tim kerja karena kegiatan lingkungan baik pada

kawasan darat maupun kawasan kolam pelabuhan melibatkan seluruh tim kerja PPS Nizam Zachman Jakarta, namun saat ini petugas operator dan pengumpulan data dukung dilakukan oleh tim kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana. Pencapaian IK 7 didukung oleh anggaran sebesar Rp 4.543.563.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.593.489.409. Selain itu, pencapaian IK 7 didukung oleh 10 (sepuluh) orang SDM, yang terdiri dari 2 (dua) orang P3T, 4 (empat) orang AP3T, 1 (satu) orang Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana, 1 (satu) orang Penelaah Pengembangan Usaha, 1 (satu) orang Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana, 1 (satu) orang Pengadministrasi Sarana dan Prasarana.

- g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi kegiatan Stiker Hemat Energi.

Sasaran Kegiatan (SK) 5 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang berdaya saing di PPS Nizam Zachman Jakarta

Indikator Kinerja (IK) 8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, dengan menggunakan metode perhitungan menggunakan jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanannya (sertifikat kelaikan kapal) oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

- a) Target dan Realisasi

Tabel 32 Target dan realisasi Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

Nama IKU	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	976	1065	109,11

Pada Tahun 2025, PPS Nizam Zachman Jakarta telah mencapai target dari IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan dengan nilai sebesar 1065 kapal. Capaian ini lebih tinggi dari target Tahun 2025 sebesar 976 kapal. Ketercapaian target ini diantaranya terkait dengan adanya kebijakan migrasi izin kapal dari daerah ke pusat. Adanya program ini membuat kebutuhan untuk proses pemenuhan ketentuan kapal perikanan izin daerah semakin tinggi. Hal ini juga didukung dengan ketersediaan Petugas Cek Fisik Kapal yang ada di PPS Nizam Zachman Jakarta untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Selain itu, pada Tahun 2025 juga telah dilaksanakan gerai penerbitan SKKP izin daerah di pelabuhan binaan yaitu PP. Batulicin yang menjadikan adanya peningkatan layanan penerbitan SKKP izin daerah.

- b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama.

Tabel 33 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal) tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
----------	----------------	----------------

Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	876	1065
---	-----	------

Capaian Target IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan pada TW IV 2025 teridentifikasi lebih tinggi 21,57% kapal dari hasil realisasi pada TW IV Tahun 2024. Capaian pada TW IV 2025 teridentifikasi lebih tinggi sehubungan dengan meningkatnya aktivitas operasional kapal perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta dan pelabuhan binaan.

- c) Realisasi Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal) dibandingkan dengan Target dalam Renstra tersaji dalam tabel berikut

Tabel 34 Perbandingan target menengah IKU Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

Nama IKU	Realisasi 2025	Target Menengah Renstra	Presentase Perbandingan
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	1065	-	-

Belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena Renstra Eselon I DJPT belum menentukan target kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan.

- d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)
Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah membandingkan Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal) 2025 dengan PPS Cilacap. Perbandingan ini didasarkan karena PPS Cilacap merupakan pelabuhan dengan skala yang sama (samudera) dan lokasi masih dalam satu pulau Jawa. Pada Tahun 2025, Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal) PPS Nizam Zachman sebesar 1065 kapal sementara PPS Cilacap sebesar 1306 kapal.
- e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
Pelaksanaan IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan di PPS Nizam Zachman Jakarta dinyatakan berhasil dikarenakan oleh beberapa faktor pendukung seperti: ketersediaan SDM Petugas Cek Fisik yang memadai, ketersediaan sarana pendukung kegiatan pengecekan fisik kapal perikanan dan dukungan administratif dalam pelaksanaannya.

- f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 35 Tabel Analisa Efisiensi Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	-	-	-

Efisiensi serapan anggaran untuk kegiatan Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 0% karena seluruh anggaran telah diblokir. Kegiatan penerbitan sertifikat kelaikan secara sistem sudah dilakukan secara online yang mana pengajuan penerbitan dan proses entry hasil cek fisik kelaikan dilakukan pada aplikasi oleh karena itu ketersediaan alat pendukung seperti laptop dan printer untuk petugas

kelaikan sudah dimanfaatkan secara optimal. Terkait penggunaan SDM, SDM petugas kelaikan di PPS Nizam Zachman Jakarta sudah optimal yang mana jumlah petugas kelaikan PPS Nizam Zachman Jakarta adalah sebanyak 14 orang yang mana dalam setahunnya rata-rata sertifikat kelaikan yang diterbitkan oleh setiap petugas adalah sebanyak 30 sertifikat per tahun.

g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Program/kegiatan yang menunjang kinerja dalam pencapaian target IKU kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan antara lain Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan/Pengukuran/Pengujian/Inspeksi Kapal Perikanan yang mana anggaran untuk kegiatan ini di blokir sehingga pembiayaan pengecekan kelaikan kapal dilaksanakan dengan anggaran dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan.

Sasaran Kegiatan (SK) Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

IKU IX Presentase peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (persen)

Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi laik laut, laik tangkap, dan laik simpan, serta memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Penghitungan IK 9 yaitu persentase jumlah awak kapal / nelayan yang memiliki e-PKL/PKL dan sudah tersertifikasi dibandingkan dengan jumlah awak kapal yang memiliki e-PKL/PKL dan sudah tersertifikasi.

a) Target dan Realisasi

Tabel 36 Presentase peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (persen)

Nama IKU	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Presentase peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (persen)	0,26	0,67	257,69

Capaian presentase peningkatan kompetensi dan perlindungan awak kapal perikanan di TW IV 2025 teridentifikasi lebih tinggi dari target Tahun 2025, yakni sebesar 0.67. Realisasi ini tercatat memiliki indeks persentase capaian sebesar 257%. Capaian yang tinggi ini diantaranya dikarenakan adanya upaya optimalisasi peningkatan kepatuhan awak kapal perikanan, terhadap setiap dokumen pengawakan yang dilaporkan kepada Syahbandar dalam proses permohonan penerbitan dokumen Persetujuan Belayar (PB).

b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 37 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Presentase peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (persen)	-	0,67

Realisasi pada TW IV Tahun 2024 teridentifikasi sebesar 98,04 dan realisasi pada TW IV Tahun 2025 sebesar 0,67. Nilai

capaian pada dua periode ini teridentifikasi memiliki perbedaan yang signifikan, dikarenakan skema perhitungan realisasinya berbeda antara periode TW IV Tahun 2024 dan TW IV Tahun 2025. Atas dasar hal tersebut, maka tidak dapat dibandingkan capaian IKU terkait peningkatan kompetensi dan perlindungan awak kapal perikanan pada TW IV 2024 dan TW IV 2025.

- c) Realisasi Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan dibandingkan dengan Target dalam Renstra tersaji dalam tabel berikut

Tabel 38 Perbandingan target menengah IKU Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan

Nama IKU	Realisasi 2025	Target Menengah Renstra	Persentase Perbandingan
Persentase peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (persen)	0,67	-	-

Belum dapat dibandingkan dengan Target Menengah karena belum tercantum target Persentase peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (persen) dalam renstra DJPT.

- d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)

Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan 2024 dengan PPS Cilacap. Perbandingan ini didasarkan karena PPS Cilacap merupakan pelabuhan dengan skala yang sama (samudera) dan lokasi masih dalam satu pulau Jawa. Pada Tahun 2024, Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan sebesar 98,04 sementara PPS Cilacap sebesar 11.87.

- e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Tercapainya capaian target IKU Persentase peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan dikarenakan beberapa hal diantaranya: pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha dalam proses permohonan dokumen PB, agar melengkapi dahulu setiap dokumen pengawakkan yang diperlukan; pelaksanaan sosialisasi secara berkala terhadap *stakeholder*, agar mematuhi setiap ketentuan dokumen pengawakkan yang berlaku; melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna menjamin terpenuhinya ketentuan yang berlaku.

- f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 39 Tabel Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan Tahun 2025

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan	-	-	-

Efisiensi serapan anggaran untuk kegiatan Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan Tahun 2025 tidak dapat dihitung karena tidak ada anggaran yang digunakan. Kegiatan peningkatan

kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan dilaksanakan oleh tim kerja kesyahbandaran yang mana kegiatan perlindungan awak kapal perikanan dilaksanakan dengan kegiatan pengesahan PKL dan pengecekan kepemilikan asuransi nelayan yang dilaksanakan oleh 3 petugas SPB dan 4 syahbandar, sedangkan untuk kegiatan peningkatan kompetensi awak kapal dilaksanakan dengan ketersediaan 3 instruktur SKN di PPSNZJ dan 1 operator SKN.

g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan IKU ini tercapai adalah kegiatan Bimbingan Teknis untuk Peningkatan Kompetensi Awak Kapal Perikanan/Nelayan namun kegiatan ini terkena blokir, sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan awak kapal perikanan dilaksanakan dengan anggaran dari Direktorat kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Sasaran Kegiatan (SK) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Indikator Kinerja pada SK 7 yaitu :

- Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta;
- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

Indikator Kinerja (IK) 10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator kinerja ini merupakan penilaian pembangunan ZI menuju WBK yang mencakup 6 (enam) area pengungkit dan 2 (dua) area komponen hasil yang mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

a) Target dan Realisasi

Tabel 40 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2024

Nama IKU	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2024	45,5	88,95	195,49

Capaian Pembangunan ZI Menuju WBK PPS Nizam Zachman pada Tahun 2025 sebesar 88.95. Nilai ini teridentifikasi jauh lebih tinggi dari target Tahun 2025 sebesar 45.5. Beberapa faktor yang mendasari tercapainya target ini diantaranya yaitu pembentukan Tim ZI yang melibatkan berbagai Timja, sehingga proses pelaksanaan Rencana Kerja dan pengumpulan Bukti Dukung dapat terlaksana secara optimal. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara berkala juga menjadi salah satu faktor kuat atas tercapainya IKU Pembangunan ZI Menuju WBK di PPS Nizam Zachman.

- b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 41 Perbandingan Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025 dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	83,99	88,95

Capaian IKU Pembangunan ZI Menuju WBK di TW IV Tahun 2025 teridentifikasi 5.9% poin lebih tinggi apabila dibandingkan capaian pada TW IV Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa progres Pembangunan ZI Menuju WBK di Tahun 2025 telah lebih baik, serta Tim Pembangunan ZI telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam setiap Rencana Kerja ZI agar memenuhi standar Juknis LKE Inspektorat Jenderal KKP.

- c) Realisasi Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025 dibandingkan dengan Target dalam Renstra tersaji dalam tabel berikut

Tabel 42 Perbandingan dengan target menengah IKU Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2024

Nama IKU	Realisasi 2025	Target Menengah Renstra	Presentase Perbandingan
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	88,95	-	-

Belum dapat membandingkan dengan renstra karena belum terdapat target kinerja Nilai Pembangunan ZI pada Renstra DJPT.

- d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)

Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025 dengan PPS Cilacap. Pada Tahun 2025, Persentase Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta sebesar 88,95 sementara PPS Cilacap sebesar 89,3.

- e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian PPS Nizam Zachman dalam progres Pembangunan ZI Menuju WBK di Tahun 2025 telah melampaui target nasional,

dengan nilai capaian 88.95. Hal ini diantaranya dikarenakan PPS Nizam Zachman telah melakukan rangkaian pelaksanaan ZI, sejak penancangan, penyusunan Renja ZI, pelaksanaan Renja ZI, hingga monitoring dan evaluasi yang terstandar secara nasional. Proses penilaian yang dilakukan di PPS Nizam Zachman pada Tahun 2025 juga dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal II, sehingga atas dasar ini PPS Nizam Zachman Jakarta dapat diusulkan untuk proses evaluasi predikat WBK secara nasional. Keberhasilan dalam progres Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di PPS Nizam Zachman Jakarta, diantaranya dikarenakan: keterlibatan setiap unsur dari masing-masing Timja di PPSNZJ, yang membuat koordinasi penyelesaian Renja dapat berjalan optimal; pola kerja yang sesuai dengan Juknis LKE, sehingga target yang dicapai telah relevan dengan standar yang berlaku; pelaksanaan pengawasan dan pemantauan progres Rencana Kerja secara berkala, untuk memastikan setiap Renja dapat tercapai dengan baik.

f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 43 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2024	2.040.000	2.040.000	100%

Efisiensi serapan anggaran untuk kegiatan Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025 tercapai 100%. Kegiatan Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025 dilaksanakan oleh tim kerja WBK di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman sehingga tidak menggunakan anggaran atau pagu yang tersedia, selain itu juga karena adanya pemblokiran (*automatic adjustment*) pada pertengahan tahun untuk anggaran Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025. Pelaksanaan IKU Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2024 didukung oleh 57 (lima puluh tujuh) sumber daya manusia yang merupakan ASN PPS Nizam Zachman Jakarta yang ditetapkan dalam SK Tim WBK Tahun 2025. Jumlah SDM tersebut terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Tim Penilai Internal, dan tim Pokja Manajemen Perubahan, Tata Laksana, Penguatan SDM, Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Yanlik, dan Komponen Hasil.

g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Beberapa kegiatan penunjang yang dapat mendukung tercapainya Pembangunan ZI Menuju WBK di PPS Nizam Zachman pada tahun 2025 diantaranya adalah: Review SOP; Evaluasi Pelayanan Jasa; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Forum Konsultasi Publik. Perlu ada dukungan kegiatan kembali di Tahun 2026 untuk mencapai target pada periode kedepannya.

Indikator Kinerja (IK) 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen) merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen

Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada audit, reviu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV 2023 s.d. Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula penghitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan.

a) Target dan realisasi

Tabel 44 Target dan realisasi IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Nama IKU	Target 2025	Capaian 2025	% Presentase Capaian
Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan (persen)	85	95,83	112,74

Dibandingkan dengan target persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 sebesar 85%, realisasi IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 sebesar 95,83, telah tercapai target Indikator kinerja tahun 2025 sebesar 112,7%. Tercapainya target persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 disebabkan telah ada progres penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal KKP Nomor T.303/ITJ.2/HP.470/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 dari 24 rekomendasi yang diberikan, telah ada proses selesai/tuntas sebanyak 23 rekomendasi. Masih terdapat 1 rekomendasi dalam progres penyelesaian yaitu pelaksanaan penagihan tunggakan dan denda keterlambatan atas pelayanan kebersihan kawasan pelabuhan.

b) Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 45 Perbandingan Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan (persen) tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan (persen)	100	95,83

Dibandingkan dengan target persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2025 sebesar 85%, realisasi IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 sebesar 95,83, telah tercapai target Indikator kinerja tahun 2025 sebesar 112,7%. Tercapainya target persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 disebabkan telah ada progres penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal KKP Nomor T.303/ITJ.2/HP.470/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 dari 24 rekomendasi yang diberikan, telah ada proses selesai/tuntas sebanyak 23 rekomendasi. Masih terdapat 1 rekomendasi dalam progres penyelesaian yaitu pelaksanaan penagihan tunggakan dan denda keterlambatan atas pelayanan kebersihan kawasan pelabuhan.

c) Perbandingan dengan target menengah

Tabel 46 Perbandingan target menengah IKU dengan Realisasi Tahun 2025 Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Realisasi 2025	Target Menengah	Presentase
----------	----------------	-----------------	------------

		Renstra	Perbandingan
Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan (persen)	95,83	-	-

Belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena Renstra Eselon I DJPT belum menentukan target Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan.

- d) Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional (Satuan Kerja) Lain
Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah membandingkan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja 2025 PPS Nizam Zachman Jakarta dengan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap). PPS Nizam Zachman mencapai target 95,83 dan PPS Cilacap mencapai target 100. Hal ini dikarenakan masih ada 1 (satu) temuan yang masih ditindaklanjuti di PPS Nizam Zachman.
- e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian target IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 sebesar 95,83% atau tercapai 112,7%. Tercapainya target persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 disebabkan telah ada progres penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal KKP Nomor T.303/ITJ.2/HP.470/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 dari 24 rekomendasi yang diberikan, telah ada proses selesai/tuntas sebanyak 23 rekomendasi. Masih terdapat 1 rekomendasi dalam progres penyelesaian yaitu pelaksanaan penagihan tunggakan dan denda keterlambatan atas pelayanan kebersihan kawasan pelabuhan.
- f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 47 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025	1.615.379.000	1.020.000	1.255.563.469

Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung tercapainya indikator kinerja Penerimaan PNPB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2025 terdiri dari sumberdaya keuangan dan SDM. Untuk sumber daya keuangan, jumlah alokasi anggaran yang digunakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Penerimaan PNPB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2025 di alokasi anggaran sebesar Rp.1.615.379.000,- dan realisasinya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.255.563.469,-, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar Rp.359.815.531,-. Sedangkan dalam hal penggunaan sumberdaya manusia dalam pencapaian target indikator kinerja nilai PNPB PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2025 di dukung SDM sebanyak 26 orang.

- g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini tidak

dianggarkan secara khusus.

Indikator Kinerja (IK) 12 – Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta

Rekonsiliasi kinerja merupakan proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketepatan (20%).

a) Target dan Realisasi

Tabel 48 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025

Nama IKU	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025	88	88,4	100,45

Realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di Tahun 2025 di PPS Nizam Zachman Jakarta telah mencapai nilai sebesar 88,481 dari target sebesar 81 atau 100.45%. Hasil pencapaian tersebut didapatkan tercapainya 17 Indikator Kinerja Utama PPS Nizam Zachman Tahun 2025, namun masih terdapat IKU yang belum mencapai target yakni IKU Indeks IPASN. Target dari IP ASN tahun 2025 adalah 87 namun pada tahun 2025, nilai IPASN tercapai 85,19.

b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 49 Perbandingan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025 dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman	99,01	88,4

Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman pada tahun 2024 sebesar 99,01, sementara realisasi IKU pada tahun 2025 sebesar 88,4. Terjadi penurunan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman hal ini dikarenakan terdapat perbedaan indikator pada Form Penilaian Hasil Kinerja PPS Nizam Zachman.

c) Realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025 dibandingkan dengan Target dalam Renstra tersaji dalam tabel berikut

Tabel 50 Perbandingan dengan target menengah IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025

Nama IKU	Realisasi 2025	Target Menengah Renstra	Presentase Perbandingan
----------	----------------	-------------------------	-------------------------

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	88,4	-	-
---	------	---	---

Belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena Renstra Eselon I DJPT belum menentukan target Nilai Rekonsiliasi Kinerja.

d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)

Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025 dengan PPS Cilacap. Pada Tahun 2025, Persentase Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta sebesar 88,4 sementara PPS Cilacap sebesar 88. Terdapat perbedaan nilai sebesar 0.4.

e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di Tahun 2025 telah mencapai nilai sebesar 88,4 dari target sebesar 88 atau 100.45%. Hasil pencapaian tersebut didapatkan tercapainya 17 Indikator Kinerja Utama PPS Nizam Zachman Tahun 2025, namun masih terdapat IKU yang belum mencapai target yakni Indeks IPASN. Target dari Indikator IPASN tahun 2025 adalah 87 namun pada tahun 2025, nilai IPASN PPS Nizam Zachman tercapai 85.19. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 di PPS Nizam Zachman Jakarta terjadi peningkatan jumlah ASN sebanyak 35 orang namun kualifikasi pendidikannya didominasi SMP hingga SMA hanya terdapat 3 orang dengan kualifikasi pendidikan S1. Selain itu, masih terjadinya kendala pada aplikasi myASN pegawai PPS Nizam Zachman sehingga banyak data diklat pegawai yang hilang dan tidak dihitung dalam IPASN.

f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 51 Efisiensi Penggunaan Sumber Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	14.089.000	-	-

Efisiensi serapan anggaran untuk kegiatan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025 tercapai Rp 0 atau tidak ada serapan anggaran. Kegiatan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dilaksanakan dengan pagu anggaran dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sehingga tidak menggunakan anggaran atau pagu yang tersedia, selain itu juga karena adanya pemblokiran (*automatic adjustment*) pada pertengahan tahun untuk Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 2025. Pelaksanaan IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta didukung oleh 13 (tiga belas) sumber daya manusia yang ditetapkan dalam SK Tim Pengelola Kinerja 2025. Jumlah SDM tersebut terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Tim Kerja dan masing-masing perwakilan dari tim kerja.

g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Beberapa kegiatan penunjang yang dapat mendukung tercapainya Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2025 diantaranya adalah:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Pelabuhan Perikanan;

- Pengelolaan Kinerja Pelabuhan;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran di Pelabuhan;
- Pelaporan Keuangan di Pelabuhan.

Indikator Kinerja (IK) 13 – Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018). Terdapat penyesuaian / perubahan cara perhitungan IP ASN sesuai dengan surat BKN006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 15 September 2023 tentang pengukuran IP-ASN. Perubahan perhitungan sebagai berikut :

- Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki.
- Diklat 20 JP dihitung secara proporsional;
- Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja;
- Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni :

1. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
2. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
4. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi : Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

a) Target dan Realisasi

Tabel 52 Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta	87	85,19	97,91

Realisasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta pada Tahun 2025 mencapai nilai sebesar 85,19 dari target yang ditetapkan sebesar 87, atau sebesar 97,91% dari target. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian terhadap 82 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup empat dimensi, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai. Meskipun realisasi kinerja menunjukkan capaian yang cukup tinggi, Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Indeks Profesionalitas ASN belum berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum dilaksanakannya program pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai pada Tahun 2025.

Selain itu, pada Tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah ASN di PPS Nizam Zachman Jakarta sebanyak 35 orang. Namun demikian, komposisi kualifikasi pendidikan pegawai baru tersebut masih didominasi oleh lulusan SMP hingga SMA, dan hanya terdapat 3 orang dengan kualifikasi pendidikan S1. Kondisi ini turut memengaruhi nilai Indeks Profesionalitas ASN, khususnya pada aspek kualifikasi dan kompetensi.

Faktor lain yang menjadi kendala adalah permasalahan pada aplikasi myASN, di mana masih terdapat data riwayat pendidikan

dan pelatihan (diklat) pegawai yang hilang atau tidak terbaca oleh sistem, sehingga tidak terhitung dalam perhitungan Indeks Profesionalitas ASN (IPASN).

- b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 53 Perbandingan Nilai Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta	87,72	85,19

Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2024 sebesar 87,72, sementara realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2025 sebesar 85,19. Terjadi penurunan Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta.

- c) Realisasi Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta 2025 dibandingkan dengan Target dalam Renstra tersaji dalam tabel berikut

Tabel 54 Perbandingan dengan target menengah IKU Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta 2025

Nama IKU	Realisasi 2025	Target Menengah Renstra	Persentase Perbandingan
Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta	85,19	-	

Belum dapat membandingkan dengan Target Menengah Renstra karena belum terdapat target Kinerja Indeks IPASN di Renstra Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

- d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)

Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta 2024 dengan PPS Cilacap. Pada Tahun 2025, Persentase Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta sebesar 85,19 sementara PPS Cilacap sebesar 90,71.

- e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Realisasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta di Tahun 2025 telah mencapai nilai sebesar 85,19 dari target sebesar 87 atau 97,91%. Hasil pencapaian tersebut didapatkan dengan penialain 82 Aparatur Sipil Negara dari Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin Pegawai. IKU Nilai Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta belum dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan salah satunya belum adanya pengadaan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai PPS Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2025 dan pada tahun 2025 di PPS Nizam Zachman Jakarta terjadi peningkatan jumlah ASN sebanyak 35 orang namun kualifikasi pendidikannya didominasi SMP hingga SMA hanya terdapat 3 orang dengan kualifikasi pendidikan S1. Selain itu, masih terjadinya kendala pada aplikasi myASN pegawai PPS Nizam Zachman sehingga banyak data diklat pegawai yang hilang dan tidak dihitung dalam IPASN.

Untuk mengatasi ketidaktercapaian tersebut, akan dilakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi secara merata, fasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan melalui izin belajar atau tugas belajar, pemutakhiran dan verifikasi data kepegawaian pada aplikasi myASN secara berkala, serta penguatan monitoring dan evaluasi kinerja dan disiplin pegawai. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan nilai IPASN pada tahun berikutnya dapat meningkat dan

mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 55 Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta	-	-	-

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Adanya automatic adjustment menjadikan tidak ada anggaran yang. Selain itu, didukung oleh 2 (dua) orang Analis kepegawaian yang bertugas melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta input data capaian pengembangan kompetensi pada aplikasi myASN.

g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Beberapa kegiatan penunjang yang dapat mendukung tercapainya Indeks Profesionalitas ASN PPS Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2025 diantaranya adalah:

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap peningkatan kompetensi pegawai melalui website ropeg KKP;

- Memberikan analisa berupa rekomendasi dan upaya peningkatan capaian IP ASN untuk masing - masing pegawai;
- Melaksanakan inhouse training untuk seluruh pegawai PPS Nizam Zachman Jakarta.

Indikator Kinerja (IK) 14 – Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta

Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Rencana umum pengadaan telah diupload dalam aplikasi SIRUP (20%)
- Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
- Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
- Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

a) Target dan Realisasi

Tabel 56 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta	76	100	131,57

Dibandingkan dengan target IKU persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan II 2025 naik sebesar 31,5%, realisasi capaian IKU persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2025 sebesar 100%, atau telah tercapai target IKU sebesar 119%. Hal ini disebabkan

pada triwulan III telah dibukanya blokir anggaran pengadaan barang dan jasa.

- b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 57 Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta	96,28	100

IKU terkait persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di PPS Nizam Zachman Jakarta di Tahun 2025 memiliki metode penghitungan IKU yang berbeda dari Tahun 2024, sehingga belum ada analisa perbandingan capaian target dengan realisasi di Tahun 2024.

- c) Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta dibandingkan dengan Target dalam Renstra tersaji dalam tabel berikut

Tabel 58 Perbandingan dengan target menengah IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Realisasi 2025	Target Menengah Renstra	Presentase Perbandingan
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta	100	-	-

Belum dapat dibandingkan karena belum terdapat target untuk Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta pada renstra Eselon I DJPT.

- d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)

Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta 2025 dengan PPS Cilacap. Pada Tahun 2025, Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta adalah sama karena dihitung dari pengelolaan eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

- e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Pelaksanaan IKU terkait persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di PPS Nizam Zachman Jakarta di Tahun 2025 telah berhasil disebabkan oleh pencatatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dilakukan secara berkala setiap adanya revisi anggaran. Faktor pendukung tercapainya IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan; KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak Surat Perjanjian untuk seluruh paket pengadaan telah tersedia sesuai jadwal. Sedangkan faktor penghambat / kendala pencapaian indikator kinerja ini adalah pengendalian pelaksanaan PBJ yang masih belum maksimal serta belum terdapat pegawai dengan jabatan khusus fungsional pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hal tersebut, upaya yang akan dilaksanakan antara lain yaitu menyusun manajemen risiko PBJ dan melakukan pemantauan serta pengendalian secara berkala serta mengikutsertakan pegawai yang menangani pengadaan untuk mengikuti diklat pelatihan PBJ.

f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 59 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPS Nizam Zachman Jakarta	-	-	-

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Pencapaian IK 14 tidak didukung oleh anggaran karena dilakukan oleh DJPT dan 3 (tiga) pembantu PBJ.

g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Beberapa kegiatan penunjang yang dapat mendukung tercapainya Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2025 diantaranya adalah:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Pelabuhan Perikanan
- Pengelolaan Kinerja Pelabuhan
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran di Pelabuhan
- Pelaporan Keuangan di Pelabuhan.

Indikator 15 – Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 10%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanjamodal hingga triwulan 4 balik ke penggunaan barang dan pengelolaan barang (bobot 25%)
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (reevaluasi aset) (bobot 20%)
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung Berita Acara SerahTerima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (Bobot 25%)
- Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)

a) Target dan Realisasi

Realisasi Tabel 60 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta	81	100	123,45

Realisasi TW IV tahun 2025 terhadap Belanja Modal yang membentuk aset/BMN mencapai 100% dan melebihi target TW IV yang ditetapkan 81% dan hasil ini dihitung dari capaian lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kondisi tersebut dikarenakan Perencanaan, Pengadaan dan hasil mitigasi atas resiko setiap pengadaan barang dan jasa di tahun 2025.

- b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 61 Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta	90	100

Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2024 sebesar 90 sementara realisasi IKU pada tahun 2025 sebesar 10. Terjadi peningkatan nilai dikarenakan pada tahun 2024 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta dihitung dari pengelolaan eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

- c) Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta 2024 dibandingkan dengan Target dalam Renstra tersaji dalam tabel berikut

Tabel 62 Perbandingan dengan target menengah IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta 2025

Nama IKU	Realisasi 2025	Target Menengah Renstra	Presentase Perbandingan
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta	100	-	-

Belum dapat membandingkan dengan target menengah renstra dikarenakan

- d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)

Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta 2025 dengan PPS Cilacap. Pada Tahun 2025, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta adalah sama karena dihitung dari pengelolaan eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

- e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen internal - operasional dan pemeliharaan kantor melalui kegiatan pemeliharaan alat pengolahan data, perawatan kendaraan dinas, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran dan pimpinan, pemeliharaan gedung dan bangunan, serta operasional perkantoran.

- f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 63 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta	-	-	-

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Pencapaian IK 15 tidak didukung oleh

anggaran karena berpusat pada eselon I DJPT. Selain itu, didukung oleh 2 (dua) orang Pengelola BMN.

g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Beberapa kegiatan penunjang yang dapat mendukung tercapainya Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPS Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2025 diantaranya adalah:

- Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan BMN Gedung Bangunan di PPS Nizam Zachman Jakarta;
- Pengadaan Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah Kawasan Pelabuhan;
- Pengadaan Modal Lainnya
- Perbaikan Sarana Perkantoran.

Indikator 16 - Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta

Nilai IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Capaian Nilai IKPA dilaksanakan berdasarkan 8 (delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yang dapat diukur dari 2 (dua) aspek/sisi yaitu :

I. Kualitas Perencanaan Anggaran (bobot 20%) dengan 2 indikator yaitu

- Revisi DIPA (bobot 10%)
- Deviasi Halaman III DIPA (bobot 10%)

II. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (bobot 55%) dengan 5 indikator yaitu :

- Penyerapan anggaran (bobot 20%)
- Belanja Kontraktual (bobot 10%)
- Penyelesaian tagihan (bobot 10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
- Dispensasi SPM (bobot 5%)

a) Target dan Realisasi

Tabel 64 Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta	92	97,45	105,92

Realisasi IKPA di tahun 2025 diatas target dengan nilai Realisasi 97,45. Hal tersebut dikarenakan adanya relaksasi target penilaian IKPA, lalu berdasarkan pengalaman pada tahun lalu, pengajuan besaran UP sudah menyesuaikan dengan kondisi penggunaan KKP yang lebih besar dibandingkan dengan tunai serta efisiensi anggaran di bulan februari yang membuat perkiraan nilai revolving minimal 50% dari nilai UP per bulan tercapai. Kemudian untuk deviasi halaman III DIPA juga sudah disesuaikan dengan kondisi anggaran setelah efisiensi sehingga deviasi menjadi tidak terlalu besar. Sedangkan untuk nilai lain yaitu Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, serta Capaian Output memiliki nilai 100.

- b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 65 Perbandingan Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta	92,73	97,45

Dibandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya tahun ini memiliki nilai yang lebih tinggi karena pada komponen deviasi halaman III DIPA pada tahun ini cepat menyesuaikan atas adanya efisiensi anggaran pada bulan februari serta pengelolaan UP dan TUP yang sudah belajar dari pengalaman tahun sebelumnya lebih tertib dalam jadwal pertanggungjawaban serta proporsi nilai UP.

- c) Realisasi Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta 2025 dibandingkan dengan Target dalam Renstra tersaji dalam tabel berikut
Tabel 66 Perbandingan dengan target menengah IKU Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta 2025

Nama IKU	Realisasi 2025	Target Menengah Renstra	Presentase Perbandingan
Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta	97,45	-	-

Belum dapat dibandingkan dengan Target Menengah Renstra karena belum terdapat target Nilai IKPA dalam Renstra Eselon I DJPT.

- d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)

Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta 2025 dengan PPS Cilacap. Pada Tahun 2025, Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta sebesar 97,45 sementara PPS Cilacap sebesar 85,48. IKPA PPS Nizam Zachman berhasil mencapai bahkan lebih dari target dikarenakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik serta pengawasan langsung untuk pergerakan nilai IKPA disetiap bulannya sehingga nilai IKPA dapat terkontrol selalu diatas target.

- e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

IKPA berhasil mencapai bahkan lebih dari target dikarenakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik serta pengawasan langsung untuk pergerakan nilai IKPA disetiap bulannya sehingga nilai IKPA dapat terkontrol selalu diatas target. Pelaksanaan capaian nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta didukung oleh pengelola keuangan, dukungan manajerial serta pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dalam DIPA dan dilaksanakan dengan efisien seperti pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan secara periodikal di kantor ataupun penggunaan teknologi conference call seperti aplikasi zoom dalam berkoordinasi.

- f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 67 Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta	27.632.559.000	25.466.180.235	92,16

Dalam pencapaian target IKU nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan senilai Rp 2.166.378.765 dari jumlah pagu kegiatan yang mendukung tercapainya IKU Nilai IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta senilai 92,16. Sementara sumber daya manusia dalam mencapai target IKU IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025

sebanyak 8 (delapan) pegawai.

g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja

Dalam menunjang kinerja IKPA, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah tahap perencanaan seperti deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP/TUP, dan penyerapan anggaran. Perlu adanya kegiatan/program bagi masing-masing penanggungjawab anggaran dalam DIPA untuk membuat perencanaan yang jelas serta berkoordinasi secara rutin dengan PPK serta pengelola keuangan dalam pelaksanaannya.

Indikator 17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

a) Target dan Realisasi

Tabel 68 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta

Nama IKU	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Realisasi
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta	71,5	100	139,86

Dibandingkan dengan target IKU kinerja perencanaan anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 senilai 71,5, realisasi IKU kinerja perencanaan anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 senilai 100, telah tercapai target Indikator kinerja sebesar 139,86%. Hal ini disebabkan optimalnya capaian nilai capaian output, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 69 Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta	93,46	100

IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta merupakan IKU baru di tahun 2025 yang merupakan perubahan dari IKU Nilai Kinerja Anggaran. Dibandingkan dengan realisasi nilai kinerja anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2024 senilai 93,36, realisasi nilai kinerja anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2025 senilai 100 mengalami peningkatan sebesar 6.64%. Hal ini disebabkan meningkatnya nilai capaian efisiensi dan tertib administrasi keuangan di PPS Nizam Zachman.

- c) Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta 2025 dibandingkan dengan Target dalam Renstra tersaji dalam tabel berikut

Tabel 70 Perbandingan dengan target menengah IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta 2025

Nama IKU	Realisasi 2025	Target Menengah Renstra	Presentase Perbandingan
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta	100	-	-

IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta merupakan IKU baru di tahun 2025 yang merupakan perubahan dari IKU Nilai Kinerja Anggaran sehingga belum terdapat Target Menengah Renstra dan diperlukan pembaharuan Renstra.

- d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)
Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta 2025 dengan PPS Cilacap. Pada Tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta 2024 sebesar 100 sementara PPS Cilacap sebesar 93,57.
- e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian target IKU nilai perencanaan anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 disebabkan telah optimalnya pencapaian nilai nilai capaian output, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.
- f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 71 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta 2025

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta 2024	-	-	-

Dalam pencapaian target IKU nilai kinerja anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta, tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebab anggaran kegiatan dalam mendukung pencapaian IKU nilai kinerja anggaran salah satu kegiatan yang terkena pemblokiran Automatic Adjustemen (AA). Sementara sumber daya manusia dalam mencapai target IKU IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) pegawai.

- g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU nilai kinerja anggaran kerjasama Tim Kerja dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pegawai terkait.

Indikator Kinerja (18) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup PPS Nizam Zachman Jakarta

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat

terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

a) Target dan Realisasi

Tabel 72 Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	2025			% Terhadap Target Tahun 2025
	Target	Target	Realisasi	%	
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Lingkup PPS Nizam Zachman Jakarta	88,5	88,5	93,21	105,32	105,32

Capaian indikator kinerja SKM PPS Nizam Zachman Jakarta 2025 yaitu 93,21 dengan kategori "Sangat Baik" atau 105,32% dari target sebesar 88,50. Pelaksanaan SKM di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta mendapat nilai Sangat Baik hal tersebut menunjukkan bahwa PPS Nizam Zachman Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Tujuan dilaksanakan SKM secara periodik yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

b) Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya pada periode yang sama

Tabel 73 Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi 2024	Realisasi 2025
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Lingkup PPS Nizam Zachman Jakarta	94,77	93,21

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama IKU Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai) pada tahun lalu tercapai sebesar 94,77 (nilai) dan untuk Tahun 2025 tercapai sebesar 93,21. Terdapat kenaikan pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di PPS Nizam Zachman Jakarta. Hal ini dikarenakan terdapat kenaikan pada beberapa kategori seperti lebih kompleksnya pengguna jasa, kemudahan prosedur, Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas, serta kecepatan respon.

c) Perbandingan dengan Renstra

Tidak dapat dibandingkan karena Nilai Survei Kepuasan Masyarakat belum dimasukkan dalam renstra DJPT sehingga perlu dilakukan evaluasi Renstra.

- d) Perbandingan dengan Standar Nasional (Satuan Kerja lain Lingkup DJPT-KKP)
Perbandingan dengan satuan kerja lain lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat PPS Nizam Zachman Jakarta 2025 dengan PPS Cilacap. Pada Tahun 2025, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat PPS Nizam Zachman sebesar 93,21 sementara PPS Cilacap sebesar 93,76.
- e) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian target IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 disebabkan telah dilaksanakan berbagai upaya maksimal dalam pelayanan publik di PPS Nizam Zachman Jakarta, seperti renovasi Kantor Pelayanan Publik di PPS Nizam Zachman Jakarta, pelatihan bagi petugas pelayanan publik serta peningkatan sarana dan prasarana.
- f) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 74 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 2025

Nama IKU	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	81.955.000	30.850.000	37,64

Dalam pencapaian target IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat PPS Nizam Zachman Jakarta, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 51.105.000 sebab anggaran kegiatan dalam mendukung pencapaian IKU 18 yang terkena pemblokiran Automatic Adjustemen (AA). Sementara sumber daya manusia dalam mencapai target IKU IKPA PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2024 sebanyak 24 (dua puluh empat) pegawai.

- g) Analisa Program/kegiatan yang menunjang kinerja
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat kerjasama Tim Kerja dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pegawai terkait. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen internal - layanan organisasi dan tata kelola internal melalui kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi pagu anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2025 atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 33.865.516.954 ,- (Tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat) atau 72.79%,- dari total pagu anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2025 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 75 Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Program/Kegiatan

IKU 2025	URAIAN KEGIATAN	TW IV	
		REALISASI	SISA
1	2	10	
IK 5	Kegiatan Monitoring Wilayah Kerja Operasional Perairan PPS Nizam Zachman Jakarta	8.439.994	6

IKU 2025	URAIAN KEGIATAN	TW IV	
		REALISASI	SISA
IK 5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Kapal di Kolam Pelabuhan	7.950.000	-
IK 18	Kegiatan Forum Konsultasi Pelayanan Publik	30.850.000	30.000
IK 5	Deseminasi Kegiatan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Binaan	-	6.600.000
IK 5	Sosialisasi Penanganan Kebakaran, Keselamatan dan Keamanan Kapal di Pelabuhan	-	16.155.000
IK 5	Patroli Gabungan Penertiban Kapal di Kolam Pelabuhan	-	24.100.000
IK 5	Operasional Port State Measure (PSMA) di Pelabuhan	-	3.795.000
IK 18	Implementasi ISO 14001:2015 dan ISO 9001:2015 di Pelabuhan	-	36.220.000
IK 5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kesyahbandaran	-	14.355.000
IK 5	Sosialisasi Zonasi Dermaga dan Kolam Pelabuhan	-	15.255.000
IK 18	Evaluasi Pelaksanaan SOP Pelayanan Publik di Pelabuhan	-	14.855.000
IK 5	Tata Kelola dan Operasional Kesyahbandaran Perikanan di Pelabuhan	160.815.437	96.756.563
IK 4	Operasional Pelayanan Penerbitan SHTI di Pelabuhan	-	31.470.000
IK 4	Sosialisasi Penerbitan SHTI dan Penerbitan Lembar Awal di Pelabuhan Perikanan	-	13.535.000
IK 4	Pelaksanaan Pembinaan Inspeksi Pembongkaran Ikan dan CPIB di Pelabuhan	3.850.000	11.600.000
IK 4	Sosialisasi Pelaksanaan Inspeksi Pembongkaran Ikan dan CPIB di Pelabuhan	-	14.355.000
IK 1	Tata Kelola dan Operasional Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Perikanan	304.711.384	444.659.616
IK 3	Evaluasi Penggunaan Bangunan Kantin dan Penandatanganan Perjanjian Tahun 2026	21.710.000	-
IK 1	Operasional Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Perikanan	122.658.974	620.639.026
IK 6	Perencanaan dan Supervisi Kegiatan Pengembangan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelabuhan	-	88.700.000
IK 6	Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan	2.491.400	480.153.600
IK 1	Pelaksanaan Sistem Toll Gate Pas Masuk Pelabuhan secara Cashless	122.709.237	763
IK 7	Dukungan Kegiatan dalam Pencapaian Kinerja Operasional Pelabuhan	680.768.143	1.122.778.857
IK 7	Penataan Kebersihan Kawasan serta Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Pelabuhan	-	870.532.000
IK 7	Supervisi Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dalam Mendukung Aplikasi Selaraskan di Pelabuhan	-	61.100.000
IK 4	Pengelolaan PIPP di Pelabuhan	13.610.000	10.035.000
IK 4	Evaluasi Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Pelabuhan (Evkin)	-	14.885.000
IK 4	Publikasi dan Informasi Pelabuhan Perikanan	16.560.000	48.286.000
IK 4	Sosialisasi Pelaksanaan PPID di Pelabuhan	-	14.214.000

IKU 2025	URAIAN KEGIATAN	TW IV	
		REALISASI	SISA
IK 2	Inhouse Training Petugas Pendataan dan pengolahan data	-	17.247.000
IK 2	Survei Harga Ikan Dalam Rangka Pemenuhan Data dan Harga Acuan Ikan di Pelabuhan	-	18.540.000
IK 2	Kegiatan Kalibrasi Timbangan Hasil Bongkaran Ikan	-	14.355.000
IK 2	Rekonsiliasi Data Produksi hasil tangkapan dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan PNBP Pascaproduksi	-	150.960.000
IK 2	Optimalisasi Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan PNBP Pasca Produksi Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Binaan	-	303.360.000
IK 2	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi E-PIT dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan	-	6.855.000
IK 2	Dukungan Kegiatan dalam Pencapaian PNBP Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur	198.349.131	499.859.869
IK 2	Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan	-	-
IK 16	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi di Pelabuhan	875.596.967	593.033
IK 10	Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas	-	2.040.000
IK 16	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	2.044.288.809	6.114.634.191
IK 16	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	1.923.501.558	3.208.150.442
IK 16	Operasional Pemeliharaan Kantor	3.921.192.996	9.530.601.004
IK 16	Buka Blokir Efisiensi	14.000.000	-
IK 6	Pengadaan dan Perbaikan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	1.984.857.666	4.579.694.334
IK 7	Pengangkutan Sampah Padat Kawasan Pelabuhan Perikanan	-	1.808.384.000
IK 6	Rehabilitasi Bangunan Pas Masuk dan Locket Pelabuhan Perikanan	-	3.360.000.000
IK 6	Pengembangan Fasilitas Prasarana Pelabuhan Perikanan	45.841.350	158.198.650
IK 13	Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Penerapan Disiplin Pegawai	-	2.040.000
IK 12	Pelaksanaan Rencana Kerja Teknis dan Penyusunan RKAKL Pelabuhan	170.000	11.879.000
IK 12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran di Pelabuhan	-	2.040.000
IK 11	Pelaporan Keuangan di Pelabuhan	-	1.020.000
IK 11	Pemutakhiran Data SPIP		
IK 11	Verifikasi Dokumen Pertanggung Jawaban Keuangan		
IK 11	Pengelolaan Kinerja Pelabuhan		
	TOTAL	12.504.923.046	33.865.516.954

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dengan dukungan anggaran Rp 46.370.440.000,- (Empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu.),- yang terealisasi sebesar Rp 33.755.442.412,- tiga puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau 72,79%,- dari total pagu anggaran PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2025. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 112,48%. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 yaitu sebesar 112,58%, sesuai gambar di bawah ini:



Gambar 4 Dashboard NPSS PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025

Hasil NPSS PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 sebesar 112,58%, merupakan hasil capaian dari indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja dengan ditandatangani antara Dirjen Perikanan Tangkap dengan Kepala PPS Nizam Zachman Jakarta. Jumlah seluruh indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 sebanyak 18 indikator kinerja, diperoleh nilai target s/d 2025 yang mencapai angka 100% atau lebih adalah semua indikator kinerja sebanyak 17 (tujuh belas) indikator sebagai berikut:

1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp juta)
2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Ton)
3. Persentase Permohonan Pengusahaan Yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)
5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)
8. Kapal Perikanan Izin Daerah Yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)
9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
10. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)
11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)
13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
15. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (persen)
16. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)
17. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Indeks)

Terdapat satu Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai 100% yaitu IKU ke 13 (tiga belas) Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Indeks) dengan nilai capaian 97,91%. Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome)

4.2 Saran

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja PPS Nizam Zachman Tahun 2025 masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, salah satu hal yang perlu ditingkatkan oleh PPS Nizam Zachman berkaitan dengan pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Indeks) di tahun 2025 berada sedikit di bawah target yaitu 1,81 poin di bawah target dengan nilai Realisasi di angka 85,19. Untuk mengatasi ketidaktercapaian tersebut, akan dilakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi secara merata, fasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan melalui izin belajar atau tugas belajar, pemutakhiran dan verifikasi data kepegawaian pada aplikasi myASN secara berkala, serta penguatan monitoring dan evaluasi kinerja dan disiplin pegawai. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan nilai IPASN pada tahun berikutnya dapat meningkat dan mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Semoga Laporan Kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta di tahun selanjutnya.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Andi Mannoengi**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Nizam Zachman Jakarta



Andi Mannoengi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Sasaran Progam		Indikator Kinerja		Target
1.	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	1.	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp juta)	27.676,395
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta meningkat	2.	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Ton)	270.577
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang berdaya saing	3.	Persentase Permohonan Pengusahaan Yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	100
		4.	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	87
		5.	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	84
		6.	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	90
		7.	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	30,10
4.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	8.	Kapal Perikanan Izin Daerah Yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	976
		9.	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	10.	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	45,50
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	85
		12.	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	88
		13.	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Indeks)	87
		14.	Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	76
		15.	Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	81
		16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	92
		17.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	71,5
		18.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	88,5

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	6.781.716.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	39.588.724.000
TOTAL ANGGARAN PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA TAHUN 2025		46.370.440.000

Jakarta, 8 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera
Nizam Zachman Jakarta


Andi Mannoengi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

NOTA DINAS
NOMOR 35/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
Dari : Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian IKU Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2025
Tanggal : 8 Januari 2026

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, terlampir kami sampaikan Capaian IKU “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta” Triwulan IV 2025 yaitu:

Triwulanan 2025	Target PNBP Non SDA (Rp)	Realisasi PNBP Non SDA (Rp)	Persentase Capaian (%)
Triwulan I	6.000.000.000	7.610.601.951	126,84%
Triwulan II	13.000.000.000	17.344.061.074	133,42%
Triwulan III	19.000.000.000	27.785.722.667	146,24%
Triwulan IV	27.676.395.000	35.385.689.266	127,86%

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.


Ditandatangani
Secara Elektronik
Doddy Irnantyo

Lampiran

Nomor : 35/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Tanggal : 8 Januari 2026

Realisasi Pendapatan PNBP di PPS Nizam Zachman Jakarta (Aplikasi SPAN)
Periode 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425621 Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0	34,947,271,187	0	0	0	0	34,947,271,187
2	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	235,073,714	0	0	650,958	0	235,724,672
3	425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	12,400,000	0	0	0	0	12,400,000
4	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0	13,970,000	0	13,970,000
5	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	140,529,000	0	0	0	0	140,529,000
6	425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
7	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	35,794,407	0	0	0	0	35,794,407
GRAND TOTAL		0	35,371,068,308	0	0	14,620,958	0	35,385,689,266

Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha

Ditandatangani
Secara Elektronik

Doddy Irmantyo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

NOTA DINAS
NOMOR 53/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
Dari : Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan
Lampiran : -
Hal : Capaian IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan
Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025
Tanggal : 13 Januari 2025

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, terlampir kami sampaikan Capaian IKU "Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta", Triwulan IV Tahun 2025 yaitu :

Triwulan	Target Produksi (Ton)	Realisasi Produksi (Ton)	Persentase Capaian (%)
Triwulan I	68.056	74.352	108,93%
Triwulan II	133.289	134.968	101,25%
Triwulan III	200.227	196.749	98,26%
Triwulan IV	270.577	282.910	104,56%

Realisasi volume produksi perikanan tangkap di PPS. Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025 secara rinci dapat diakses pada tautan berikut:

https://bit.ly/IKU_PRODUKSI_2025T4.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dikri Cakrawala Uno

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA**

NOTA DINAS
NOMOR 60/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
Dari : Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian IKU Persentase Permohonan Pengusahaan yang
Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera
Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2025
Tanggal : 13 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Pelabuhan Nomor 27/PPSNZJ/RC.610/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini disampaikan Capaian IKU “Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta” Triwulan IV 2025 yaitu **100 %**.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Doddy Irmantyo

Lampiran

Nomor : 60/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

Rekapitulasi Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi Tahun 2025
Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta

No	Nama Pemohon	BMN	Analisa dan Evaluasi Permohonan Pengusahaan BMN Gedung dan Bangunan	
			Hasil Analisa dan Evaluasi	Jangka Waktu
1	Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) Wilayah Jakarta	Kantor UPT Lama	Layak Mengusahakan	1 Tahun
2	Koperasi Jasa Mina Baruna Indonesia (KOSAMBI)	Kantor UPT Lama	Layak Mengusahakan	1 Tahun
3	Himpunan Nelayan Purseseine Nusantara (HNPN)	Kantor UPT Lama	Layak Mengusahakan	1 Tahun
4	PT. Jala Sembilan	Gudang Peralatan Kapal	Layak Mengusahakan	1 Tahun
5	PT Renaya Nailul Jaya	Gedung PIT	Layak Mengusahakan	1 Tahun
6	Lie Yoanna	Gedung PIT	Layak Mengusahakan	1 Tahun
7	Hengky Stijptyo	Gedung PIT	Layak Mengusahakan	1 Tahun
8	PT. Tanjung Permai Abadi	Gedung PIT	Layak Mengusahakan	1 Tahun
9	Iding	Gedung PIT	Layak Mengusahakan	1 Tahun
10	PT Sosoki Hayati Sejahtera	Gedung PIT	Layak Mengusahakan	1 Tahun
11	PT Nayaka Erahusada	Gedung PIT	Layak Mengusahakan	1 Tahun
12	PT Berkah Muara Baru	Bangunan Pengambilan Air Bersih/ Air Baku/Lainnya	Layak Mengusahakan	1 Tahun
13	PT Perikanan Indonesia Cabang Jakarta	MBC Gedung A dan B (GPKN)	Layak Mengusahakan	1 Tahun
14	Roy Armansyah	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
15	Taripah	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
16	Sinta Firliana	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
17	Solihin	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
18	Suginem	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
19	Sri Miwing	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
20	Sus Sanah	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
21	Dwi Utami Handayani	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
22	Agus Ismail	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
23	Sumarnih	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
24	Abil Sayiddina Hamzah	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
25	Fitri Yulianti	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun

No	Nama Pemohon	BMN	Analisa dan Evaluasi Permohonan Pengusahaan BMN Gedung dan Bangunan	
			Hasil Analisa dan Evaluasi	Jangka Waktu
26	Sri Wahyuni	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
27	Juriah	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
28	Pasrin	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
29	Gatot Condro L	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
30	Nur Halimah Septiana	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
31	Tuti	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
32	Tri Khaeni	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
33	Juliawati	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
34	Dewi Retnowati	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
35	Nurilah	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
36	Umi Fadilah	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
37	Tarno	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
38	Rumyati	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
39	Eko Riswanto	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
40	Feri Basuki	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
41	Sumiyati	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
42	Malikha	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
43	Wasilah	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
44	Karyata	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
45	Mudrikah	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
46	Mumu Muharam	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
47	Taryumi	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
48	Rasimun	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
49	Roedi	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
50	Imam Sapi'i	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
51	Castem	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
52	Fatkhuroji	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
53	Fatmawati	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
54	Suwarto	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
55	Sumiyati	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
56	Kosidah	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
57	Saridi	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
58	Poniyem	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
59	Wasilah	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
60	Suwarno	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun

No	Nama Pemohon	BMN	Analisa dan Evaluasi Permohonan Pengusahaan BMN Gedung dan Bangunan	
			Hasil Analisa dan Evaluasi	Jangka Waktu
61	Satinem	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
62	Dasep Suherlan	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
63	Wachidah Nurhayati	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
64	Agus Salim	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
65	Emed Sumaedi	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
66	Cahya Adi Kusuma	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
67	Moh Sodikin	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
68	Toha Maulana	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
69	Intan Juita	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
70	Lami	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
71	Didik Kurniawan	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
72	Rustawi	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
73	Nur Laeli	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
74	Jumiati	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
75	Rohmat Kumasin	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
76	Puji Astuti	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
77	Mickael Marpaung	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
78	Mulyanto	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
79	Yulia Nur Aeni	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
80	Anita	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
81	Sarif Hidayat	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
82	M. Fahmi Amrilah	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
83	Muni Safira	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
84	Jaenal Abidin	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
85	Nurcholis	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun
86	Jamas Maulana	Kantin	Layak Mengusahakan	1 Tahun

Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha



Ditandatangani
Secara Elektronik

Doddy Irmantyo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

NOTA DINAS
NOMOR 28/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
Dari : Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian IKU Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera
Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV – 2025
Tanggal : 08 Januari 2026

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pelaporan kinerja (Lkj) PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025 , berikut disampaikan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025 yang berupa hasil evaluasi kinerja pada aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) Tahun 2025 , dengan rata-rata nilai evaluasi kinerja PIPP dari bulan Oktober s.d. Desember 2025 adalah 97,58% (rekapitulasi data terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dikri Cakrawala Uno

Lampiran

Nomor : 28/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Tanggal : 08 Januari 2026

NILAI EVALUASI KINERJA PIPP
 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA
 Bulan : Oktober 2025
INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Realisasi	Nilai	Keterangan
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	31,00	5,00	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	106,26	4,00	Antara 25 - 50%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	95,69	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	31725,00	4,00	Diatas 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	2577,00	4,00	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	700,00	4,00	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	70,00	4,00	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	2327,00	5,00	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	1037,91	5,00	Lebih dari 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	162,00	5,00	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	91,98	3,75	Kapal yang masuk 100%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	7,00	4,00	Antara 2 – 2 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	3,00	3,00	Tidak ada
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4,00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100,00	5,00	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	47,00	4,00	Diatas 30 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	100,00	3,00	Sangat Optimal (80-100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	6204,71	3,00	Lebih dari 3000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	4 (81)	4,00	---
Jumlah				99,75	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

NILAI EVALUASI KINERJA PIPP
 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA
 Bulan : November 2025
INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Realisasi	Nilai	Keterangan
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	30,00	5,00	Lebih dari 20 kali
2	<i>E-Logbook</i>	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	72,96	3,00	Antara 25 - 50%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	144,20	4,00	Diatas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	28495,00	4,00	Diatas 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	2577,00	4,00	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	700,00	4,00	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	70,00	4,00	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	2689,00	5,00	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	696,88	5,00	Lebih dari 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	188,00	5,00	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	79,71	3,75	Kapal yang masuk 100%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	4,00	4,00	Antara 2 – 2 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	4,00	3,00	Tidak ada
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4,00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100,00	5,00	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	47,00	4,00	Diatas 30 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	100,00	3,00	Sangat Optimal (80-100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	6104,34	3,00	Lebih dari 3000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	4 (85)	4,00	---
Jumlah				98,75	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

NILAI EVALUASI KINERJA PIPP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA
 Bulan : Desember 2025
INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN

No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Realisasi	Nilai	Keterangan
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	31,00	5,00	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	---
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	47,74	2,00	Antara 25 - 50%
6	Pendapatan Pelabuhan	%	76,92	3,00	Antara 60 - 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	---
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	96555,00	4,00	Diatas 6000 GT
9	Panjang Dermaga	m	2577,00	4,00	Diatas 300m
10	Kedalaman Kolam	cm	700,00	4,00	Diatas 3 m
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	---
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	---
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	70,00	4,00	Diatas 20 ha
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	11171,00	5,00	Lebih dari 60 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	999,38	5,00	Lebih dari 50 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	518,00	5,00	Lebih dari 14 unit
17	STBLKK	%	39,61	1,25	Kapal yang masuk kurang dari 50%
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	4,00	4,00	Diatas 3 kali
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	3,00	3,00	Antara 3 - 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4,00	---
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
22	Penyaluran Es (kapal)	%	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan (100%)
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	100,00	5,00	Sesuai kebutuhan (100%)
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	47,00	4,00	Diatas 30 unit
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	100,00	3,00	Sangat Optimal (80 - 100%)
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	6408,22	3,00	Lebih dari 3000 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	4 (89)	4,00	---
Jumlah				94,25	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dikri Cakrawala Uno

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA**

NOTA DINAS

NOMOR 37/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
Dari : Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025
Tanggal : 09 Januari 2026

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pelaporan kinerja (LKJ) PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025, berikut disampaikan Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 adalah sebesar **93,45%**. (rekapitulasi data terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Amirullah Sjahir

Lampiran 2

Nomor : 37/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Tanggal : 09 Januari 2026

REKAPITULASI PELAYANAN KESYAHBANDARAN DAN PERRHITUNGANNYA TERHADAP CAPAIAN IKU PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA TAHUN 2025

A. REKAPITULASI PELAYANAN KESYAHBANDARAN TAHUN 2025

NO	Jenis Layanan	Bulan												Total Layanan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	STBLKK	199	184	388	138	208	228	241	177	180	197	211	357	2708
2	Persetujuan Berlayar	186	275	200	213	289	295	307	276	209	173	164	142	2729
3	Lembar Awal	56	34	20	29	36	81	40	51	51	57	61	44	560
4	Lembar Turunan	1.079	1089	1.159	1.492	827	1104	541	885	1227	2321	1858	1180	14762
5	Lembar Turunan yang Disederhanakan	87	85	79	96	68	89	36	73	79	131	69	80	972
6	Pernyataan Pengolahan	6	8	13	10	7	4	23	16	8	14	10	18	137

B. DATA KAPAL YANG BERAKTIVITAS, TOTAL PENEBITAN SHTI, DAN PERMINTAAN VERIFIKASI SHTI DI PPSNZJ TAHUN 2025

No	Jenis Data	Jumlah	Keterangan
1	Data Kapal Yang Beraktifitas Di PPSNZJ	1528	-
2	Data Kapal Yang Melakukan Penerbitan STBLKK	1403	-
3	Data Kapal Yang Melakukan Penerbitan SPB	1403	-
4	Data Jumlah Penerbitan Shti (LT, LTS, PP)	15871	-
5	Data Jumlah Permintaan Verifikasi SHTI	6	Permintaan Verifikasi Dari OK Belgia Denmark, & Spanyol

C. PERHITUNGAN CAPAIAN PELAYANAN KESYAHBANDARAN TERHADAP IKU

No	Indikator	Formula Perhitungan	Jumlah Layanan	Jumlah permintaan verifikasi SHTI	Kapal yang beraktivitas	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot
1	Jumlah Persetujuan Berlayar yang diterbitkan (x1)	$(\text{Jumlah Persetujuan Berlayar} / \text{Jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan}) \times 100$	1403	-	1528	92	40%	36,73
2	Jumlah Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) yang diterbitkan (x2)	$(\text{Jumlah kapal yang diterbitkan STBLKK} / \text{Jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan}) \times 100$	1403	-	1528	92	40%	36,73
3	Jumlah Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI LT, LTS, IMPOR) yang diterbitkan (x3)	$100 - (\text{Jumlah permintaan verifikasi SHTI} / \text{Jumlah SHTI yang diterbitkan}) \times 100$	15871	6	-	99,96	20%	19,99
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran (x1+x2+x3)								93,45

Nama IKU = Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
 Target = 84%
 Capaian = **93,45%**

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran



Ditandatangani
Secara Elektronik

Amirullah Sjahir

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

MEMORANDUM
NOMOR 59/PPSNZJ/RC.610/II/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan
Dari : Ketua Tim Kerja Tata Kelola Prasarana dan Sarana
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pelaporan kinerja (LKJ) PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025, berikut disampaikan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen) Triwulan IV 2025 dengan penilaian berdasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) TA. 2025 telah dilakukan pemeliharaan fasilitas UPT PPS Nizam Zachman Jakarta yang dilakukan oleh Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana dengan tingkat realisasi anggaran 97,53%.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Diki Indra Perdana

Lampiran Memorandum
 Nomor : 59/PPSNZJ/RC.610/I/2026
 Tanggal : 13 Januari 2026

1. Realisasi Anggaran Tim Kerja Tata Kelola Prasarana dan Sarana Triwulan IV TA. 2025

KODE	JENIS PEKERJAAN	NILAI	NILAI TAGIHAN	BULAN	NILAI REALISASI	SISA DANA
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				0	0
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan				0	0
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi				0	0
	Lokasi : KOTA JAKARTA UTARA				0	0
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar				0	0
054	Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan				0	0
F	Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan				0	0
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin				0	0
	(KPPN.175-Jakarta VI)				0	0
	- Perbaikan Instalasi Pompa Pengendali Banjir Barat	160.000.000	154.436.300	Mei	154.436.300	5.563.700
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap					
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran					
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
A	Operasional Pemeliharaan Kantor					
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan					
	(KPPN.175-Jakarta VI)					
	- Pemeliharaan Gedung Pasar Ikan Terintegrasi	47.923.000	47.805.400	Desember	47.805.400	117.600
	- Pemeliharaan Kantor Pelayanan Terpadu	30.572.000	30.571.350	Desember	30.571.350	650
	- Pemeliharaan Jalan Akses Jembatan Timbang	2.793.000	2.790.450	Desember	2.790.450	2.550
	- Pemeliharaan Bangunan Power House	36.788.000	36.787.300	Desember	36.787.300	700
	- Pemeliharaan Bangunan Gudang Incinerator	4.987.000	4.987.000	Desember	4.987.000	0
	- Pemeliharaan Mess Operator	38.891.000	38.890.200	Desember	38.890.200	800
	- Normalisasi Lantai Ruang Pantau Menara Kontrol	42.624.000	42.623.600	Desember	42.623.600	400
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					
	(KPPN.175-Jakarta VI)					
	- BBM Genset	29.600.000	14.600.000	Januari	14.600.000	15.000.000
	- Pemeliharaan Trafo Listrik Power House	47.420.000	47.419.200	Desember	47.419.200	800
	- Pemeliharaan Pompa Pengendali Banjir Timur	49.021.000	49.020.375	Desember	49.020.375	625
	- Pemeliharaan Pompa Pengendali Banjir Barat	17.028.000	17.027.955	Desember	17.027.955	45
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan					
	(KPPN.175-Jakarta VI)					
	- Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Panel Listrik LVMDP	107.571.000	107.570.011	Desember	107.570.011	989

2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal					
051	Pengadaan sarana perkantoran					
A	Pengadaan dan Perbaikan Fasilitas Pelabuhan Perikanan					
532121	<u>Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin</u>					
	(KPPN.175-Jakarta VI)					
	- Perbaikan Instalasi Pompa Pengendali Banjir Barat	222.108.000	222.108.000	Januari	222.108.000	0
	TOTAL	837.326.000	816.637.141		816.637.141	20.688.859
	97,53%					

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

MEMORANDUM
NOMOR 57/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan
Dari : Ketua Tim Kerja Tata Kelola Prasarana dan Sarana
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2025
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pelaporan kinerja (LKJ) PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025, berikut disampaikan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2025 dengan penilaian berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN), Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta telah menyelesaikan Program Lingkungan yang terdiri dari 18 Program Mandatory dan 17 Program Voluntary dengan Skor Kumulatif 251,48 dan Skor Rata-rata 83,83% serta termasuk dalam peringkat ke-16 dan dalam kategori penilaian Sangat Baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Diki Indra Perdana

Lampiran Memorandum
Nomor : 57/PPSNZJ/RC.610/I/2026
Tanggal :13 Januari 2026

1. Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan IV TA. 2025 dari Direktorat Kepelabuhan Perikanan



Nomor : B.144/DJPT.4/PI.310/I/2026 12 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian dan Hasil Evaluasi Implementasi SELARASKAN Triwulan IV TA.2025 di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan implementasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) Versi 2, bersama ini kami sampaikan capaian dan hasil evaluasi SELARASKAN triwulan IV TA. 2025 di Pelabuhan Perikanan sebagai berikut :

1. Capaian implementasi SELARASKAN bulan Oktober s.d Desember 2025 yang dievaluasi pada bulan Januari 2026 dengan skor setelah koreksi *evidence* oleh Tim Evaluasi SELARASKAN sebagai berikut:

NO	NAMA PELABUHAN	2025			SKOR KUMULATIF	SKOR RATA-RATA	KETERANGAN
		OKT	NOV	DES			
1	PPN Sibolga	96,16	96,13	96,03	288,31	96,10	SANGAT BAIK
2	PPN Pemangkat	95,36	95,09	95,19	285,64	95,21	SANGAT BAIK
3	PPS Bungus	92,65	93,41	93,41	279,47	93,16	SANGAT BAIK
4	PPN Kejawanan	97,03	89,47	89,47	275,98	91,99	SANGAT BAIK
5	PPS Cilacap	89,01	93,47	93,23	275,71	91,90	SANGAT BAIK
6	PPN Pengambangan	93,98	90,89	90,52	275,39	91,80	SANGAT BAIK
7	PPN Palabuhanratu	92,71	88,45	90,89	272,05	90,68	SANGAT BAIK
8	PPN Ternate	91,64	90,11	90,11	271,85	90,62	SANGAT BAIK
9	PPN Prigi	84,80	90,81	90,31	265,92	88,64	SANGAT BAIK
10	PPS Bitung	93,30	85,38	85,09	263,77	87,92	SANGAT BAIK
11	PPP Teluk Batang	93,80	84,66	84,55	263,01	87,67	SANGAT BAIK
12	PPN Brondong	87,33	87,47	87,56	262,36	87,45	SANGAT BAIK

NO	NAMA PELABUHAN	2025			SKOR KUMULATIF	SKOR RATA-RATA	KETERANGAN
		OKT	NOV	DES			
13	PPS Kendari	85,62	85,87	85,95	257,44	85,81	SANGAT BAIK
14	PPN Tanjung Pandan	85,74	83,49	82,98	252,21	84,07	SANGAT BAIK
15	PPN Ambon	90,52	80,52	80,52	251,56	83,85	SANGAT BAIK
16	PPS Nizam Zachman Jakarta	77,41	86,74	87,34	251,48	83,83	SANGAT BAIK
17	PPN Pekalongan	80,75	83,49	83,70	247,94	82,65	SANGAT BAIK
18	PPN Karangantu	81,67	82,19	82,31	246,17	82,06	SANGAT BAIK
19	PPS Belawan	80,86	82,09	82,33	245,28	81,76	SANGAT BAIK
20	PPN Tual	88,34	77,90	77,81	244,05	81,35	SANGAT BAIK
21	PPN Kwandang	89,62	76,85	77,33	243,80	81,27	SANGAT BAIK
22	PPN Sungailiat	90,30	75,01	75,01	240,32	80,11	SANGAT BAIK

2. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dengan capaian nilai SELARASKAN SANGAT BAIK agar mempertahankan kinerjanya di bidang kebersihan dan lingkungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kepelabuhanan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ady Candra

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA**

NOTA DINAS
NOMOR 36/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
Dari : Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian Indikator Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan di PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025
Tanggal : 09 Januari 2026

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pelaporan kinerja (LKJ) PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025, berikut disampaikan Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2025 adalah sebanyak **1065 kapal**. (rekapitulasi data terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Amirullah Sjahir

Lampiran 2

Nomor : 36/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Tanggal : 09 Januari 2026

REKAPITULASI PENERBITAN SKKP IZIN DAERAH DI PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO.	TANGGAL SPT	NAMA KAPAL	PEMILIK/PERUSAHAAN	GT	NO. SELAR	NO. SERTIFIKAT	ALAT PENANGKAP IKAN	DAERAH PEMERIKSAAN	TANGGAL TERBIT SKKP
1	19-SEP-25	MUTIARA JAYA D2	WARNUDI	10	3160/FT	B.191/PPSNZJ/PI.210/IX/2025	PUKAT CINCIN TERI DENGAN SATU KAPAL	PP. MUARA ANGKE	24-SEP-25
2	2-OCT-25	LANGGENG WD	ANDINI JULIANI	10	3968/FT	B.198/PPSNZJ/PI.210/X/2025	PUKAT CINCIN TERI DENGAN SATU KAPAL	PP. MUARA ANGKE	6-OCT-25
3	22-OCT-25	DOA BUNDA TANBU	H.ABD.KAHAR	20	224/LLT	B.201/PPSNZJ/PI.210/X/2025	JARING TARIK BERKANTONG	PP BATULICIN	30-OCT-25
4	22-OCT-25	SUMBER RIZKI 03	AMRULLAH	29	439/LLW	B.203/PPSNZJ/PI.210/X/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	30-OCT-25
5	22-OCT-25	COLLI LOLOE 01	H.M. KASIM	30	441/LLW	B.207/PPSNZJ/PI.210/X/2025	PUKAT CINCIN PELAGIS KECIL DENGAN SATU KAPAL	PP BATULICIN	30-OCT-25
6	22-OCT-25	RIZKI 2	MURLAN	29	442/LLW	B.204/PPSNZJ/PI.210/X/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	30-OCT-25
7	22-OCT-25	CINTA MADINAH RADELA	M.YUSUP	22	246/LLW	B.205/PPSNZJ/PI.210/X/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	30-OCT-25
8	22-OCT-25	CINTA MADINAH 06	M.YUSUP	30	257/NP	B.206/PPSNZJ/PI.210/X/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	30-OCT-25
9	22-OCT-25	BERKAT AULIA 02	AULIA HAOUFIQ	18	418/LLT	B.202/PPSNZJ/PI.210/X/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	30-OCT-25
10	18-SEP-25	MUTIARA JAYA D2	WARNUDI	10	3160/FT	B.191/PPSNZJ/PI.210/IX/2025	PUKAT CINCIN TERI DENGAN SATU KAPAL	MUARA ANGKE	24-SEP-25
11	30-OCT-25	ASTRAKO	SUHARDI LAMBOK MANGIDO T	13	2182/FP	B.208/PPSNZJ/PI.210/XI/2025	PUKAT CINCIN TERI DENGAN SATU KAPAL	MUARA ANGKE	6-NOV-25
12	9-NOV-25	GODEKA	ABUHAER	12	452/LLW	B.214/PPSNZJ/PI.210/XI/2025	PENGANGKUT IKAN	PP KOTA BARU	19-NOV-25
13	9-NOV-25	REMAJA 01	AB MAJID	17	1087/LLA	B.212/PPSNZJ/PI.210/XI/2025	PUKAT CINCIN PELAGIS KECIL DENGAN SATU KAPAL	PP KOTA BARU	19-NOV-25
14	9-NOV-25	ARTIKA WULANDARI	HERMAN	14	1589/LLD	B.213/PPSNZJ/PI.210/XI/2025	JARING INSANG HANYUT	PP KOTA BARU	19-NOV-25

NO.	TANGGAL SPT	NAMA KAPAL	PEMILIK/PERUSAHAAN	GT	NO. SELAR	NO. SERTIFIKAT	ALAT PENANGKAP IKAN	DAERAH PEMERIKSAAN	TANGGAL TERBIT SKKP
15	7-NOV-25	ANUGERAH	FADELI	26	4326/BA	B.210/PPSNZJ/PI.210/XI/2025	JARING TARIK BERKANTONG (ES BATU)	KALIBARU	11-NOV-25
16	7-NOV-25	RUSLIAN CS	FADELI	25	9802/BC	B.211/PPSNZJ/PI.210/XI/2025	JARING TARIK BERKANTONG (ES BATU)	KALIBARU	11-NOV-25
17	7-NOV-25	TARA AR	FADELI	16	4818/BA	B.209/PPSNZJ/PI.210/XI/2025	JARING TARIK BERKANTONG (ES BATU)	KALIBARU	11-NOV-25
18	2-DEC-25	GERVIN	MASTANK WILLYANTO	18	442/BB	B.215/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	JARING TARIK BERKANTONG	KALIBARU	8-DEC-25
19	2-DEC-25	KILAT MELIMPAH JAYA	SITI NURHASANAH	10	8873/BC	B.216/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	PUKAT CINCIN TERI DENGAN SATU KAPAL	MUARA ANGKE	8-DEC-25
20	17-DEC-25	RUSDI PUTRA 03	RUSDIANSYAH	26	2134/LLA	B.227/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25
21	17-DEC-25	SINAR MAKASSAR 02	ABDUL RAHMAN	13	284/LLW	B.235/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25
22	17-DEC-25	BERKAT AULIA 06	H. JUNAIDI. S	30	257/LLT	B.236/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25
23	17-DEC-25	MASNIA MASRUL 07	ABD. MUIS	30	237/LLT	B.237/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25
24	17-DEC-25	MASNIA MASRUL 06	ABD. MUIS	30	362/LLX	B.238/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25
25	17-DEC-25	SUHRA VII	AHMAD RIFA'I	30	410/LLX	B.239/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25
26	17-DEC-25	SINAR JAYA X	ABDUL RIFA'I	23	241/LLW	B.240/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25
27	19-DEC-25	HARAPAN BERSAMA 07	IBRAHIM	27	239/IIT	B.234/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25
28	19-DEC-25	NIAT BERSAMA I	AGUS	18	42/IIW	B.233/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25
29	19-DEC-25	NUR AMELIA TANBU	M. ARSYAD	30	376/IIT	B.231/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	PUKAT CINCIN PELAGIS KECIL DENGAN SATU KAPAL	PP BATULICIN	27-DEC-25
30	19-DEC-25	BERKAH HIKMAH 1	BUDI ANWAR	18	461/IIW	B.246/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	JARING INSANG HANYUT	PP BATULICIN	27-DEC-25
31	19-DEC-25	BERKAH HIKMAH 2	JUMADIL AWAL	22	462/IW	B.228/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	JARING INSANG HANYUT	PP BATULICIN	27-DEC-25
32	19-DEC-25	BERKAH HIKMAH 3	SYAFRUDDIN	21	463/IIW	B.229/PPSNZJ/PI.210/XII/2025	JARING INSANG HANYUT	PP BATULICIN	27-DEC-25

NO.	TANGGAL SPT	NAMA KAPAL	PEMILIK/PERUSAHAAN	GT	NO. SELAR	NO. SERTIFIKAT	ALAT PENANGKAP IKAN	DAERAH PEMERIKSAAN	TANGGAL TERBIT SKKP
33	17-DEC-25	FAISAL AKBAR	MUHAMMAD FAISAL	26	202/IIT	B.241/PPSNZJ/Pl.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25
34	17-DEC-25	NUR AEN 03	NONDANG	29	287/LLT	B.232/PPSNZJ/Pl.210/XII/2025	PUKAT CINCIN PELAGIS KECIL DENGAN SATU KAPAL	PP BATULICIN	27-DEC-25
35	17-DEC-25	GENERASI ZAINI	H. SYAHRUDDIN	21	475/LC	B.242/PPSNZJ/Pl.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25
36	17-DEC-25	HARAPAN BERSAMA 04	IBRAHIM	24	260/NP	B.243/PPSNZJ/Pl.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25
37	17-DEC-25	MASNIA MASRUL 01	ABD. MUIS	18	132/IIT	B.244/PPSNZJ/Pl.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25
38	17-DEC-25	BINTANG USAHA 04	PIRDAUS	29	236/IIT	B.245/PPSNZJ/Pl.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25
39	17-DEC-25	BERKAT AULIA 05	H. JUNAIDI. S	30	268/NP	B.230/PPSNZJ/Pl.210/XII/2025	PENGANGKUT IKAN	PP BATULICIN	27-DEC-25

Nama IKU
 Target Triwulan IV
 Perhitungan IKU
 Capaian IKU SKKP
 Capaian Triwulan IV

= Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (nilai)
 = 876 Kapal + 10 Kapal + 35 Kapal + 25 Kapal+30 Kapal = 976 Kapal
 = Capaian 2024 + TW I 2025 + TW II 2025 + TW III 2025+ TW IV 2025
 = 876 Kapal+ 44 Kapal + 35 Kapal + 71 Kapal+39 Kapal
 = **1065 Kapal / 109,11% dari Target**

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran



Ditandatangani
Secara Elektronik

Amirullah Sjahir

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

NOTA DINAS
NOMOR 38/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
Dari : Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian Indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan Semester II Tahun 2025
Tanggal : 9 Januari 2026

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pelaporan kinerja (LKJ) PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025, berikut disampaikan Capaian Indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan Semester II Tahun 2025 adalah sebesar **0,67** atau dalam Kategori **Baik**. (rekapitulasi data terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Amirullah Sjahir

Lampiran
 Nomor : 38/PPSNZJ/RC.610/I/2026
 Tanggal : 9 Januari 2026

LAMPIRAN PENILAIAN IKU PERSYARATAN BEKERJA AWAK KAPAL PERIKANAN DI PPSNZJ SEMESTER II TAHUN 2025

1. Kertas Kerja Penilaian IKU

Pemenuhan Persyaratan	Kriteria Range Ukuran Kapal (GT)	Parameter yang diharapkan	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	Jumlah SPB Terbit di kondisi a	Jumlah SPB Terbit di kondisi b	Jumlah SPB Terbit di kondisi c	Jumlah SPB Terbit di kondisi d	(e+f+g+h) (e*a)+(f*b)+(g*c)+(h*d) (I/I)			Data Dukung	
			Nilai 0,25 (a)	Nilai 0,50 (b)	Nilai 0,75 (c)	Nilai 1,00 (d)	(e)	(f)	(g)	(h)	Jumlah Krulis / SPB Terbit (I)	Rata-rata Nilai Pembobotan (J)	Total Nilai (K)	Data Dukung	Link data dukung
Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Bekerja di Atas Kapal Perikanan	s.d. 5 GT	Dari SPB yang terbit (Pemenuhan persyaratan (Nakhoda memiliki Sertifikat kompetensi SKN dan Jamsos untuk nakhoda)	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - Jamsos bagi Nakhoda	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - Jamsos bagi Nakhoda - Krulis	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - Jamsos bagi Nakhoda - Sertifikat kompetensi SKN bagi Nakhoda - Krulis	0	0	0	0	0	0	0,00	Krulis	
	> 5 s.d. 30 GT	Pemenuhan persyaratan (Usia (KTP), PKL, Jamsos, Surat Keterangan Sehat, Sertifikat kompetensi) --> tanpa BPP dan Sijil	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - Jamsos - Krulis	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Krulis	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Krulis	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - BPP - Krulis	7	0	47	0	54	37	0,69	Krulis dan SPB yang diterbitkan	
	>30 s.d. 100 GT	Pemenuhan persyaratan (Usia (KTP), PKL, Jamsos, Surat Keterangan Sehat, Sertifikat kompetensi, BPP) --> tanpa Sijil	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Krulis	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Krulis	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - Krulis	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - BPP - Krulis	16	0	432	0	448	328	0,73	Krulis dan SPB yang diterbitkan	
	≥100 GT	Pemenuhan persyaratan (Usia (KTP), PKL, Jamsos, Surat Keterangan Sehat, Sertifikat kompetensi, BPP, Sijil)	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Krulis	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Disijil	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - BPP - Disijil	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan - BPP - Disijil	44	0	282	0	326	222,5	0,68	Sijil/Krulis, dan SPB yang diterbitkan	https://drive.google.com/drive/folders/1iCYZeNH9j13n08mg-9aPODxc9JxIOAG
	≥100 GT Laut Lepas	Pemenuhan persyaratan (Usia (KTP), PKL, Jamsos, Surat Keterangan Sehat, Sertifikat kompetensi, BPP, Sijil)	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Krulis	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Disijil	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - BPP - Disijil	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan - BPP - Disijil	0	0	334	0	334	250,5	0,75	Sijil/Krulis, dan SPB yang diterbitkan	
	≥300 GT	Pemenuhan persyaratan (Usia (KTP), PKL, Jamsos, Surat Keterangan Sehat (MCU), Sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan (endorsement), BPP, Sijil)	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - BPP - Krulis	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat - Sertifikat kompetensi - BPP - Disijil	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat (MCU) - Sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatannya - BPP - Disijil	Terpenuhi persyaratan: - Usia 18 tahun dibuktikan dengan KTP - PKL - Jamsos - Surat Keterangan Sehat (MCU) - Sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatannya (endorsement) - BPP - Disijil	2	107	0	0	109	54	0,50	Sijil/Krulis, dan SPB yang diterbitkan	
											1271	892	3,35		

2. Capaian Tingkat Kepatuhan

No.	Jenis Kriteria Ukuran	Rata2 Nilai	Kategori Pemenuhan Persyaratan	Tingkat Pemenuhan
1	s.d. 5 GT	0,00	-	s.d. 5 GT (-)
2	> 5 s.d. 30 GT	0,69	Baik	> 5 s.d. 30 GT (Baik)
3	>30 s.d. 100 GT	0,73	Baik	>30 s.d. 100 GT (Baik)
4	≥100 GT	0,68	Baik	≥100 GT (Baik)
5	≥100 GT Laut Lepas	0,75	Baik	≥100 GT Laut Lepas (Baik)
6	≥300 GT	0,50	Cukup	≥300 GT (Cukup)
Nilai Rata-Rata		3,35		
Jumlah jenis kriteria range data (menyesuaikan dgn kondisi di pelabuhan)		5	0,67	
Nilai Rata-Rata (nilai rata-rata g/nilai rata-rata f)		0,67	Baik	Tingkat Kepatuhan 3

b

Catatan:

Pembobotan nilai ini sesuai dengan hasil pengamatan pada pemenuhan persyaratan bekerja di UPT sesuai dengan Krulis/Sijil dan SPB yang diterbitkan

Self declare dari hasil dokumen yang ada, jadi untuk penentuannya hanya didasarkan pada ceklist dokumen yang masuk tanpa ada pendalaman)

- Berikut adalah link data dukung penilaian capaian IKU persyaratan bekerja awak kapal perikanan semester II di PPS Nizam Zachman sebagai berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1iCYZeNH9ij13n08mg-9aPODxc9JxIOAG?usp=drive_link
- Berdasarkan data penilaian mandiri diatas diperoleh capaian IKU persyaratan bekerja awak kapal perikanan semester I di PPS Nizam Zachman Adalah **0,67 (Baik)** dengan target awal 0,26 (Cukup) sehingga capaian tersebut 0,41 lebih besar daripada target yang diberikan.

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran



Ditandatangani
Secara Elektronik

Amirullah Sjahir

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR 56/PPSNZJ/RC.610/II/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan PPS Nizam Zachman Jakarta
Dari : Kepala Sub Bagian Umum
Hal : Capaian IKU Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai) 2025
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 13 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Pelabuhan Nomor 27/PPSNZJ/RC.610/II/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini disampaikan Capaian IKU “Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai) 2025” yaitu 88,95 (Nilai) dengan rincian sebagaimana Lampiran. Demikian disampaikan atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Mohamad Yusuf Santoso

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
PPS NIZAM ZACHMAN TAHUN 2025
WBK

Area Perubahan			Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Nilai Minimum
A. PENGUNGKIT			60.00					
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	3.39	3.67	7.06	88.27%	OK
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	7.00	2.83	2.59	5.42	77.40%	OK
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.49	3.20	7.69	76.90%	OK
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	4.84	5.00	9.84	98.44%	OK
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	6.63	6.88	13.50	90.02%	OK
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	4.49	3.55	8.04	80.38%	OK
TOTAL PENGUNGKIT						51.55	85.92%	OK
B. HASIL			40.00					
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22.50			20.73	92.11%	OK
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17.50			16.98	97.00%	OK
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00			3.75	75.00%	OK
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50			16.67	95.25%	
	-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50			16.67	95.25%	OK
TOTAL HASIL						37.39	93.48%	
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS						88.95		OK

Keterangan	Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZJ	Daftar Bukti Dukungan dan Link Unit PPSNZJ	Penilaian	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZJ	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Itjen Mei 2025
A. PENGUNGKIT	60.00							51.55	85.92%			
I. PEMENUHAN	30.00							26.67	88.91%			
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00							3.39	84.75%			
1.1. Penyesuaian Tim Kerja	0.50							0.50	100.00%			
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas				Ya	Dalam perubahan tim 2024, semua unsur unit kerja telah terwakili, yaitu dari pejabat struktural, fungsional, ASN dan PKN, dan kantor pusat maupun instalasi. 1. ST Tim ZI Tahun 2024 Nomor B.125/PPSNZJ/KP.440/I/2024 tgl 9 Januari 2024 2. ST Tim Perubahan ZI Tahun 2024 Nomor B.3608/PPSNZJ/KP.440/X/2024 tgl 1 Oktober 2024 3. ST Tim ZI 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1u6U1u6Z7Pw3a3Xa35H4183edj2YAssKj	Ya	1.00	1. Tim harus melibatkan seluruh unsur unit kerja. Keterwakilan unsur unit kerja mengacu pada bagan struktur organisasi unit kerja sesuai dengan peraturan Orta. Jabatan/pegawai yang tertuang dalam bagan struktur organisasi harus terlibat dalam perwakilan tim. 2. Tim terbagi dalam seluruh indikator pengukur (pemenuhan dan reform) dan hasil meliputi: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, pengantian akuntabilitas, pengantian pengawasan, pelayanan publik, pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik dan dilengkapi dengan uraian tugas (mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WHBM di Instansi Pemerintah). 3. Kewenangan Penetapan mengacu Permen KP Nomor 42 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP yaitu penetapan SK oleh eselon I, sedangkan untuk tugas UPT menggunakan ST. 4. SK/ST yang ditetapkan harus masih berlaku dan ditandatangani oleh Pimpinan; 5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika dalam SK/ST telah mengakomodir seluruh komponen, SK/ST masih berlaku dan ditandatangani Pimpinan, maka dinilai Ya; b. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka dinilai Tidak.	Telah terdapat SK Tim Kerja Tahun 2024 dan 2025 namun belum terdapat anggota tim yang berasal dari wilker Nizam Zachman (Bangirmasin, Muara Angke, Muara Kitap, Batulicin, Kotabaru)		
		Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.	Ya/Tidak	Ya			Ya	1.00				
	</											

Keterangan		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZ/	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit PPSNZ/	Penilaian	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZ/	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Ijtjen Mei 2025
	b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas		a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas	A/B/C/D	A	1. Laporan Monev TW I, TW II, TW III, dan TW IV 2. Bukti Keterlibatan Pimpinan pada Rapat Monev TW I, TW II, TW III, dan TW IV		B	0.67			1. Hasil monev pembangunan ZI menuju WRK/WHBM memuat substansi: a. Perbandingan rencana kerja dengan realisasi pelaksanaan kegiatan; b. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana dan penyebab tidak terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana, dilengkapi dengan saran perbaikan dan/atau rencana akan dilaksanakannya kegiatan yang tidak sesuai rencana; c. Tindak lanjut periode monev sebelumnya; d. Hasil monev dapat berbentuk tabel atau narasi atau memorandum hasil pembahasan monev, sepanjang substansinya sesuai sebagaimana disebutkan pada poin a-c 2. Keterlibatan pimpinan dalam monev melalui kehadiran pimpinan pada rapat monev baik secara langsung/daring dan undangan rapat monev. Pimpinan dimaksud adalah kepala unit kerja atau plh/plh kepala unit kerja yang ditunjuk; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Dinilai A, jika laporan monev disusun berkala (minimal semesteran) dan terdapat keterlibatan pimpinan, substansi lengkap (perbandingan rencana kerja dengan realisasi pelaksanaan kegiatan, memuat substansi yang tidak sesuai rencana dan penyebabnya, memberikan rekomendasi yang relevan dan tidak berulang/tidak sekedar formalitas, dan tindak lanjut periode monev sebelumnya); b. Dinilai B jika: 1) Hasil monev yang disusun berkala dan terdapat keterlibatan pimpinan, namun substansi tidak lengkap; atau 2) Laporan monev dilakukan berkala, substansi lengkap namun tidak melibatkan pimpinan; atau 3) Laporan monev memuat substansi lengkap, terdapat keterlibatan pimpinan namun tidak berkala. c. Dinilai C jika: 1) Laporan monev berkala, namun substansi tidak lengkap dan tidak terdapat keterlibatan pimpinan; atau 2) Laporan monev memuat substansi lengkap, namun tidak berkala dan tidak terdapat keterlibatan pimpinan; atau 3) Laporan monev melibatkan pimpinan, namun tidak berkala dan substansi tidak lengkap. Rekomendasi hasil monev kegiatan pembangunan ZI menuju WRK/WHBM yang telah ditindaklanjuti, dapat dilakukan dalam bentuk: 1. Bab tersendiri dalam Laporan Monev Pembangunan ZI Menuju WRK/WHBM, yaitu Bab Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya; 2. Melengkapi tindak lanjut dengan bukti pelaksanaan atau uraian/penjelasan pelaksanaan kegiatan yang ditindaklanjuti; 3. Melengkapi informasi jumlah tindak lanjut yang telah dilakukan dibandingkan rekomendasi dituangkan dalam presentase; 4. Tim agar menghitung jumlah tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan; 5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika sebagian besar (>50%) rekomendasi ditindaklanjuti, maka dinilai B; b. Jika sebagian kecil (<50%) rekomendasi ditindaklanjuti, maka dinilai C; Contoh: 1 dari 4 rekomendasi telah dilaksanakan (25%), maka dinilai C; c. Jika Laporan monev yang disusun tidak memuat rekomendasi atau rencana untuk periode berikutnya, dinilai D, kecuali jika kegiatan telah dilakukan seluruhnya dan tidak terdapat permasalahan, maka dinilai A; d. Jika tidak terdapat tindak ditanggapi dengan bukti pelaksanaan atau uraian/penjelasan pelaksanaan kegiatan yang ditindaklanjuti, maka dinilai 1 tingkat lebih rendah dari nilai yang seharusnya.	Laporan Monev belum membahas terkait penyebab tidak terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana, dilengkapi dengan saran perbaikan dan/atau rencana akan dilaksanakannya kegiatan yang tidak sesuai rencana serta belum menampilkan bukti keterlibatan pimpinan. Triwulan IV Tahun 2024 Pimpinan tidak terlibat dalam rapat monev WRK.
	c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti		a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WHBM telah ditindaklanjuti b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WHBM telah ditindaklanjuti c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WHBM telah ditindaklanjuti d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WHBM belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1. Laporan Monev TW I, TW II, TW III, dan TW IV Tahun 2024 2. Laporan Monev TW I Tahun 2025		C	0.33			Rekomendasi Triwulan I s.d IV berulang : 2 rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti Triwulan I Tahun 2024: Tidak ada rekomendasi Triwulan II Tahun 2024: Tidak ada rekomendasi Triwulan III Tahun 2024: Tidak ada rekomendasi Triwulan IV Tahun 2024: Terdapat 1 rekomendasi namun bukti TL belum dilampirkan.	
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kerja		1.50							1.34	89.00%			
	a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WHBM		ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.		Ya/Tidak	Ya	1. Bukti Penyampaian LHRPN 2. Dokumentasi Absensi Pejabat PPSNZ/ 3. Laporan Perdin Kalabab pada tanggal 8 September, 20 September, dan 1 Oktober 2024 4. LKJ Kalabab TW I, TW II, TW III, Kurang TW IV 5. Dokumen SPT Tahunan Pegawai 6. PK PPS Niam Zachman, tanggal 10 Januari, 21 Agustus, dan 22 November 2024 7. Laporan Pengakuan TW I, II, III, dan IV	https://drive.google.com/drive/folders/1718c7bba6262bdaa17733a5d1a48732exa61kagchz6d	Ya	1.00		Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WHBM. Yang dimaksud pimpinan adalah kepala unit kerja karena penilaian didasarkan pada komitmen dan keaktifan pimpinan puncak dalam pembangunan ZI. Indikator minimal yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Komitmen dan Integritas 2. Tidak terdapat pengakuan terhadap pimpinan atau terdapat pengakuan terhadap pimpinan namun tidak terbukti. b. Tidak pernah dikenai sanksi disiplin/kode etik sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir c. Tidak terdapat temuan kurang/pada unit kerja, berdasarkan hasil audit APP/eksternal; d. Aktif melaporkan pelanggaran/penyeraman gratifikasi 2. Komunikasi a. Pertemuan dengan pegawai secara berkala; b. Keterlibatan pimpinan dalam setiap area pembangunan ZI; 3. Pengakuan Disiplin/Kode Etik: Pemberian sanksi terhadap pegawai yang terbukti melanggar disiplin/kode etik (jika ada) 4. Keefektifan : Presensi tepat waktu dihitung per hari selama setahun minimal terpenuhi 90% dari hari kerja dalam setahun 5. Prestasi/ penghargaan yang diterima oleh Suster dapat menjadi pertimbangan pimpinan sebagai Role Model. 6. Keterlibatan Pimpinan menjadi nara sumber di kegiatan yang melibatkan stakeholder/ seller-suster lain. 7. Penilaian terhadap pimpinan dari bawah, rekan kerja, dan pengguna jasa/ stakeholder. Penilaian perilaku terdiri dari orientasi pelayanan, kepemimpinan, kerja sama, komitmen dan inisiatif kerja. 8. Penyampaian LHRPN tepat waktu 9. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika telah menjawab 9 dari 11 sub unsur, maka dinilai Ya, selain itu, maka dinilai Tidak; b. Jika terdapat pengakuan pimpinan dan terbukti, maka dinilai Tidak.	Sudah dilengkapi semua. Akan dicek kembali.
	b. Sudah ditetapkan agen perubahan		a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya c. Jika belum terdapat agen perubahan	A/B/C	B	1. SK Penetapan Agen Perubahan, per 23 Januari 2024, a.n Eveline 2. Rencja Agen Perubahan 2024 3. Laporan Monev Agen Perubahan 2024 4. Hasil Tindak Lanjut Agen Perubahan 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1a-0N1Gesa-NY2d4x73gqP1y3a3a0D0w2exa61kagchz6d	A	1.00		1. Penetapan agen perubahan berpedoman pada Permen PAN dan Rf No. 27 Tahun 2014 dan Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. 2. Penetapan agen perubahan harus disertai dengan uraian tugas mengacu pada rencana kerja pembangunan ZI; 3. Agen perubahan harus menyusun laporan kegiatan/uraian tugas yang telah dilaksanakan, yaitu membandingkan rencana tindak dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan; 4. Bentuk kontribusi perubahan dapat dilihat dari bentuk nyata implementasi rencana kerja yang dicapai baik secara individu/perorangan maupun Tim. 5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Dinilai A, jika terdapat penetapan agen perubahan, uraian tugas mengacu pada rencana kerja pembangunan ZI, menyusun laporan kegiatan, berkontribusi terhadap perubahan; b. Dinilai B, jika salah satu unsur di atas tidak terpenuhi 1. Pembangunan budaya kerja dan pola pikir memuat internalisasi dan penerapan nilai-nilai core value ASN berAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan dapat ditambahkan nilai-nilai organisasi (jika ada) dapat dilakukan antara lain melalui: a. kegiatan tatap muka (rapat, sosialisasi, pelatihan, bimtek, dll); b. keikutsertaan dalam pelatihan; c. pembuatan alat peraga baik cetak maupun elektronik; d. website. 2. Bukti pendukung menyerasikan dengan metode yang digunakan, dapat berupa: a. undangan, materi, notulen dan daftar hadir rapat/sosialisasi/pelatihan/bimtek; notulen dan daftar hadir apel; b. sertifikat atau laporan mengikuti pelatihan; c. foto suksakul, balho, leaflet, stiker, running text, papan pengumuman, printscreen laman website; 3. Pembangunan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi harus dilakukan berkelanjutan, tidak hanya pada saat awal pembangunan, kecuali menggunakan media yang bersifat terbuka dan dapat dilihat oleh orang banyak dengan substansi yang relevan; 4. Penilaian berkurangnya resistensi dapat dilihat dari hasil pemantauan atas implementasi perubahan terkait penerapan core value ASN yaitu BerAKHLAK dan dapat ditambahkan nilai-nilai organisasi (jika ada); 5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir, dilakukan monev dan menguraikan keterkatannya dengan kemampuan mengurangi resistensi, maka dinilai A b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir, dilakukan monev namun tidak menguraikan keterkatannya dengan kemampuan mengurangi resistensi, maka dinilai B 1. Yang dimaksud dengan anggota adalah seluruh ASN baik terinternalisasi PMS maupun tenaga kontrak; 2. Keterlibatan anggota dalam pembangunan ZI adalah keterlibatan pegawai dalam kegiatan pembangunan pengampungan (jenderal dan reform) dan komponen hasil, tidak harus secara khusus bernama pembangunan ZI; 3. Tim agar menghitung jumlah anggota yang terlibat dalam pembangunan ZI sejak pembangunan sampai dengan satu bulan sebelum penilaian 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika sebagian besar (>50%) keterlibatan anggota, maka dinilai B; b. Jika sebagian kecil (<50%) keterlibatan anggota, maka dinilai C; Contoh: 25 dari 100 (25%) pegawai telah terlibat dalam kegiatan pembangunan ZI, maka dinilai C; 5. Monitoring terhadap keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan ZI dilakukan dengan menyusun daftar rekapitulasi keterlibatan anggota dalam kegiatan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam bukti pendukung dalam setiap komponen.	Belum dilengkapi data Dukung Tahun 2025 berupa Rencana Kerja agen Perubahan Kepala Suster.	
	c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi		a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir	A/B/C	B	1. Dokumentasi Pelaksanaan Apel Pagl Jan-Des 2024 2. Video Implementasi Core Value One Team dalam beberapa kegiatan dengan pihak eksternal 3. Sosialisasi dan Internalisasi Pegawai, tanggal 21 Juni 2024 dan 4 Oktober 2024 4. Sosialisasi melalui media sosial Jan-Des 2024 di Instagram dan Twitter 5. Dokumentasi Pengukuran Resistensi Pegawai. Tingkat resistensi 19,7% tahun 2023. Tingkat resistensi 15% tahun 2024. Sehingga adanya pengurangan resistensi sebesar 4,7%. 6. Sertifikat Hasil Dilat Smart ASN 7. Publikasi Anti Gratifikasi Melalui Mesin Antrian dan Videotron 8. Dokumentasi Implementasi Core Value OneTeam	https://drive.google.com/drive/folders/1a-0N1Gesa-NY2d4x73gqP1y3a3a0D0w2exa61kagchz6d	A			1. Sudah dilakukan pengukuran resistensi melalui survey di google form, namun belum terdapat Monev atas upaya pembangunan budaya kerja. 2. Perlu dijelaskan terkait One Team		
	d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WHBM		a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WHBM dan usulan-usulan dari anggota didiskusikan dalam keputusan b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WHBM c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WHBM d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WHBM	A/B/C/D	B	1. Dokumen Matriks Keterlibatan Pegawai dengan total 98,6%. 2. Dokumen Publikasi ZI Melalui Apel Pagl Jan-Des 2024 3. Rapat Monev WBK TW I s.d TW IV 4. Penerapan Core Value OneTeam 5. Dokumen Internalisasi Pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1a-0N1Gesa-NY2d4x73gqP1y3a3a0D0w2exa61kagchz6d	B	0.67		Keterlibatan anggota sebanyak 98,6%		
2. PENATAAN TATALAKSANA		3.50							2.83	80.98%			
1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama		1.00							0.83	83.33%			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Keterangan			Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZJ	Daftar Bukti Dukungan dan Link Unit PPSNZJ	Penilaian	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZJ	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Itjen Mei 2025
		c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi		a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/ unit sendiri dan terdapat inovasi b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi	A/B/C	A	1. SS Aplikasi E-Logbook Jan-Des 2024 2. SS Aplikasi SHTI Jan-Des 2024 3. SS Aplikasi STMLK Jan-Des 2024 4. SS Aplikasi Teman SPB Jan-Des 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct	A	1.00		1. Pelayanan kepada publik yang dianggap menggunakan TI adalah mulai dari pendaftaran sampai pelayanan selesai seluruh proses pemberian pelayanan; 2. Unit kerja dengan pelayanan menggunakan TI terpusat dapat melakukan inovasi berbasis TI yang berbeda dengan aplikasi yang sudah ada disesuaikan dengan karakteristik unit kerjanya; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Setelah layanan pada PPS Nizam Zachman telah menggunakan teknologi informasi dengan aplikasi yaitu : pelayanan SPB (teman SPB), SI SHTI, STMLK (kegiatan kapal (teman SPB), tambah labut (SI Jaka), SIKCP (SICEPI), CPID (SICPIB), rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan, perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan (Sipaus), sedangkan layanan penggunaan alat transportasi menggunakan komputer untuk pencatatan persetujuan penggunaan	
		d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik		a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	A/B/C	B	1. Laporan Money TW I, II, III, dan IV Tahun 2024 2. Laporan Money TW I 2025.	https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct	A	1.00		1. Monitoring dan evaluasi (money) dilaporkan secara berkala (semesteran) terhadap pemanfaatan dan permasalahan yang ditemukan dalam operasional aplikasi meliputi: a. Pengukuran kinerja unit; b. Operasionalisasi SDM; dan c. Pemberian layanan kepada publik. Kerjanya harus termuat dalam laporan money. 2. Dalam laporan money, tidak hanya memuat rekomendasi pada periode pelaporan saja, namun juga memuat rekomendasi dan tindak lanjut atas rekomendasi periode pelaporan sebelumnya; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika money telah memuat informasi dari seluruh aplikasi dan dibuat secara semesteran, maka dinilai A; b. Jika money dibuat secara berkala, namun belum memuat informasi dari seluruh aplikasi, maka dinilai B.	1. Monitoring dan evaluasi (money) dilaporkan secara berkala (semesteran) terhadap pemanfaatan dan permasalahan yang ditemukan dalam operasional aplikasi, rekomendasi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan, serta tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya. Tahun 2024: PPS Nizam Zachman telah melakukan money terhadap pemanfaatan teknologi informasi secara berkala (triwulan I s.d 4), terhadap penggunaan teknologi informasi pada: 1. Pengukuran kinerja dengan aplikasi KinerjaJi 2. Operasionalisasi SDM dengan aplikasi E-pegawai, e-presensi, e-kinerja 3. Pemberian layanan kepada publik dengan aplikasi SLIACA, Teman SPB, e-Logbook, e-PTT, PIPP, SILOPI, SHTI, Pas Masuk Laporan money telah memuat permasalahan yang ditemukan dalam operasional aplikasi, rekomendasi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan, serta tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya.	
		iii. Keterbukaan Informasi Publik	0.50							0.50	100.00%			
		a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan		a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyediakan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik	A/B/C	A	1. Keputusan Kalahub Tentang Daftar Jenis Informasi yang Dipublikasikan, tgl 23 Februari 2024 2. ST Tim PPD; tgl 2 Januari 2024 3. SOP PPID 4. Publikasi Alur PPID	https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct	A	1.00		1. Unit kerja membentuk Tim PPD Pelaksana dengan uraian tugas dan wewenang mengacu pada PermenKP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP tanggal 29 Desember 2023 Bagian Keranan (Pasal 13.14). PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 ini mencakup PermenKP Nomor 4/Permen/KP/2019; 2. Inventarisasi jenis informasi publik tiap unit kerja yang mengacu pada Daftar Informasi Publik KKP 3. Informasi yang tertuang dalam poin No. 2 tersebut diuraikan oleh PPD UPT Pelaksana sesuai dengan jenis informasinya dengan mengacu pada PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP tanggal 29 Desember 2023 Bab II Informasi Publik; 4. Penyebarluasan informasi termasuk didalamnya memuat penyebarluasan informasi sesuai tugas fungsi kehumasan sesuai Permen KP 43 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan 5. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (Tahunan) 6. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika sudah terdapat PPD Pelaksana yang menyebarkan sebagian informasi (>30%) yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap, maka dinilai B; b. Jika belum ada PPD Pelaksana dan belum melakukan penyebaran informasi publik, maka dinilai C; c. Jika tidak menyusun laporan Layanan Informasi Publik (Tahunan) dinilai satu tingkat lebih rendah dari seharusnya;	Tahun 2024: Tim PPD telah ditetapkan melalui Keputusan Perikanan Tangkap Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup DJPTI tanggal 31 Oktober 2024 Kepala PPS Nizam Zachman selaku tim PPD Pelaksana telah menetapkan Tim Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PPS Nizam Zachman tahun 2024 melalui Surat Tugas nomor : B.24/PPSNZJ/KP.440/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Tahun 2025 PPS Nizam Zachman baru mengukulkan tim PPD ke Eselon I DJPTI, Biro Humas KKP melalui Surat Nomor : B.1222/PPSNZJ/KP.440/IV/2025 tanggal 14 April 2025 (menunggu konfirmasi penetapan dari Eselon II) Tim Petugas Pelayanan Informasi Publik telah melakukan inventarisasi informasi publik mengacu pada Daftar Informasi Publik yang ditetapkan pada tahun 2024, dilengkapi bukti penyebarluasan informasi publik	
		b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan	A/B/C	A	1. Laporan Money PPID: TW I, II, III, dan IV 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct	A	1.00		1. Laporan money pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik berupa Laporan Layanan Informasi Publik yang terbit per tahun, minimal memuat informasi tentang: a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik; b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik; c. rincian pelayanan Informasi Publik; d. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kementerian jika ada; e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik. 2. Laporan Layanan Informasi Publik memuat rekomendasi, kecuali jika sudah dimonev namun tidak ditemui kelemahan yang harus ditindaklanjuti; 3. Rekomendasi hasil money harus ditindaklanjuti; 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika laporan money disusun, memuat seluruh informasi pada point 1, sudah ditindaklanjuti, maka dinilai A b. Dinilai B, jika: 1) Jika submateri laporan money tidak memuat seluruhnya pada poin 1; atau 2) Jika laporan money tidak dilengkapi bukti pelaksanaan atau uraian/penjelasan pelaksanaan kegiatan yang ditindaklanjuti c. Jika laporan money tidak dibuat, maka dinilai C;	PPS Nizam Zachman telah melakukan money pelaksanaan kebijakan informasi publik dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 2024 (TW I s.d 4), tahun 2025 (TW I) Submateri laporan money KIP memuat: 1. Pelaksanaan pemberian informasi kepada publik dalam 4 kategori informasi meliputi informasi yang diberikan per kategori informasi, waktu pemberian informasi dan penanggung jawab, media penyampaian informasi. 2. Pelaksanaan tugas dan wewenang PPD UPT 3. Rekomendasi serta tindak lanjut atas laporan periode sebelumnya	
		3. PENATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00							4.49	89.80%			
		i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan	0.25							0.25	100.00%			
		a. Kebijakan tentang perencanaan kebutuhan pegawai telah ditetapkan		Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.	Ya/Tidak	Ya	1. Dokumen Pemangku Jabatan ABK Tahun 2024 2. MPH Tahun 2024 3. ABK Dukman, OPK, dan TKPU Tahun 2024 4. Peta Jabatan Permen KP Nomor 51 Tahun 2024 5. Usulan Perubahan Jabatan Penata Perikanan 6. SK Penata Perikanan Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct https://drive.google.com/drive/folders/1m4drtw174bldetv1d4w1lunh8x5xq0bct	Ya	1.00		1. Penyusunan kebutuhan pegawai disusun mengacu pada: a. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 17 Tahun 2020; b. PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK; dan c. Perla BKN No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN. 2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN setiap tahun dengan tahapan: a. Penyusunan Analisis Jabatan; b. Penyusunan Analisis Beban Kerja; c. Penyusunan Peta Jabatan; d. Pengukuran Kebutuhan Aparatur Sipil Negara; e. Penyampaian Usulan Kebutuhan; f. Usulan kebutuhan pegawai menggunakan usulan tahun terakhir, sedangkan ABK menggunakan dokumen periode T-1; g. Peta Jabatan yang digunakan adalah yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri KP. 5. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	1. Usulan Kebutuhan Pegawai Berurutan pada 10 Januari 2024 (orang PST dan 2 orang Asisten PST Dari Peta Jabatan PST kurang 17, sedangkan AAPST kurang 22 2. Belum terdapat usulan kebutuhan untuk Tahun 2025 namun terdapat rekomendasi 2 orang CPNS yang diterima Tahun 2025 yaitu Penata Kelola Kelautan dan Perikanan berkecukupan Peta Jabatan pada 6 orang	

Keterangan		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZJ	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit PPSNZJ	Penilaian	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZJ	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Ijtjen Mei 2025
	b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan		a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	A/B/C/D	B	1. Lembar Asistensi AHK Kebutuhan Pegawai Nium 2024 2. MPH PPSNZJ 2024 3. Kepmen KP No 51 Tahun 2024 ttg Peta Jabatan KKP 4. SK MenKP P3K a.n Saoki, Tausih, dan Andri 5. SPMT 2024 a.n Saoki, Tausih, dan Andri	https://drive.google.com/drive/u/1/1ddkcz/1m4p3vW4u5G6a7z6c6f14q6p6z6f	A	1.00			1. Penempatan pegawai hasil rekrutmen yang dibuktikan dengan SK CPNS/PPPK dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang sesuai dengan usulan kebutuhan tahun sebelumnya; 2. Jumlah dan jabatan pegawai yang diterima dan ditempatkan sesuai dengan usulan kebutuhan dan selaras dengan AHK dan peta jabatan; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Sebagian besar, jika > 50% sesuai, maka dinilai B; b. Sebagian kecil, jika < 50% sesuai, maka dinilai C; c. Jika terjadi kondisi rekrutmen yang sistnya dropping dan jabatan pegawainya belum terdapat dalam AHK dan Peta Jabatan Unit Kerja, unit kerja menyusun analisis jabatan, AHK, dan Peta Jabatan sebagai dasar penyusunan dan usulan kepada Eselon I terkait penempatan pegawai rekrutmen tersebut. Jika tidak dilakukan, maka dinilai D; 4. Penjelasan kesesuaian dilengkapi dengan persentase. Contoh: 3 dari 4 (75%) penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; 5. Dalam hal rekrutmen dilakukan sebelum periode pembangunan ZI, maka dokumen yang digunakan berdasarkan rekrutmen terakhir.	Penempatan pegawai hasil rekrutmen Tahun 2024 telah sesuai dengan Usulan Kebutuhan Pegawai disesuaikan dengan Peta tersebut yaitu 1 Urang P3T dan 2 orang AP3T
	c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja		Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Ya/Tidak	Ya	1. Laporan Monev Semester I 2024 2. Laporan Monev Semester II 2024	https://drive.google.com/drive/u/1/1ddkcz/1m4p3vW4u5G6a7z6c6f14q6p6z6f	Ya	1.00			1. Laporan monev terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen minimal memuat informasi tentang: a. Data pegawai (CPNS/PPPK) hasil rekrutmen; b. Pengaruh hasil rekrutmen terhadap perbaikan kinerja unit kerja; c. Perbaikan kinerja unit kerja berdasar kuantitatif, sehingga dapat terukur dengan jelas; d. Pertimbangan rekomendasi dan realisasi atas tindak lanjut hasil monev sebelumnya; e. Monev terhadap pegawai hasil rekrutmen dilakukan selama 2 tahun sejak penerimaan; f. Periode pelaporan monev minimal satu kali dalam setahun; g. Jika kondisi tidak terdapat penerimaan CPNS/PPPK selama 2 tahun terakhir, tetap dilakukan monev dengan hasil yang menjelaskan bahwa tidak terdapat penerimaan CPNS/PPPK; 5. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Monev dilakukan hanya selama 1 tahun sejak penerimaan. Agar dilakukan selama 2 tahun sejak penerimaan.
	ii. Pola Mutasi Internal	0.50							0.38	75.00%			
	a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan		Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.	Ya/Tidak	Ya	1. Pola Mutasi Jabatan Karier Nomor: 10/PER-DJPT/2019 2. SK Mutasi Pegawai a.n Amirullah, Andang, Salim, Irvan, Dewiharto, Robbani, Taufan, dan Dendy Umbara 3. SPMT Pegawai Melaksanakan Mutasi a.n Amirullah, Andang, Salim, Irvan, Dewiharto, Robbani, Taufan, dan Dendy Umbara 4. Usulan Rekomendasi JPT Perintah Perintah ke Pusat tanggal 27 Nov 2024	https://drive.google.com/drive/u/1/1ddkcz/1m4p3vW4u5G6a7z6c6f14q6p6z6f	Ya	1.00			1. Pengembangan Karir pegawai antar jabatan (sesuai PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 189) dapat berupa: a. Mutasi horizontal; b. Mutasi vertikal; dan c. Mutasi diagonal; 2. Jika kebijakan pola karir di lingkungan KKP tidak tersedia, maka dapat menggunakan kebijakan unit kerja berupa usulan kepada unit Eselon I atau Biro SDMAG; 3. Analisis dan bandingan antara jabatan lama dengan jabatan baru pada SK Mutasi, apakah merupakan mutasi antar jabatan dan wujud pengembangan karir pegawai yang dimutasi; 4. Penetapan mutasi dilakukan sesuai Kepmen KP No. 157 Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Pendelegasian wewenang dalam penentuan jabatan; Naskah Dinas di Bidang Pengembangan; 5. Data mutasi yang digunakan adalah data tahun terakhir dilaksanakannya mutasi; 6. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan keterangan tambahan: a. Selama terdapat mutasi antar jabatan sebagai wujud pengembangan karir baik horizontal/vertikal/diagonal pada unit kerja yang ditetapkan oleh pejabat berwenang, dinilai Ya; b. Jika terdapat nilai pegawai secara internal dalam rangka pengembangan karir pegawai unit kerja sepanjang terdapat usulan ke Eselon I serta Biro SDM Aparatur dan Organisasi, maka dinilai Ya.	1. Tahun 2024 Kekar ada 4. Masuk ada 7. 2. Tahun 2025 masuk 2 keluar 3.
	b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan		a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi	A/B/C/D/E	B	1. SPMT Pegawai Melaksanakan Mutasi a.n Amirullah, Andang, Salim, Irvan, Dewiharto, Robbani, Taufan, dan Dendy Umbara 2. MPH PPSNZJ 2024 3. Kebijakan Pola Karier lingkup KKP; 4. Perencanaan Mutasi lingkup KKP; 5. Peta Jabatan; 6. Surat Pertimbangan Mutasi dari Unit Kerja;	https://drive.google.com/drive/u/1/1ddkcz/1m4p3vW4u5G6a7z6c6f14q6p6z6f	D	0.25			Monev yang dilengkapi dengan surat pertimbangan mutasi dari unit kerja hanya a.n bu renny magdalena	
	c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja		Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Ya/Tidak	Ya	1. Laporan Monev Mutasi Pegawai Semester I 2024 2. Laporan Monev Mutasi Pegawai Semester II 2024	https://drive.google.com/drive/u/1/1ddkcz/1m4p3vW4u5G6a7z6c6f14q6p6z6f	Ya	1.00			Monev dilakukan hanya selama 6 bulan sejak mutasi. Agar dilakukan selama 2 tahun sejak mutasi.	
	iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1.25							1.11	89.00%			
	a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi		Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi.	Ya/Tidak	Ya	1. Formulir Analisis Tugas 2024 2. Formulir Analisis Kebutuhan (Gap) Kompetensi 2024 3. Formulir Perencanaan Kebutuhan Dilat 2024 4. Kepmen KP Nomor 64 Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/u/1/1ddkcz/1m4p3vW4u5G6a7z6c6f14q6p6z6f	Ya	1.00			1. Training need analysis/analisis kebutuhan dilat disusun untuk seluruh pegawai berstatus PNS dan CPNS dilagipi dengan Analisis Tugas (Standar Kompetensi Jabatan), Analisis Kebutuhan (GAP) Kompetensi, dan Peraturan Kebutuhan Dilat (PERKA BKN Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen PNS, Penyusunan standar kompetensi jabatan ASN dapat mengacu Permen PAN dan RH Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN < 2. Training dapat berupa dilat, bimbingan teknis, workshop, magang, in house training, dll; 3. Analisis kebutuhan dilat diperbarui jika terdapat perubahan berupa penambahan pegawai dan perubahan jabatan; 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika Training Need Analysis/analisis dilagipi dengan Analisis Tugas (Standar Kompetensi Jabatan), Analisis Kebutuhan (Gap) Kompetensi, dan Peraturan Kebutuhan Dilat, maka dinilai Ya; b. Jika salah satu subtitansi pada point 4a tidak ada, maka dinilai Tidak.	Assesment dari DJPT, Tahun 2025 belum ada TNA, Tahun 2024 PPS 90 dan P3K 33 orang, Tahun 2025 82 orang
	b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengolahan kinerja pegawai		a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengolahan kinerja pegawai b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengolahan kinerja pegawai c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengolahan kinerja pegawai d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengolahan kinerja pegawai	A/B/C/D	D	1. Draft Formulir Penyusunan HCDP dan IDP Teknis 2. SDP Pegawai (83 orang) 3. Formulir Perencanaan Kebutuhan Dilat	https://drive.google.com/drive/u/1/1ddkcz/1m4p3vW4u5G6a7z6c6f14q6p6z6f	A	1.00			1. Pengujian kesesuaian rencana pengembangan kompetensi dengan hasil pengolahan kinerja pegawai dengan melibatkan/ikutserta minimal 3 orang pengembangan kompetensi pegawai telah memperhatikan kinerja pegawai (SKP), dan dukungan dokumen pendukungnya; 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika sebagian besar jika > 50%, rencana mempertimbangkan hasil pengolahan kinerja pegawai, dinilai B; b. Jika sebagian kecil jika < 50% rencana mempertimbangkan hasil pengolahan kinerja pegawai, dinilai C; 3. Prioritas pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan pada gap kompetensi yang besar dan hasil pengolahan kinerja rendah.	Telah terdapat rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan memperhatikan SKP

Keterangan			Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZJ	Daftar Bukti Dukungan dan Link Unit PPSNZJ	Penilaian	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZJ	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Itjen Mei 2025
	c.	Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan		a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75% d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%	A/B/C/D	A	1. Kepmen KP Nomor 64 Tahun 2022 2. Formulir Analisis Kesenjangan (Gap) Kompetensi Tahun 2024 dengan nilai GAP Kompetensi sebesar 11%	https://drive.google.com/drive/folders/1m4dnpw2w17zddpzy1d4_6664646v43h3h3d3k3j0z7x5t0B112ac4d13a63942d45	A	0,67		1. Kesenjangan kompetensi pegawai (PNS) yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajernya PNS (Lampiran 5 tentang Formulir Analisis Kesenjangan (Gap) Kompetensi); 2. Hitung kesenjangan kompetensi pegawai (PNS) dengan standar kompetensi, tawarkan dalam presentase. 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Formulir analisa kesenjangan Tahun 2025 belum dibuat. Tahun 2024 11%	
	d.	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya		a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	A/B/C/D	A	1. Pengumuman Diklat 2024 melalui media cetak dan Whatsapp Group 2. Daftar rekapitulasi diklat/pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawai tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1m4dnpw2w17zddpzy1d4_6664646v43h3h3d3k3j0z7x5t0B112ac4d13a63942d45	A	1,00		1. Pemberian kesempatan diklat dan pengembangan kompetensi lainnya berdasarkan: a. rencana pengembangan kompetensi pegawai; dan b. pemberitahuan penyelenggaraan (webinar, workshop, in house training, bimtek, diklat, pengembangan kompetensi lainnya). 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika sebagian besar >50% pegawai, maka dinilai B. b. Jika sebagian kecil <50% pegawai, maka dinilai C.		
	e.	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)		a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai	A/B/C/D	B	1. Usulan lain dan Tugas Belajar 2024, tgl 10 Oktober 2024 2. Undangan Internalisasi Pegawai, tgl 20 November 2024 3. Formulir Analisis Kesenjangan (Gap) Kompetensi 2024 4. Daftar rekapitulasi diklat/ pengembangan kompetensi 2024 5. SPT Diklat, Dokumentasi, dan Laporan kegiatan Internalisasi Pegawai tanggal 21-22 Juni 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1m4dnpw2w17zddpzy1d4_6664646v43h3h3d3k3j0z7x5t0B112ac4d13a63942d45	B	0,67		1. Upaya pengembangan kompetensi merupakan realisasi dari rencana pengembangan kompetensi pegawai yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil Gap Kompetensi dan/atau hasil usulan pengembangan kompetensi lainnya; 2. Menyampaikan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya dibandingkan jumlah PNS; 3. Menyusun daftar rekapitulasi diklat/ pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh masing-masing pegawai; dengan tambahan keterangan: a. Jika sebagian besar PNS (>50%) mendapat upaya pengembangan kompetensi, maka dinilai B. b. Jika sebagian besar PNS (<50%) mendapat upaya pengembangan kompetensi, maka dinilai C.	Belum terdapat perbandingan antara realisasi dari rencana pengembangan kompetensi pegawai yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil Gap Kompetensi dan/atau hasil usulan pengembangan kompetensi lainnya; Semua pegawai sudah pernah mengikuti diklat pengembangan kompetensi di Tahun 2024.	
	f.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja		a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan	A/B/C	A	1. Laporan Moner Tahun 2024 (rencana aksi diubah menjadi tahunan sehingga laporan hanya 1)	https://drive.google.com/drive/folders/1m4dnpw2w17zddpzy1d4_6664646v43h3h3d3k3j0z7x5t0B112ac4d13a63942d45	A	1,00		1. Moner terhadap setiap pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi dipantau selama 1 tahun sejak berakhirnya mengikuti pengembangan kompetensi dan dilaporkan minimal semester; 2. Moner terhadap hasil pengembangan kompetensi memuat informasi pemenuhan kesenjangan kompetensi dan perbaikan kinerja pegawai yang bersifat kuantitatif. contoh: pelaksanaan diklat MR dapat memberikan perbaikan dalam penyusunan perencanaan, diklat pengendalian kualitas dapat memberikan dampak terhadap pemahaman dan pelaporan adanya gratifikasi, dll; 3. Hasil Moner dapat berbentuk tabel, narasi atau memorandum termasuk realisasi tindak lanjut hasil moner sebelumnya. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan menginformasikan adanya perbaikan kinerja, maka dinilai A (contoh: nilai SP/SAKIP/Validasi Kinerja UPP/ SKK/capaian IKU/nilai SKP meningkat, temuan hasil pemeriksaan APD dan Eksternal berkurang); b. Jika monitoring dan evaluasi tidak secara berkala, namun menginformasikan adanya perbaikan kinerja, maka dinilai B. c. Jika monitoring dan evaluasi tidak dilakukan, maka dinilai C.	1. Tambahkan perbandingan antara realisasi dan rencana 2. Tambahkan perubahan yang berkaitan kuantitatif	
iv. Penetapan Kinerja Individu			2,00							2,00	100,00%			
	a.	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi		a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	1. SKP Pegawai atas 83 pegawai 2. PK PPSNZJ 2024 3. MPR PPSNZJ 2024 4. Matriks Cascading	https://drive.google.com/drive/folders/1m4dnpw2w17zddpzy1d4_6664646v43h3h3d3k3j0z7x5t0B112ac4d13a63942d45	A	1,00		1. Penetapan kinerja individu menggunakan SKP Pimpinan unit kerja s.d. staff; 2. Membandingkan kesesuaian IKU unit kerja dengan IKU Eselon I; 3. Membandingkan SKP dengan IKU unit kerja. 4. Indikator Kinerja Individu (IKI) harus terkait dengan kinerja organisasi; 5. Pengujian dilakukan dari SKP Pimpinan unit kerja sampai dengan jabatan terendah pada unit kerja, dilakukan secara sampling; 6. Hitung kesesuaian penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) dengan penetapan kinerja organisasi, dituangkan dalam presentasi; 7. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika > 50% penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) terkait dengan IKU organisasi, maka dinilai B; b. Jika <50% penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) terkait dengan IKU organisasi, maka dinilai C.	Pendapatan Kinerja Individu diturunkan dari IKU unit kerja dibuktikan dengan MPR.	
	b.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya		a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	A/B/C/D	B	1. SKP Pegawai atas 83 pegawai 2. MPR PPSNZJ 2024 3. Diagram Alir Cascading IKU 2024 4. Kerangka Logic Model PPSNZJ	https://drive.google.com/drive/folders/1m4dnpw2w17zddpzy1d4_6664646v43h3h3d3k3j0z7x5t0B112ac4d13a63942d45	A	1,00		1. Menguji kesesuaian melalui analisis cascading dalam aplikasi SKP unit kerja, apakah IKU organisasi telah dijabarkan ke seluruh pegawai dan apakah antara SKP pimpinan s.d. staf telah selaras; 2. Pengujian dilakukan dari SKP Pimpinan unit kerja sampai dengan jabatan terendah pada unit kerja, dilakukan secara sampling secara satu garis cascading; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika > 50 ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya, maka dinilai B; b. Jika <50% ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya, maka dinilai C.	Telah dilengkapi keterkaitan dengan logic model dalam bentuk dokumen	
	c.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	B	1. Laporan Moner SKP Januari-Desember 2024 2. Laporan SKP-Jan-Feb 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1m4dnpw2w17zddpzy1d4_6664646v43h3h3d3k3j0z7x5t0B112ac4d13a63942d45	A	1,00		Telah jelas, penilaian mengacu kriteria jawaban. Penilaian SKP menggunakan aplikasi kinerja.tkn.go.id	Penilaian dilakukan Bulanan	
	d.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward		Ya, jika hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan)	Ya/Tidak	Ya	1. Keputusan Kalahab Pemberian Reward Pegawai 2024 a.n I Dimi, Peter Rajab, dan Citra Handayani 2. Surat Tugas Tim Penilai tgl 2 Januari 2025 3. SKP Pegawai a.n Adli Mulya, Susdi, Amrullah, Andri Irawan, Ari Wibisono, Endra Aji, Joko Tri, Kumarno, Nova, Septi Sari, Taufan Dharma, Taulid, Wajid, dan Herman 4. Hasil Lembar Kerja Penilaian Individu 5. Dokumentasi Pemberian Reward Pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1m4dnpw2w17zddpzy1d4_6664646v43h3h3d3k3j0z7x5t0B112ac4d13a63942d45	Ya	1,00		1. Terdapat Tim Penilai atau mekanisme/kriteria pemberian reward pegawai, antara lain dapat berupa prioritas dalam pengikutsertaan diklat atau penghargaan dalam bentuk lainnya; 2. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	SKP dijadikan salah satu dasar untuk Reward Pegawai dituangkan dalam SK reward Pegawai.	
v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku			0,75							0,50	67,00%			

Keterangan		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZJ	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit PPSNZJ	Penilaian	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZJ	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Ijtjen Mei 2025
	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan		a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi	A/B/C/D	B	1. SK Kode Etik Pegawai tgl 9 Januari 2024 2. IA Penerapan Kode Etik Pegawai 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1d0d9w8WwZas5a1kqg4p4d4	B	0,67			1. Implementasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku dilaporkan dalam laporan move minimal memuat informasi tentang: a. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan move aturan disiplin/kode etik/dan kode perilaku; b. Pelaksanaan kewajiban dan larangan sesuai butir-butir kewajiban dan larangan pada: 1) Permen KP Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi ASN di lingkungan KKP; dan 2) Kode Etik Profesi yang berlaku pada unit kerja; c. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang terjadi; dan d. Sanksi hukuman disiplin/sanksi moral yang telah dijatuhkan; 2. Laporan move terhadap penerapan kode etik minimal disusun setiap tahun berisi narasi dengan matriks perbandingan rekomendasi dan implementasi hasil move serta bukti implementasi menjadi lampiran; 3. Inovasi dapat berupa metode/cara penilaian/pemantauan kode etik atau penambahan butir kode etik yang baru yang dapat mengatur lebih tajam etika/perilaku pegawai; 6. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Laporan Move belum sesuai pedoman jktas agar memuat informasi yang akurat jktas serta hasil implementasinya Pengawasan yang dilakukan serta tidak perlu perbaikan agar ditambah.
	vi. Sistem Informasi Kepegawaian	0.25							0.25	100.00%			
	a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala		a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan	A/B/C	A	1. Aktivitas Operator Simpeg-Jan-Des 2024 2. DRH Pegawai a.n Anrian, Duddy, Lia Anggia, Nur Alimin 3. Daftar Nominasi Pegawai 2024 4. SK Mutasi Pegawai 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1HUCV7N9wV3Uu1aw5a1kqg4p4d4	A	1.00			1. Melakukan update data kepegawaian pada aplikasi e-Pegawai dan memutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai (<i>real time</i>). 2. Data update yang perlu dicek pada tahun berjalan yaitu: a. Daftar pegawai pensiun; b. Daftar pegawai mutasi; c. Daftar pegawai yang mengalami perpindahan jabatan/pemakaian pangkat/pegawai baru; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika pemutakhiran data informasi kepegawaian telah dilakukan secara <i>real time</i> dan seluruhnya valid, maka dinilai A; b. Jika pemutakhiran data informasi kepegawaian telah dilakukan secara berkala atau <i>real time</i> , namun terdapat data/informasi yang tidak valid, maka dinilai B; c. Jika tidak dilakukan pemutakhiran data informasi kepegawaian, maka dinilai C.	
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00							4.84	96.88%			
	i. Keterlibatan Pimpinan	2.50							2.50	100.00%			
	a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya memandatangan)	A/B/C	B	1. Dokumentasi Rapat Internal Penyusunan Perencanaan Indikatif 8 Juli 2024 2. Dokumentasi Rapat Internal Penyusunan Perencanaan Definitif 30 Sep 2024 3. Koreksi Pimpinan 4. Kehadiran Pimpinan Rapat Pagi Indikatif 15 Juli 2024 5. Kehadiran Pimpinan Rapat Pagi Definitif 1 Oktober 2024 6. Koreksi Pimpinan 2024 7. Koreksi Revisi 2025 8. Koreksi PK 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1HUCV7N9wV3Uu1aw5a1kqg4p4d4	A	1.00			1. Yang dimaksud dengan pimpinan adalah Kepala Unit Organisasi Eselon II dan UPT 2. Tahapan penyusunan perencanaan kinerja terdiri dari : a. Usulan/masukan atas Konsep Renstra/Renja Unit Kerja Atasannya, b. Penyusunan Perjanjian Kinerja c. Penyusunan Manual Indikator Kinerja d. Penyusunan Rencana Aksi e. Usulan/Masukan atas SK IKU Unit Kerja Atasannya 3. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan kinerja dapat berupa: a. Memo usulan/Masukan atas Konsep Renstra/Renja Unit Kerja Atasannya atau keikutsertaan unit kerja dalam proses penyusunan Renstra/Renja Unit Kerja Atasannya dibuktikan dengan daftar kehadiran pimpinan unit kerja eselon II/UPT dan notulen kegiatan. Dapat juga berupa rapat internal yang membahas masukan Renstra b. Keikutsertaan Pimpinan di unit kerja dalam kegiatan penyusunan dan/atau Revisi/Validasi Perjanjian Kinerja, Manual Indikator Kinerja, Rencana Aksi c. Memo usulan/Masukan atas Usulan/Masukan atas SK IKU unit kerja atasannya atau keikutsertaan unit kerja dalam proses penyusunan SK IKU Unit Kerja Atasannya dibuktikan dengan daftar kehadiran pimpinan unit kerja eselon II/UPT dan notulen kegiatan. Dapat juga berupa rapat internal yang membahas masukan SK IKU unit kerja atasannya 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban: a. Jika pimpinan terlibat dalam penyusunan 3 dokumen perencanaan pada poin 2b,2c,2d, dinilai A b. Jika pimpinan terlibat dalam penyusunan salah satu dokumen perencanaan pada poin 2b,2c,2d, dinilai B	Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan perencanaan : Tahun 2024: Pimpinan telah sepenuhnya terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan kinerja, terdapat data dukung berupa: a. Mengikuti Rapat Internal Penyusunan Perencanaan Indikatif 8 Juli 2024 b. Mengikuti Rapat Internal Penyusunan Perencanaan Definitif 30 Sep 2024 c. Koreksi Pimpinan terhadap RRAKI Pagi Definitif Tahun 2025 d. Mengikuti Penyusunan Dokumen RKA-K/L Pagi Indikatif Ditjen Perikanan Tangkap TA 2025 pada tanggal 15-19Juli 2024 e. Mengikuti Penyusunan Dokumen RKA-K/L Pagi Alokasi Ditjen Perikanan Tangkap TA 2025 pada tanggal 1-5 Oktober 2024 f. Pimpinan telah terlibat dalam Pembahasan Renstra dan Renja 2024, Pembahasan Penyusunan Target PK Tahun 2024, Pembahasan Penyusunan Target PK Tahun 2025, Pembahasan Penyusunan Capaian Kinerja IKU Trivulanan 2024 g. Pembahasan Penyusunan Manual IKU Tahun 2024 h. Pembahasan Revisi DIPA dan Update Halaman III DIPA 2024 i. Pembahasan Penyusunan Target PK Tahun 2025, Pembahasan Penyusunan Manual IKU Tahun 2025 j. Keikutsertaan Pimpinan dalam kegiatan Revisi/Validasi Perjanjian Kinerja k. Memo usulan/Masukan SK IKU DIPT atau keikutsertaan unit kerja dalam proses penyusunan SK IKU DIPT dibuktikan dengan daftar kehadiran pimpinan dan notulen kegiatan l. Rapat persiapan dialog kinerja - penyusunan MPH dan SKP 2024 pada 17 April 2024 m. Pimpinan mengikuti Rapat Koordinasi Kegiatan Prioritas Lingkup DIPT Tahun 2024 pada 16-19 Januari 2024 Tahun 2025: Pimpinan telah terlibat dalam Pembahasan Renja 2025, Pembahasan Penyusunan Target PK dan penetapan PK Tahun 2025, Pembahasan Rencana Aksi Tahun 2025, Pembahasan Penetapan IKU Tahun 2025 dan Penyusunan Manual IKU Tahun 2025
	b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja b. Jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perjanjian kinerja c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja	A/B/C	B	1. Dokumen Rapat Internal: 8 Januari, 14 Agustus, dan 18 November 2024 2. Koreksi Pimpinan: Agustus dan November 2024 3. Kehadiran Pimpinan Pada Rapat Penetapan IKU: 21 Februari 2024 4. Kehadiran Pimpinan Pada Capaian Kinerja: 18 November 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1HUCV7N9wV3Uu1aw5a1kqg4p4d4	A	1.00			1. Yang dimaksud dengan pimpinan adalah Kepala Unit Organisasi Eselon II dan UPT ; 2. Tahapan penyusunan penetapan kinerja terdiri dari : a. Dialog Kinerja Organisasi antara Kepala Unit Organisasi Eselon I dan Kepala Unit Organisasi Eselon II dan UPT; b. Revisi Perjanjian Kinerja c. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja 3. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat tahapan penyusunan perjanjian kinerja dapat berupa pemberian arahan, Notulen Kegiatan, Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja yang disahkan pimpinan dan Perjanjian Kinerja yang disahkan pimpinan unit kerja. 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban. a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja pada poin 2 , dinilai A b. Jika pimpinan terlibat dalam salah satu tahapan penyusunan perjanjian kinerja pada poin 2 , dinilai B	Pimpinan terlibat dalam pembahasan penyusunan penetapan kinerja didukung dengan dokumen: 1. Dialog kinerja 2. Koreksi draft PK Tahun 2024 3. Penandatanganan PK Tahun 2024 dan 2025 4. Rapat Internal Penyusunan PK Tahun 2024
	c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan mendindaklanjuti hasil pemantauan b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja	A/B/C/D	B	1. Screenshoot aplikasi KinerjaTali TW I, II, III, IV 2. Notulen & Undangan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja TW I, II, III, IV 3. Dokumentasi Penyiampaian Kinerja pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober 4. Dokumen LKJ TW I, TW II, TW III, dan TW IV	https://drive.google.com/drive/folders/1HUCV7N9wV3Uu1aw5a1kqg4p4d4	A	1.00			1. Pimpinan di unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala dilakukan melalui: a. Alun pimpinan untuk memantau capaian kinerja organisasi dalam aplikasi KinerjaTali. b. Melakukan rapat internal/masukan pimpinan/apel pagi di unit kerja terhadap evaluasi kinerja secara triwulanan organisasi dan/atau pemantauan kinerja organisasi dan dipimpin oleh pimpinan serta diampirkan notulen apel pagi yang memuat pencapaian kinerja. 2. Hasil pemantauan mendindaklanjuti disertai dokumen pendukung. 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Pimpinan di unit kerja telah memantau pencapaian kinerja secara berkala dilakukan melalui: a. Alun pimpinan untuk memantau capaian kinerja organisasi dalam aplikasi KinerjaTali. b. Melakukan rapat internal evaluasi kinerja secara triwulanan. c. Apel pagi yang dilaksanakan berkala didukung dengan bukti notulen apel pagi yang menjelaskan substansi antara lain terkait pencapaian kinerja pada tahun 2024. 4. Hasil pemantauan yang didindaklanjuti disertai dokumen pendukung
	ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	2.50							2.34	93.75%			
	a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada					1. Renstra PPSNZJ 2020-2024 2. Renja 2024 3. PK 2024 per 10 Januari 2024 4. Printscreen Rencana Kerja 5. Dokumen 2025 (clear)	https://drive.google.com/drive/folders/1HUCV7N9wV3Uu1aw5a1kqg4p4d4	Ya	1.00			1. Dokumen perencanaan kinerja terdiri atas : a. Renstra/Renja Unit Kerja Atasannya yang telah disahkan, b. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan, c. Manual Indikator Kinerja yang telah disahkan dalam bentuk Kata Pengantar d. Rencana Aksi yang telah disahkan, e. SK IKU Unit Kerja Atasannya yang telah disahkan, 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan Jika salah satu dokumen tidak terpenuhi maka dinilai Tidak	Tahun 2024: Dokumen perencanaan kinerja terdiri atas : a. Renstra PPS Nizan Zachman tahun 2020 - 2024 b. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 c. Manual Indikator Kinerja Tahun 2024 d. Rencana Aksi Tahun 2024 e. Rencana Kinerja Tahun 2024 f. SK IKU Unit Kerja Atasannya yang telah disahkan berupa Memorandum Nomor: 25/PPSNZJ/RC.610/1/2024 tgl 10 Januari 2024 Tahun 2025: Dokumen perencanaan kinerja terdiri atas : a. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 b. Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 c. Rencana Aksi Tahun 2025 d. Rencana Kinerja Tahun 2025 e. Rencana Kinerja Tahun 2025 f. SK IKU Unit Kerja Atasannya yang telah disahkan berupa Memorandum Nomor: 32/PPSNZJ/RC.610/1/2025 tgl 15 Januari 2025.
	ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap			Ya/Tidak	Ya			Ya					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Keterangan		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZJ	Daftar Bukti Dukungan dan Link Unit PPSNZJ	Penilai an	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZJ	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Itjen Mei 2025
	a.		Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Jika belum dilakukan public campaign	A/B/C	A	1. Jadwal Public Campaign UPO Semester I, tanggal 2 Januari 2024 2. Jadwal Public Campaign UPO Semester II, tanggal 2 Juli 2024 3. Dokumentasi Hasil Pelaksanaan dari Public Campaign	https://drive.google.com/drive/folders/1Jd8e7z13a2z6b2c3d8a4c88b8fKSS8L4V2F72xw06?usp=sharing	A	1.00		1. <i>Public campaign</i> pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkala/minimal tiap semester; 2. Untuk menentukan berkala/tidak, dapat dilihat dari ada tidaknya dokumen rencana (jadwal, materi) pelaksanaan <i>public campaign</i> kepada pegawai dan <i>stakeholders</i> dalam setahun; 3. Media <i>public campaign</i> dapat berupa: a. Pertemuan tatap muka; b. Media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Website); c. Media elektronik (<i>running text</i> , <i>videotron</i> , dll); d. Pupus pengumuman. 4. Substansi <i>public campaign</i> dapat berupa: a. Informasi tentang gratifikasi dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) unit kerja; b. tata cara pelaporan gratifikasi; c. imbauan untuk menolak/menghindari gratifikasi; d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) unit kerja. 5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Unit pelaksanaan <i>public campaign</i> dilakukan secara berkala yang ditunjukkan dengan indikator waktu dan sesuai perencanaan, maka dinilai A; b. Bukti pelaksanaan <i>public campaign</i> tidak dilakukan secara berkala, maka dinilai B; c. Tidak dilakukan <i>public campaign</i> , maka dinilai C.	Tahun 2025 belum dibuat rencana kerja public campaign Tahun 2025 yang sudah ditandatangani. Tahun 2024 ditandatangani bukti dalam media elektronik.
	b.		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi	A/B/C/D	B	1. Implementasi Public Campaign Semester I 2024 2. Implementasi Public Campaign Semester II 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1Jd8e7z13a2z6b2c3d8a4c88b8fKSS8L4V2F72xw06?usp=sharing	B	0.67		1. Implementasi pengendalian gratifikasi di unit kerja dilakukan sesuai Permen KP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP, meliputi pembentukan UPG di unit Eselon I dan UPT beserta pelaksanaan tugasnya dan didokumentasikan Laporan gratifikasi memuat pengukurur pemahaman internalisasi gratifikasi di unit kerja dan hasil <i>money atas</i> kebijakan penanganan gratifikasi yang sudah berjalan. 2. Kebijakan pengendalian gratifikasi di unit kerja telah diintegrasikan kedalam prosedur pelayanan maupun pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja lainnya. Contoh: Penyampaian larangan gratifikasi pada standar pelayanan dan sebelum petugas memberikan pelayanan, terlebih dahulu menyampaikan informasi larangan gratifikasi pada pengguna jasa. 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur layanan maupun tugas fungsi lainnya, maka dinilai A; b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan, namun belum dituangkan dalam prosedur layanan maupun tugas fungsi lainnya, maka dinilai B; c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum ada aktivitas dan prosedur pengendalian gratifikasi, maka dinilai C; d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi, maka dinilai D.	1. Belum dilengkapi dengan Laporan gratifikasi memuat pengukuran pemahaman internalisasi gratifikasi di unit kerja dan hasil <i>money atas</i> kebijakan penanganan gratifikasi yang sudah berjalan. 2. pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur layanan maupun tugas fungsi lainnya 3. Laporan Gratifikasi bulanan Tahun 2025 belum dibuat.
B. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPI)		1.50							1.13	75.00%			
	a.		Telah dibangun lingkungan pengendalian	a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga memuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian	A/B/C/D/E	B	Bagian 1. 1. Sik Kode Etik, tgl 9 Januari 2024 (<i>belum ada lampiran</i>) >> ada di Pokja III.V 2. Rekap Kehadiran Jan-Des 2024 Bagian 2. 1. Laporan Monev Diklat 2024 2. Laporan Monev Mutasi Semester 1 dan 2 2024 3. TNA Pegawai 4. Serifikat a.n Herman, Jerni, Sirian dan Taufiq Bagian 3. 1. SS Lembar Disposisi 2. Dokumen MR 2024 3. PK PPSNZJ 2024 4. Undangan Internalisasi Pegawai Bagian 4. 1. Peta Jabatan (KeprenKP 51/2024) 2. SPT Tim MR dan SPID Tahun 2024 Bagian 5. 1. SS Lembar Disposisi 2. SPT Pemeriksaan NPK tgl 10 Des 2024 3. SPT PLH tgl 13 Juni 2024 4. MPH 2024 Bagian 6. 1. Laporan Monev Diklat 2024 2. Laporan Monev Mutasi Semester 1 dan 2 2024 3. SKP Pegawai a.n Saodi dan Joko Tri 4. Daftar Kenaikan Pangkat Bagian 7. 1. Permohonan Revisi Itjen, tgl 30 Januari 2024 2. Hasil Revisi Itjen, tgl 26 Februari 2024 Bagian 8. 1. Perjanjian Kerjasama dengan Unpad 2. Perjanjian Kerjasama dengan Pattimura 3. Perjanjian Penggunaan Bangunan Permanen - HNPN	https://drive.google.com/drive/folders/1Jd8e7z13a2z6b2c3d8a4c88b8fKSS8L4V2F72xw06?usp=sharing	B	0.75		1. Unit kerja wajib membangun lingkungan pengendalian sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Lingkungan pengendalian terdiri atas 8 unsur: a. integritas dan nilai etika (penerapan <i>core value</i> BerAKHLAK); b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembelian sumber daya manusia; g. pemyediaan peran apent pegawai/instansi pemerintah yang efektif; h. hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait. Bukti pendukung pelaksanaan pembangunan lingkungan pengendalian berpedoman pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 4-12; 3. Unit kerja dapat membuat inovasi lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang berbeda dari 8 unsur lingkungan pengendalian yang ada; 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika memiliki inovasi, namun hanya membangun sebagian besar (>50) lingkungan pengendalian, maka dinilai B; b. Jika memiliki inovasi, namun hanya membangun sebagian kecil (<50%) lingkungan pengendalian, maka dinilai C; c. Jika membangun sebagian kecil (<50%) lingkungan pengendalian, maka dinilai D; 5. Perjelas dengan informasi jumlah lingkungan pengendalian yang telah dibangun. Contoh: 4 dari 8 lingkungan pengendalian telah dibangun (>50%), yaitu unsur ..., maka dinilai C.	1. Dokumen Tahun 2025 belum dilengkapi 2. Keperluan yang kondusif dilengkapi dari Manajemen Perubahan 3. Belum ada inovasi terkait Lingkungan Pengendalian

Keterangan		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZJ	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit PPSNZJ	Penilaian	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZJ	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Itjen Mei 2025
	b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan		a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko	A/B/C/D/E	B	1. Surat Tugas Tim SPIP dan MR 2024, tg 2 Januari 2024 2. RKAKL Tahun 2024 3. MR 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1Jbldc9z1AdUcUuH2C9b0x0d01Bz0XAG0GqC72x2a614eqp2d2d	B	0.75		1. Menggunakan formulir penilaian risiko sesuai lampiran dalam Permen KP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KKP; 2. Manajemen Risiko yang disusun agar selaras dengan perencanaan strategis, manajemen kinerja, peta proses bisnis, RKI dan RKAKL. Untuk kegiatan yang berbasis RKAKL, identifikasi risiko agar dilakukan terhadap Klasifikasi Rincian Ounit (KKO) dan Rincian Output (RO) dalam RKAKL. Matrik Manajemen Risiko dapat ditambahkan Kolom Sasaran Kegiatan/strategis, kolom realisasi kegiatan pengendalian beserta waktu pelaksanaannya; 3. Risiko tinggi dan sangat tinggi pada hasil identifikasi harus diidentifikasi, yaitu melaksanakan rencana pengendalian dan didukung bukti dokumen; 4. Menyusun Manajemen Risiko KKN unit kerja sesuai format dalam lampiran VIII Permen KP No 49 Tahun 2021 tentang Pengawasan Integritas di Lingkungan KKP yang memuat informasi mengenai identifikasi risiko terhadap area rawan (untuk Tindak Lanjut Rekomendasi SPI KPP) yaitu: a. Perencanaan program/kegiatan prioritas (alokasi anggaran, penentuan lokasi dan calon penerima bantuan pemerintah) - mark-up anggaran (berbagai negara), suap; b. Pelaksanaan program/kegiatan prioritas c. Pelaporan dan pertanggungjawaban 5. Susun daftar rekapitulasi kebijakan/kegiatan yang telah dinilai risikonya setiap tahun; 6. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika telah melakukan sebagian besar (>50%) penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, maka dinilai C; b. Jika telah melakukan sebagian kecil (<50%) penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, maka dinilai D. Catatan: Jenis risiko KKN : - gratifikasi; - suap; - nepotisme; - Pengji/Pemerasan; - Kerugian Negara; - Penggelapan; - Benturan Kepentingan dalam Pengadaan. Contoh risiko KKN (dalam pelaksanaan tugas, pelayanan publik dan rekrutmen pegawai): - Penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi antara lain pada alat berat, kendaraan dinas, laptop, lainnya; - Penyalahgunaan pengadaan barang/jasa antara lain pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, ketidakpatuhan dengan pemenang pengadaan barang/jasa, kemahalan harga (kualitas tidak sesuai dengan harga, gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, dan hasil pengadaan barang/jasa yang tidak bermanfaat - Penyalahgunaan pengelolaan anggaran antara lain pada anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transportasi lokal/perjalanan dinas tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang ditandatangani, serta penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat - pemberian/penyuluhan bantuan pemerintah - Pelayanan/Penerimaan : gratifikasi; pengantian liar; suap; Negosiasi dalam pemberian sanksi/denda atau pelanggaran peraturan perundang-undangan; - Rekrutmen pegawai tenaga kontrak: nepotisme dan gratifikasi/suap	Penilaian risiko dilakukan hanya terhadap 2 kegiatan yaitu tersedianya data produksi hasil tangkapan ikan yang valid dan akurasi data Pengolahan Sistem Tol Gate Kendaraan Pas Muka Pelabuhan. Dilengkapi Penilaian Risiko dari Kegiatan Lain. MR KKN sudah dilengkapi dengan risiko KKN Gratifikasi pada kegiatan SCPIB.	
	c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko	A/B/C	B	1. Laporan SPIP TW 1 2024 2. Dokumen MR 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1Jbldc9z1AdUcUuH2C9b0x0d01Bz0XAG0GqC72x2a614eqp2d2d	B	0.50		1. Menggunakan formulir penilaian risiko sesuai lampiran dalam Permen KP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KKP dengan menambahkan kolom realisasi kegiatan pengendalian dan menguji aktivitas pengendalian yang dilakukan beserta waktu realisasi pelaksanaannya untuk menjamin keselarasan dengan peta proses bisnis dan pencapaian RKI. Kegiatan pengendalian harus selaras dengan risiko yang dimiliki; 2. Menggunakan formulir penilaian risiko KKN sesuai Permen KP 49 tahun 2021 disertai dengan realisasi kegiatan pengendalian. Dalam laporan diberikan narasi yang menjelaskan dampak dari kegiatan pengendalian telah mengurangi risiko secara signifikan; 3. Laporan terkait kegiatan pengendalian adalah kegiatan pengendalian tambahan yang dilakukan unit kerja dihar yang telah ditetapkan organisasi dapat berupa perbaikan sistem/prosedur/waktu dll; 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Belum dilampirkan bukti implementasi SPIP	
	d. SPI telah diformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		a. Jika SPI telah diformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. Jika SPI telah diformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Jika SPI belum diformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait	A/B/C	B	1. MR 2024 2. Laporan SPIP TW 1 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1Jbldc9z1AdUcUuH2C9b0x0d01Bz0XAG0GqC72x2a614eqp2d2d	A	1.00		1. SPI yang diformasikan dan dikomunikasikan berpedoman pada Lampiran PP No. 60 Tahun 2008 Bagian IV tentang Informasi dan Komunikasi; 2. Substansi SPI yang diformasikan, berupa: a. Lingkungan pengendalian yang telah dibangun (8 unsur); b. Penilaian risiko yang telah dilakukan; c. Aktivitas pengendalian yang telah dilakukan untuk meminimalisir risiko d. Informasi dan komunikasi; e. Penataan SPI yang diformasikan, antara lain dapat berupa self assessment maturitas SPI; 3. SPI diformasikan kepada seluruh pihak terkait yaitu pegawai dan stakeholders; 4. Media Informasi dan komunikasi dapat menggunakan: a. Pertemuan tatap muka; b. Media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Website); c. Media elektronik (ruming text, videotext, dll); d. Media Cetak (surat dll); e. Papan pengumuman. 5. Jika SPI telah diformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait (pegawai dan stakeholder), maka dinilai A; 6. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika unit kerja telah menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pihak seluruh substansi SPI, maka dinilai A b. Jika unit kerja telah menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pihak, namun substansi SPI tidak seluruhnya, maka dinilai B.	Media Informasi dan Komunikasi: Whatsapp, Tatap Muka namun belum ada bukti ke stakeholder Laporan SPIP belum memuat seluruh substansi.	
iii. Pengaduan Masyarakat		1.50							1.50	100.00%			
	a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat	A/B/C	B	1. Keputusan PT Nomor 17 Tahun 2024 2. SPT Tim Dumas dan WBS, tg 23 Januari 2024 3. SOP Pengaduan, tg 1 November 2021 4. Laporan Pengaduan TW I, II, III, dan IV 2024 5. Kotak Pengaduan UPT PPSNZJ dan SS Aplikasi Lapor 6. ST Tim Dumas 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1Jbldc9z1AdUcUuH2C9b0x0d01Bz0XAG0GqC72x2a614eqp2d2d	A	1.00		1. Implementasi kebijakan pengaduan mengacu Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan KKP minimal meliputi: a. Terbentuknya Tim Penanganan Pengaduan yang ditetapkan Pimpinan Eksen I; b. Mekanisme/SOP penanganan pengaduan yang ditetapkan kepala satuan mengacu SOP Penanganan Pengaduan yang diterbitkan oleh TPP Kementerian; c. Penggunaan SPAN Lapor dan mengutip seluruh pengaduan yang beresmer dari saluran lain yang dimiliki unit kerja (antara lain: kotak pengaduan, ruang pengaduan, email, dbj dalam web lapor.go.id); d. Penyusunan dan penyampaian penanganan pengaduan bulanan (berisi ada/tidaknya laporan pengaduan) dan secara berjenjang disampaikan kepada TPP Kementerian; 2. Implementasi dapat disampaikan melalui laporan moner penanganan pengaduan secara semesteran dengan melampirkan bukti pelaksanaan keempat substansi di atas, yaitu ada/tidak adanya pengaduan yang masuk, SK/Pengaduan sebagai Tim Penanganan Pengaduan, mekanisme/SOP penanganan pengaduan, dan foto/printscreen sarana pengaduan yang disediakan; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Sarana Pengaduan: LAPOR, kotak pengaduan, Tatap Muka PPID, Nomor Kontak Pengaduan via chat (wa). Jumlah Pengaduan Tahun 2024 sebanyak 24.	
	b. pengaduan masyarakat ditindaklanjuti		ya. pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	Ya/Tidak	Ya	1. Laporan Moner TW I, II, III, dan IV	https://drive.google.com/drive/folders/1Jbldc9z1AdUcUuH2C9b0x0d01Bz0XAG0GqC72x2a614eqp2d2d	Ya	1.00		1. Memastikan TPP Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang hanya menjadi kewenangan unit kerja; 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Pengelolaan pada aplikasi LAPOR baru 2 dan 24 yang sudah diinput. TW I = 2 Pengaduan TW II = 4 Pengaduan TW III = 17 Pengaduan (TL 4 pengaduan, 13 lain belum ada bukti) TW I 2025 = 28 Pengaduan.	
	c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	B	1. Laporan Moner TW I, II, III, dan IV 2024 2. Laporan Dumas Jan-Des 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1Jbldc9z1AdUcUuH2C9b0x0d01Bz0XAG0GqC72x2a614eqp2d2d	A	1.00		1. Moner atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan oleh unit kerja sesuai kewenangannya; 2. Moner dilakukan tidak hanya atas hasil dan tindak lanjut penanganan pengaduan, namun juga melakukan moner terhadap SIM yang menampung pengaduan/Tim Penanganan Pengaduan, prosedur/ mekanisme penanganan pengaduan, dan sarana penanganan pengaduan; 3. Laporan moner atas penanganan pengaduan masyarakat dinilai berkala jika disusun minimal setiap semester, dilengkapi dengan saran perbaikan, kecuali bila seluruh substansi sudah dibahas dalam moner namun tidak ditemukan permasalahan; 4. Laporan moner atas penanganan pengaduan masyarakat tetap disusun meskipun tidak terdapat pengaduan. 5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika substansi moner tidak lengkap, maka dinilai satu tingkat lebih rendah; b. Jika dalam moner tidak memuat saran perbaikan, maka dinilai satu tingkat lebih rendah; c. Jika substansi moner tidak lengkap dan tidak memuat saran perbaikan, maka dinilai C.	Total Pengaduan sebanyak 27 Pengaduan, 13 sudah dilampirkan form TL, 13 lain belum dan belum dilengkapi bukti 1. Laporan Moner permasalahan yang dibuat terkait pengaduan dan saran untuk pengaduan bukan terkait penanganan pengaduan.	

Keterangan		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZJ	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit PPSNZJ	Penilaian	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZJ	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Ijten Mei 2025
	d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja	A/B/C	B	Laporan Move Benturan Kepentingan	https://drive.google.com/drive/folders/1u4d9zWu17b0d9n17Jm8Sf0bW6V10Y2ag?usp=sharing	A	1.00			1. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dilakukan per semester dan memuat substansi sosialisasi/publikasi, penanganan dan pelaporan, dan diungkap dengan rekomendasi, kecuali bila seluruh substansi sudah dibahas dalam move namun tidak ditemukan permasalahan; 2. Move dilakukan atas penanganan benturan kepentingan minimal dilakukan secara semester dan memuat substansi: a. upaya sosialisasi/publikasi kebijakan; b. menantau/menilai pemahaman pegawai terkait penanganan benturan kepentingan; c. permasalahan dan saran perbaikan atas hasil move penanganan benturan kepentingan; d. upaya tindak lanjut terhadap saran perbaikan pada laporan periode sebelumnya. 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika substansi move tidak lengkap dan tidak memuat saran perbaikan, maka dinilai C; b. Jika substansi move tidak lengkap, maka dinilai satu tingkat lebih rendah dari nilai seharusnya; c. Jika dalam move tidak memuat saran perbaikan, maka dinilai satu tingkat lebih rendah dari nilai seharusnya.	Laporan Move belum memuat substansi memantau/menilai pemahaman pegawai terkait penanganan benturan kepentingan. Pelaksanaan pada laporan dan saran belum selaras.
	e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja	A/B/C	B	Laporan Move Benturan Kepentingan	https://drive.google.com/drive/folders/1u4d9zWu17b0d9n17Jm8Sf0bW6V10Y2ag?usp=sharing	A	1.00			1. Rekomendasi yang disampaikan dalam laporan move penanganan benturan kepentingan harus ditindaklanjuti termasuk rekomendasi pada laporan periode sebelumnya; 2. Laporan move yang tidak memberikan saran perbaikan tidak akan dinilai, kecuali bila seluruh substansi sudah dibahas dalam move namun tidak ditemukan permasalahan; 3. Jika tidak ada terhadap benturan kepentingan belum berarti tidak perlu membuat rekomendasi. Rekomendasi tetap diperlukan untuk perbaikan dalam penanganan benturan kepentingan; 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Dinilai sebagian besar jika >30% hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika move tidak memberikan rekomendasi, maka dinilai satu tingkat lebih rendah, kecuali bila seluruh substansi sudah dibahas dalam move namun tidak ditemukan permasalahan.	Semester 1 Tahun 2024 1 saran terkait sosialisasi Semester 2 Tahun 2024 1 saran terkait sosialisasi Belum dilaksanakan
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		5.00							4.49	89.78%			
f. Standar Pelayanan		1.00							0.92	91.79%			
	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	A	1. Draft SOP 10 Pelayanan PPSNZJ Tahun 2024 2. Memorandum SOP dan SP PPSNZJ Tahun 2024 atas 10 layanan tanggal 15 Januari 2024 3. Hasil Pembahasan SOP dan SP tanggal 11 Januari 2024 4. Rapat Revisi SOP, SP, SK Penetapan di tahun 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1u4d9zWu17b0d9n17Jm8Sf0bW6V10Y2ag?usp=sharing	A	1.00			1. Identifikasi jenis layanan berdasarkan Permen KP Nomor 15/2021 (atau sesuai dengan tasi pelayanan masing-masing yang dilaksanakan oleh Satker); 2. Penyusunan standar pelayanan berdasarkan Permen/PANRB Nomor 15/2014 : a.1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) meliputi: 1) Rerayanan 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur 3) Jangka waktu pelayanan 4) Biaya/tarif 5) Produk pelayanan 6) Penangan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi a.2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi: 1) Dasar hukum 2) Nama dan prasarana, dan/atau fasilitas 3) Kompetensi pelaksana 4) Pengawasan internal 5) Jumlah pelaksana 6) Jaminan pelayanan 7) Jamuan keamanan dan keselamatan pelayanan 8) Evaluasi kinerja pelaksana 9. Proses penyusunan standar pelayanan melibatkan stakeholder (tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat. c. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dinilai sebagian jika unit kerja telah memiliki >30% jenis pelayanan.	Telah tersedia Standar Pelayanan (SP) pada 10 jenis layanan dengan memuat 14 komponen SP yang ditetapkan oleh Kepala PPS Niam Zachman sesuai memo Nomor: 50/PPSNZJ/OT.310/1/2024 tg 15 Januari 2024 PPNyes penyusunan standar pelayanan melibatkan tokoh masyarakat (Betta RW), akademisi (Poltek AUP, stakeholder (Yona), media Massa (Pajar Metro) dan lembaga swadaya masyarakat (LPKAD) sesuai dengan Betta Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) PPS Niam Zachman tanggal 20 Agustus 2024.
	b. Standar pelayanan telah dimaklumkan		a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	A	1. Publikasi Maklumat Standar Pelayanan Media Cetak 2. Publikasi Maklumat Standar Pelayanan Media Sosial 3. Daftar Jenis Layanan Publik (10 layanan)	https://drive.google.com/drive/folders/1u4d9zWu17b0d9n17Jm8Sf0bW6V10Y2ag?usp=sharing	A	1.00			1. Identifikasi SP yang telah dimaklumkan; 2. Media yang digunakan untuk publikasi SP dan Maklumat pelayanan adalah website dan media lainnya (media cetak, elektronik dan media sosial); 3. Penilaian: a. Jika standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya, maka dinilai A; b. Jika standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar (>50%) jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website, maka dinilai B; c. Jika standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil (<50%) jenis pelayanan dan belum dipublikasikan, maka dinilai C; d. Jika standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan, maka dinilai D. Catatan: Maklumat Pelayanan mengacu Permen PAN dan SP Nomor 15 Tahun 2014 memuat hal-hal yaitu: a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.	Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan, isinya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan dipublikasikan pada website, media sosial (Instagram), media non elektronik, yaitu di kantor utama dan ruang pelayanan dan pada media elektronik, yaitu videotron (pada pintu masuk ruang pelayanan)
	c. Dilakukan revisi dan perbaikan atas standar pelayanan		a. Dilakukan revisi dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (jurnalain , tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan revisi dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan revisi dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan revisi dan perbaikan atas standar pelayanan	A/B/C/D	A	1. Laporan Move SP Tahun 2024, tg 2 Juli 2024 dan 31 Des 2024 2. Laporan Revisi SP Tahun 2024, tg 14 Nov 2024 3. Pemberitahuan Hasil Revisi SOP 2024, tg 13 Nov 2024 4. Laporan Hasil SKM TW I, II, III dan IV 2024 5. Laporan Revisi SP dan SOP Internal dan Eksternal Tahun 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1u4d9zWu17b0d9n17Jm8Sf0bW6V10Y2ag?usp=sharing	B	0.67			1. Revisi/evaluasi wajib dilaksanakan minimal satu tahun sekali sesuai Permen KP Nomor 15 Tahun 2021 (Pasal 20 ayat 1); 2. Revisi dilakukan melalui proses konsultasi publik melibatkan stakeholders sesuai unsur yang terlibat dalam pelayanan unit kerja (antara lain penyelenggara layanan, tokoh masyarakat, instansi terkait, praktisi/akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pengguna layanan), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat; 3. Revisi dilakukan terhadap seluruh (14 komponen) standar pelayanan pada seluruh layanan, dengan memperluasnya; a. perubahan kebijakan; b. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. inovasi dalam pelayanan; d. penerapan teknologi informasi; e. proses bisnis; f. masukan dari Masyarakat (survey kepuasan masyarakat/pengaduan); 4. Hasil revisi ditindaklanjuti berupa perbaikan standar pelayanan dan dikomunikasikan/dipublikasikan kepada masyarakat; 5. Jika SP terpasang maka hasil revisi unit kerja agar diuapkan secara tertulis kepada Unit Kelon I; 6. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Tahun 2024: PPS Niam Zachman telah melakukan revisi atas perbaikan standar pelayanan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 20 Agustus 2024 melibatkan tokoh masyarakat (Betta RW), akademisi (Poltek AUP), stakeholder (Yona), media Massa (Pajar Metro) dan lembaga swadaya masyarakat (LPKAD) dan revisi internal PPS Niam Zachman pada tanggal 14 November 2024. Namun pelaksanaan revisi standar pelayanan belum membahas hasil SKM/pengaduan.
	d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan		ya, telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat pelayanan	Ya/Tidak	Ya	1. Publikasi Maklumat Standar Pelayanan Media Cetak 2. Publikasi Maklumat Standar Pelayanan Media Sosial 3. Publikasi 10 jenis layanan Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1u4d9zWu17b0d9n17Jm8Sf0bW6V10Y2ag?usp=sharing	Ya	1.00			1. Media yang digunakan untuk publikasi SP dan Maklumat pelayanan adalah website dan media lainnya (media cetak: papan pengumuman, brosur/leaflet, poster, spanduk, media elektronik dan media sosial); 2. Publikasi standar layanan dilakukan terhadap seluruh layanan mengingat tiap layanan memiliki standar pelayanan berbeda; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan, isinya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan dipublikasikan pada website, media sosial (Instagram), media non elektronik, yaitu di kantor utama dan ruang pelayanan dan pada media elektronik, yaitu videotron (pada pintu masuk ruang pelayanan)
H. Budaya Pelayanan Prima		1.00							0.90	90.33%			

Keterangan		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZJ	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit PPSNZJ	Penilaian	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZJ	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Itjen Mei 2025
	a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima		a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah terdapat money yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, akan tetapi baru sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan e. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D/E	B	1. Bukti Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Jasa 2. Bukti Peningkatan Kompetensi Petugas Ukur Kapal 3. Inhouse Training Pokja 3 4. Inhouse Training Penggunaan Sarpras 5. Money Petugas Pelayanan Publik 6. Sertifikat Kompetensi 7. ST Petugas Layanan, tgl 29 Des 2023 8. ST Petugas Layanan 2025	https://www.google.com/url?sa=t&url=https://www.kemendagri.go.id/side-view_ark		1.00		1. Substansi materi pelatihan/sosialisasi antara lain: Aspek kebijakan pelayanan, Profesionalisme SDM (kode etik, estetika, capacity building, dll.), Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi; 2. Pelaksanaan money terkait kecakapan petugas layanan antara lain: a. Kemampuan petugas pelayanan dinilai dari tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; b. Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; c. Kesediaan memberikan pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/ status masyarakat yang dilayani; d. Kesopanan dan keramahan petugas yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati; 3. Berkelanjutan diukur dari keberterimaan setiap petugas pelayanan dalam pelatihan/sosialisasi minimal sekali dalam setahun (secara online/offline) sesuai kebutuhan jenis layanan, dilengkapi dengan jadwal; 4. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika pelatihan/sosialisasi pelayanan prima diberikan kepada sebagian besar (>50%) petugas/pelaksana layanan; maka dinilai C; b. Jika pelatihan/sosialisasi pelayanan prima diberikan kepada sebagian kecil (<50%) petugas/pelaksana layanan, maka dinilai D.	Tahun 2024: Pelatihan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta telah melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima melalui kegiatan Internalisasi Pegawai "Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Produktif dalam rangka Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik" yang diikuti oleh seluruh Pegawai termasuk di dalamnya Petugas Layanan. Telah dilaksanakan money yang menunjukkan bahwa sebanyak 27 orang (seluruh) petugas pelayanan sudah mengikuti Kegiatan pengembangan kompetensi pelayanan publik, serta terdapat 4 petugas yang telah mengikuti tambahan Kegiatan Pengembangan Teknis sebagai bagian dari keberlanjutan dan kecakapan pelayanan yang diperlukan bagi petugas dalam memberikan pelayanan yang prima. Dalam laporan tersebut juga terdapat Matriks Monitoring Kecakapan Petugas Pelayanan Publik 2024 Tahun 2025: PPS Nizam Zachman telah melakukan upaya peningkatan kemampuan dan kompetensi melalui pelatihan Empat dalam Pelayanan yang memiliki substansi materi pelatihan/sosialisasi antara lain: Aspek kebijakan pelayanan, Profesionalisme SDM (kode etik, estetika, capacity building, dll.), Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 yang diikuti oleh seluruh petugas pelayanan. Kegiatan money terkait kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan baru akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2025.	
	b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses	A/B/C/D	A	1. Publikasi Informasi Layanan di SIPPN 2024 2. Publikasi Informasi Layanan di Media Cetak 3. Publikasi Informasi Layanan di Media Sosial 4. Publikasi Informasi Layanan	https://www.google.com/url?sa=t&url=https://www.sipn.go.id/side-view_ark		0.67		1. Seluruh Informasi layanan (SK/ST Petugas Layanan, SP, Jenis layanan, Makhmat Pelayanan, SOP) pada unit kerja dapat diakses melalui berbagai media dan terhubung dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (diuji dalam website: sipn.menpan.go.id). 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Tahun 2024: Informasi tentang pelayanan pada PPS Nizam Zachman dapat diakses melalui berbagai media (website, instagram) dan melalui media offline melalui papan pengumuman dan telah terhubung dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (https://sipn.menpan.go.id/). Namun demikian data dukung yang disajikan masih belum memadai, yaitu: a. Data dukung yang disajikan pada media sosial Instagram adalah publikasi SP tahun 2023 b. Belum dapat menunjukkan bahwa seluruh Informasi layanan terutama SK/ST Petugas Layanan, SP, Makhmat Pelayanan, SOP dapat diakses melalui berbagai media Tahun 2025: Telah terdapat data dukung bahwa seluruh Informasi layanan (SK/ST Petugas Layanan, SP, Jenis layanan, Makhmat Pelayanan, SOP) pada unit kerja dapat diakses melalui berbagai media dan telah terhubung dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (diuji dalam website: sipn.menpan.go.id).	
	c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan		a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan secara rutin/berkelanjutan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal/ disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan. d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A/B/C/D	B	1. Keputusan Kepala Pelubuhan Tentang Pemberian Reward Petugas Pelayanan Publik, tgl 2 Januari 2024 2. SK, Dokumentasi, Kertas Kerja dan Piagam Petugas Pelayanan Terhark Semester I 3. SK, Dokumentasi, Kertas Kerja dan Piagam Petugas Pelayanan Terhark Semester II	https://www.google.com/url?sa=t&url=https://www.kemendagri.go.id/side-view_ark		1.00		1. Kode etik khusus petugas layanan yang memuat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi; 2. Mekanisme penilaian pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas layanan, memuat minimal: a. kriteria penilaian oleh pimpinan dan rekan sejawat meliputi: sikap dan perilaku, kediplasian, profesionalitas, kecepatan respon, kerja sama, tanggung jawab, dan integritas; inovatif/kreatif (kemampuan dalam menungkan ide) b. Hasil penilaian pengguna layanan; penampilan (paksaan, atribut dll sesuai ketentuan), tidak pernah mendapat complain , 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Tahun 2024: Tersedia kriteria Pemberian penghargaan sebagai mana ditetapkan sesuai peraturan Nomor 15/PPSNZJ/OT.7/10/2024 tgl 5 Januari 2024 tentang Pemberian Reward kepada Petugas Pelayanan Publik PPS Nizam Zachman dengan kriteria penilaian yaitu: Kehadiran, Kinerja, Kualitas Kerja yang dihasilkan, Kerjasama, Inovatif/ Kreativitas, Kerapian dan Profesionalisme dalam bekerja sebagai Petugas Pelayanan Publik. Tahun 2025: a. Tersedia Kode etik khusus petugas layanan yang memuat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi Nomor 3/PPSNZJ/AP.8/10/2025 tanggal 2 Januari 2025 b. Tersedia kriteria Pemberian penghargaan sebagai mana ditetapkan sesuai Memorandum Nomor: 4/PPSNZJ/OT.7/10/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pemberian Reward kepada Petugas Pelayanan Publik PPS Nizam Zachman dengan kriteria penilaian yaitu: a) Nilai IKM dan Predikat Mutu Pelayanan kriteria sangat baik; b) Penilaian Atasan Langsung dan Rekan Sejawat meliputi: sikap dan perilaku, kediplasian, profesionalitas, kecepatan respon, kerja sama, tanggung jawab, dan integritas; inovatif/kreatif (kemampuan dalam menungkan ide) dalam bekerja sebagai Petugas Pelayanan Publik. c) Hasil penilaian pengguna layanan; penampilan (paksaan, atribut dll sesuai ketentuan), tidak pernah mendapat complain	
	d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	A	1. Keputusan Kepala Pelubuhan tentang Kompensasi Layanan, tgl 5 Januari 2024 2. Implementasi Pemberian Kompensasi Layanan	https://www.google.com/url?sa=t&url=https://www.kemendagri.go.id/side-view_ark		1.00		1. Mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan untuk seluruh jenis layanan pada unit kerja, jika pemberian layanan tidak sesuai standar. Informasi terkait mekanisme kompensasi wajib dipublikasikan ke pengguna jasa. 2. Implementasi atas pemberian kompensasi selain dokumen bukti, dilengkapi juga dengan pernyataan puas/tidak puas dari pengguna jasa yang menerima kompensasi berupa dokumen tertulis/ foto/video, dll.; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar (>50%) jenis layanan, maka dinilai B; b. Jika telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil (<50%) jenis layanan, maka dinilai C.	Tahun 2024: Telah terdapat kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan untuk seluruh jenis layanan Nomor: B.276/PPSNZJ/OT.7/10/2024 dan telah terdapat bukti pemberian kompensasi kepada pengguna layanan (penerima layanan menerima layanan sesuai standar). Kebijakan kompensasi tersebut telah dipublikasikan/terinformasikan kepada pengguna jasa melalui papan pengumuman di ruang pelayanan. Tahun 2025: Telah terdapat kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan untuk seluruh jenis layanan Nomor: B.526/PPSNZJ/OT.7/10/2025 dan telah terdapat bukti pemberian kompensasi kepada pengguna layanan (penerima layanan menerima layanan sesuai standar). Kebijakan kompensasi tersebut telah dipublikasikan/terinformasikan kepada pengguna jasa melalui papan pengumuman di ruang pelayanan dan media sosial Instagram dan WAJ Petugama Jasa Layanan. Terdapat dokumentasi pelayanan publik pada PPS Nizam Zachman, pemberian seluruh pelayanan publik dilakukan di ruang pelayanan	
	e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi	A/B/C/D	A	1. Identifikasi Sarana Layanan Terpadu 2. Jenis Pelayanan Publik secara terpadu (terdapat 10 layanan yang diberikan di Pos Pelayanan Terpadu)	https://drive.google.com/drive/folders/1J0EzF-SvAg0BgQ5G6b0dKtLHh0uP2wagprrv?e=link		1.00		1. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan pengolahan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikelola oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya; 2. Layanan terpadu/terintegrasi dapat berupa: a. Layanan satu atap; atau b. Layanan satu pintu; c. Layanan terpadu dalam sistem/aplikasi 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika sebagian besar (>50%) pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi; maka dinilai B; b. Jika sebagian kecil (<50%) pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi, maka dinilai C.		

Keterangan		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZJ	Daftar Bukti Dukungan dan Link Unit PPSNZJ	Penilaian	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZJ	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Itjen Mei 2025
	c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	1. Laporan SKM TW I, II, III, dan IV Tahun 2024 2. Memorandum Kalabah untuk Pemindaklanjuti Hasil SKM 3. Hasil Tindak Lanjut SKM TW I, II, III, dan IV Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1d6ac5814c3702000000000000000000?usp=sharing	C	0.33			1. Saran/rekomendasi dalam laporan SKM memuat masukan perbaikan secara konkrit pada masing-masing komponen yang menunjukkan kelemahan. Rekomendasi perbaikan harus relevan dengan permasalahan dalam hasil SKM; 2. Seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar (>50%) hasil survei kepuasan masyarakat, maka dinilai B; b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil (<50%) hasil survei kepuasan masyarakat, maka dinilai C; c. Jika dalam laporan SKM ditemukan substansi yang menunjukkan kelemahan namun tidak memuat rekomendasi dan/atau belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat, maka dinilai D. Catatan: Jika rekomendasi perbaikan membutuhkan anggaran dan waktu penyelesaian, maka tidak perlu dihitung sebagai rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pada periode tersebut.	Telah terdapat laporan SKM yang memuat masukan perbaikan secara konkrit pada masing-masing komponen yang menunjukkan kelemahan, namun demikian belum seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti, sebanyak 8/21 atau sebesar 38% rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti TW I 2024 : 5/7 rekomendasi (71.42% yang sudah TL TW II 2024 : 3/4 rekomendasi (75% yang sudah TL TW III 2024 : 0/3 rekomendasi (0% yang sudah TL TW IV 2024 : 0/3 rekomendasi (0% yang sudah TL TW I 2025 : 0/4 rekomendasi (0% yang sudah TL
	v. Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.00	a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan e. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	A	1. Dokumentasi integrasi aplikasi TemanSPB dan SikaCap 2. Dokumentasi integrasi aplikasi e-Toll Gate 3. Dokumentasi integrasi aplikasi TemanSPB dan e-PTT	https://drive.google.com/drive/folders/1d6ac5814c3702000000000000000000?usp=sharing	B	0.67	89.00%		1. Identifikasi proses pelayanan yang menggunakan teknologi informasi, contoh: penggunaan komputer dalam proses layanan; 2. Hitung jumlah tahapan pelayanan dalam SOP setiap jenis layanan dibandingkan dengan tahapan yang menggunakan teknologi informasi/berbasis komputer. Penilaian diperhitungkan mulai dari tahapan awal layanan s.d. akhir layanan (output). 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika penggunaan teknologi informasi pada sebagian besar (>50%) proses pelayanan, maka dinilai B; b. Jika penggunaan teknologi informasi pada sebagian kecil (<50%) proses pelayanan, maka dinilai C; Catatan: Bagi pengguna jasa dengan karakteristik tidak memungkinkan penggunaan layanan berbasis TI (gagap teknologi atau remote area blank spot) maka jika ada tahapan yang tetap dilakukan secara tatap muka, dapat dinilai sepanjang data dan informasi sudah diinput dalam komputer/tidak dicatat manual.	Seluruh layanan pada PPS Nisam Zachman telah menggunakan teknologi informasi dengan aplikasi yaitu : pelayanan SPB (teman SPB), SI SHIT, STBLK Kedatangan kapal (teman SPB, tambah labut SI Jaka), SIKAP (SICREPT), CPBB (SICREPT), rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan, perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan (Sipatu), sedangkan layanan penggunaan alat transportasi menggunakan komputer untuk penentuan persetujuan penggunaan Pemberian pelayanan juga menggunakan inovasi berupa aplikasi super e-PTT, SIKAPAP dan e-Toll Gate Namun belum dilengkapi dengan: 1. Daftar teknologi informasi (aplikasi) yang digunakan oleh PPS Nisam Zachman 2. Screenshot teknologi informasi yang digunakan oleh PPS Nisam Zachman
	b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi		Ya/ jika tela membangun database pelayanan yang terintegrasi	Ya/Tidak	Ya	1. Dokumentasi integrasi aplikasi TemanSPB dan SikaCap 2. Dokumentasi integrasi aplikasi e-Toll Gate 3. Dokumentasi integrasi aplikasi TemanSPB dan e-PTT	https://drive.google.com/drive/folders/1d6ac5814c3702000000000000000000?usp=sharing	Ya	1.00			1. Yang dimaksud database pelayanan yang terintegrasi adalah integrasi data pengguna jasa yang dapat digunakan dalam beberapa layanan, sehingga tidak perlu double input pernyataan permohonan berlayar/andi. Contoh: Aplikasi SALOMY pada UPT PSDOP yang mengintegrasikan database pengguna jasa, keaktifan transmitter, batas pembiayaan air time transmitter, dan layanan terkait SLO, SIKAT, SIKAP/SPB dan kartu KUSUKA, yang mengintegrasikan database relayan, pembudayaan, pelabahan, asuransi relayan, dll digunakan untuk bantuan pemerintah, dll. 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Terdapat layanan yang memiliki database pelayanan yang terintegrasi, yaitu e-PT dengan Teman SPB, Teman SPB dengan SIKAPAP, E-TOLL GATE dengan PAS MASUK
	c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	A	1. Penyampaian perbaikan aplikasi e-PTT 2. Penyampaian perbaikan e-Toll Gate	https://drive.google.com/drive/folders/1d6ac5814c3702000000000000000000?usp=sharing	A	1.00			1. Teknologi informasi yang diterapkan dalam memberikan pelayanan dilakukan perbaikan terus menerus berdasarkan rekomendasi hasil monitoring/pemantauan TI pada komponen data kasakan, contoh: rekomendasi penguatan jaringan/kapasitas, pembahasan fitur dan peningkatan versi dalam aplikasi. 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban. Catatan: jika perbaikan TI membutuhkan anggaran dan waktu penyelesaian serta bukan kewenangan unit kerja, dapat dinilai sebagai upaya perbaikan selama unit kerja menyampaikan usulan.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus pada aplikasi e-PTT dan e-Toll Gate Selain itu, PPS Nisam Zachman telah menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Teknologi Informasi dalam Pengukuran Kinerja Unit, Operasionalisasi SDM dan Pemberian Layanan Kepada Publik yang didalamnya memuat terkait permasalahan pada aplikasi yang digunakan untuk seluruh layanan berupa usulan perbaikan (peningkatan kapasitas ataupun penambahan fitur) secara Treadman
II. REFORM		30.00							24.88	82.93%			
1. MANAJEMEN PERUBAHAN		4.00							3.67	91.75%			
a. Komitmen dalam perubahan		2.00							2.00	100.00%			
	a. Agan perubahan telah membuat perubahan yang konkret di instansi (dalam 1 tahun)		Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Perencanaan diperoleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan	%		1. SK Agen Perubahan 2024 2. Renja Agen Perubahan 3. Laporan Tindak Lanjut Agen Perubahan Catatan: Terdapat 7 rencana kerja, dengan 1 output yang berpengaruh terhadap perubahan positif kinerja yakni dalam hal pendataan kapal masuk dan keluar melalui aplikasi SIKAPAP.	https://drive.google.com/drive/folders/1d6ac5814c3702000000000000000000?usp=sharing	100.00%	1.00			1. Belum sinkron rencana dan tidak lanjutnya 2. Belum diberikan dampak sebelum dan sesudah 3. 1 orang belum ada rencana agen perubahan tahun 2025 4. Rencana Kerja Agen Perubahan Tahun 2024 perlu ditambahkan Penjelasan Kegiatan Utama terkait Transformasi Digital penggunaan teknologi radio. Pada hasil review perlu dijelaskan kabarnya dengan aplikasi SIKAPAP dan implementasinya saat ini.	
	- Jumlah Agen Perubahan			Jumlah	4				1				
	- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	7				1				
	b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen			%	85.71%	1. SK Agen Perubahan 2024 2. Renja Agen Perubahan 3. Laporan Tindak Lanjut Agen Perubahan Catatan: Terdapat 7 rencana kerja, dengan 1 output yang berpengaruh terhadap perubahan positif kinerja yakni dalam hal pendataan kapal masuk dan keluar melalui aplikasi SIKAPAP.	https://drive.google.com/drive/folders/1d6ac5814c3702000000000000000000?usp=sharing	100.00%	1.00			Siklap sistem informasi keluar masuk kapal perikanan, semua kapal perikanan yang keluar masuk kapal perikanan masuk melaporkan melalui radio F4 dan check pin di antena dan melaporkan data terlewat atau salah di entry oleh petugas mara akan mendapatkan report dengan SPB dan STBLK. Narkoda atau petugas kapal melakukan verifikasi dan kemudian diupload STBLK dan SPB	
	- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	7				1				
	- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen			Jumlah	6				1				
B. ReKomitmen Pimpinan		1.00							1.00	100.00%			
	- Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan		a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (di bawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian zona integritas di dokumen perencanaan unit kerja	A/B/C/D/E	A	Matriks Capaian Rencana Kerja ZI Tahun 2024 Matriks Capaian Rencana Kerja ZI Tahun 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1d6ac5814c3702000000000000000000?usp=sharing	A	1.00			1. Capaian Tahun 2024 98% 2. Capaian Triwulan I Tahun 2025 sebesar 95%	
iii. M. Membangun Budaya Kerja		1.00	a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A/B/C/D	B	1. Kepmen KP Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Lrt 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pengkualan 2. Penerapan Nilai Organisasi : Publikasi Maklumat Pelayanan 3. Penerapan Nilai Networking : Kegiatan Coffe Morning tgl 17 Oktober 2024 4. Penerapan Nilai Encourage : Sosialisasi Kebijakan PPT 5. Penerapan Nilai Transform : Penggunaan Aplikasi Internal Pegawai (B. Kineja, E. Pegawai, E. Present, dan Portal KSP) dan Pelayanan Publik (B. Logbook, SHTI, SPB, STBLK, dan ePTT) 6. Penerapan Nilai Extraordinary : Publikasi Capaian Kinerja PPSNZJ 2024 7. Penerapan Nilai Accountable : Pelaksanaan Kartu Kendali Pelayanan Publik (STBLK, SPB, SHTI, dan) 8. Penerapan Nilai Militant : Peningkatan Jumlah PNPB Pasca Produksi di Tahun 2024 9. Mekanisme Penetapan Core Value OneTeam (Memorandum, Bukti Screenshot WA Grup, Hasil Voting) 10. Penetapan Core Value OneTeam tanggal 8 Januari 2024.	https://drive.google.com/drive/folders/1d6ac5814c3702000000000000000000?usp=sharing	B	0.67	67.00%		Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: 1. Jika telah dilakukan internalisasi dari masing-masing core value BERAHLAK dan nilai-nilai organisasi serta telah diimplementasikan dan dituangkan dalam SOP, dinilai A; 2. Jika internalisasi dari masing-masing core value BERAHLAK dan nilai-nilai organisasi telah dilakukan namun belum dituangkan dalam SOP, dinilai B; 3. Jika masing-masing core value BERAHLAK dan nilai-nilai organisasi belum diinternalisasi, dinilai C; 4. Jika masing-masing core value BERAHLAK dan nilai-nilai organisasi belum disusun, dinilai D.	Internalisasi sudah dilakukan namun belum dituangkan dalam SOP. Dijelaskan lagi ke pegawai terkait penjelasan One Team
2. PENANJATANALAKSANA		3.50							2.59	73.86%			
1. J. J. J. Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Ja		0.50							0.34	67.00%			

Keterangan		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZJ	Daftar Bukti Dukungan dan Link Unit PPSNZJ	Penilaian	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZJ	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Itjen Mei 2025
	-		Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan			1. KepmenKP Nomor 5/2024 ttg Pemangku Jabatan, Nomenklatur Jabatan, dan Kelas Jabatan 2. Surat Peretujuan Ketua Tim DJPT tgl 5 Januari 2024 3. ST Kalahub tlg Tim Kerja 2024 tgl 2 Januari 2024 4. Laporan Moner Dampak Penyederhanaan Jabatan 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1J6ldcyJ1P6uNcWw0bJF2z6kSL3v557r3wZ2x061kqgth2d2	0	0.67			Penilaian atas reform dilakukan jika unit kerja: 1. Membandingkan Proses Bisnis unit kerja sebelum dan sesudah penyederhanaan; 2. Jabatan hasil penyederhanaan telah diintegrasikan sesuai dengan jabatannya; 3. Kajian/moner terhadap dampak atas penyederhanaan jabatan tersebut, minimal terhadap perubahan struktur organisasi dan pola kerja, beban kerja, dan kinerja organisasi; 4. Masukan/usulan atas hasil moner penyusunan jabatan; 5. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan jika kondisi 1-4 telah dilakukan, dapat dinilai A.	Telah dilakukan evaluasi dampak penyederhanaan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional di lingkungan PPS Nasm Zachman pada Tahun 2024, salah satunya sebagai bahan masukan pejabat yang berwenang untuk mengambil langkah konkret dan tepat dalam penempatan pejabat fungsional pada kelompoknya masing-masing, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Peta proses bisnis telah disusun dan telah mempengaruhi penyederhanaan jabatan. Tahun 2024 terdapat penyederhanaan jabatan dalam penyelenggaraan teknis untuk kemudahan pelaksanaan tugas, tetap ditunjuk oleh Kepala Pelabuhan menjadi Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial, Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan, Ketua Tim Kerja Kerebahan, Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha, dan Ketua Tim Kerja Prasarana dan sarana serta anggota di bawahnya masuk kedalam jabatan fungsional tertentu maupun jabatan fungsional lainnya. Pada Laporan Moner terdapat tindak lanjut atas saran perbaikan hasil moner sebelumnya (tahun 2023), untuk rekomendasi tahun 2024 belum dilaksanakan, rencana akan dilaksanakan dalam waktu dekat (tahun anggaran 2025)
	ii.	1.00	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang					0.75	75.00%				
	a.		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien			1. Tampilan aplikasi SPB 2. Tampilan aplikasi SLAJKA 3. Matriks dampak penerapan aplikasi SPB dan SLAJKA	https://drive.google.com/drive/folders/1J6ldcyJ1P6uNcWw0bJF2z6kSL3v557r3wZ2x061kqgth2d2	A	1.00			1. Identifikasi sistem informasi pelayanan publik yang sudah reform dalam hal : a. perecapatan waktu layanan; b. efisiensi a.l. pengurangan biaya/prosedur/dapat memantau progres layanan/notifikasi dr penyedia layanan dll; dengan indikator sebelum dan sesudah. 2. Indikator terintegrasi jika pengguna layanan tidak menemui persyaratan yang berulang untuk beberapa pelayanan yang dilakukan; 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien yaitu: melalui akses integrasi dipt.kdp.go.id/ untuk layanan utama yakni SPB, STBLAK Kelatangan, SHTI, dan elogbook. Kehadiran aplikasi tersebut berdampak pada kecepatan, kemudahan, efisiensi biaya dan integrasi data antara Pusat dengan unit kerja lingkup DJPT. Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan kepuasan masyarakat. Telah dilengkapi matriks penjelasan/bukti dampak dari keberadaan aplikasi-aplikasi tersebut. Untuk SOP Kegiatan lain seperti Perijinan penggunaan Tanah dan/atau Bangunan, Penggunaan alat berat belum terintegrasi.
	b.		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien			1. SS Aplikasi Simep Jan. Des 2024 2. SS Sistem Pencanangan Ruang Rapat (Sipepura) 3. SS Aplikasi Kinerja 4. SS Aplikasi Portal KDP	https://drive.google.com/drive/folders/1J6ldcyJ1P6uNcWw0bJF2z6kSL3v557r3wZ2x061kqgth2d2	B	0.50			1. Identifikasi sistem informasi pelayanan internal (antara lain IMN/Anggaran/Pelaksanaan Tugas (Pelajaran perfin dll) yang sudah reform dalam hal : a. perecapatan waktu; b. efisiensi a.l. pengurangan prosedur/biaya/SDM; dengan indikator sebelum dan sesudah. 2. Indikator terintegrasi jika terhubung dengan aplikasi layanan internal lainnya. 3. Penilaian mengacu kriteria jawaban.	Implementasi SPBE pada pelayanan internal menggunakan aplikasi terpusat, antara lain aplikasi PORTAL, e-pengawal, e-Kinerja, dab. Kehadiran aplikasi tersebut berdampak pada kecepatan, kemudahan, dan integrasi data antara unit kerja dengan Pusat namun belum terintegrasi (parsial)
	iii.	2.00	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat					1.50	75.00%				
	a.		Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal			1. Dokumentasi Upaya Perbaikan Publik Tahun 2024 2. Matriks Transformasi Digital Administrasi	https://drive.google.com/drive/folders/1J6ldcyJ1P6uNcWw0bJF2z6kSL3v557r3wZ2x061kqgth2d2	B	0.75			1. Penilaian reform dilakukan jika unit kerja telah merumuskan rencana transformasi digital atas proses bisnis utama dengan penilaian sebagai berikut: 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Dimilai E jika rumusan rencana berupa matriks hasil identifikasi proses bisnis yang belum digital maupun digital yang akan dikembangkan lebih lanjut direkapitulasi sasaran target transformasi digital yang akan dilakukan serta manfaat/dampaknya, dan telah diakhiri oleh pimpinan unit kerja. b. Dimilai D jika matriks pada poin E terpenuhi ditambah dengan kolom kapabilitas praktikan dan pelacakan (jadwal pelang, target output, dll.) terhadap sasaran dan target manfaat/dampak; c. Dimilai C jika matriks pada poin D terpenuhi ditambah dengan kolom kemampuan merealisasikan, antara lain kemampuan SDM (operator, dll) dan dukungan anggaran untuk programmer/pengembang aplikasi dan infrastruktur; d. Dimilai B jika matriks pada poin C terpenuhi ditambah dengan kolom implementasinya (waktu pelaksanaan dan output kegiatan); e. Dimilai A jika matriks pada poin B terpenuhi ditambah dengan kolom moner dan tindak lanjut hasil moner secara berkelanjutan. Catatan: Jika satker menggunakan transformasi digital atas proses bisnis utama secara terpusat dari KKP atau Eselon I, maka satker menyimpulkan bukti dukungan berupa implementasi dan dampak dari adanya transformasi digital	Telah terdapat Matriks berupa transformasi digital atas proses bisnis utama yang memuat dampak dan manfaat dan telah disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja mencakup seluruh aplikasi yang mendukung proses bisnis utama serta dilengkapi data pendukung dokumentasi yang menggambarkan kelebihan penggunaan transformasi digital

Keterangan		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZJ	Daftar Bukti Dukungan dan Link Unit PPSNZJ	Penilaian	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZJ	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Itjen Mei 2025
	b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A/B/C/D/E	B	1. SS Aplikasi E Kinerja, E Pegawai, E Presensi, Portal KKP 2. Matriks Transformasi Digital (Portal KKP dalam hal Pengajuan Cuti)	https://drive.google.com/drive/folders/1246C8Xy0M10VdWdVNe4K8C7F7d22dIAZwXn81kgpJn6d4	C	0.50		1. Penilaian reform dilakukan jika unit kerja telah merumuskan rencana transformasi digital atas bidang administrasi pemerintahan dengan penilaian sebagai berikut: 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Dimilai E jika rumusan rencana berupa matriks hasil identifikasi proses bisnis yang belum digital maupun digital yang akan dikembangkan lebih lanjut dilampirkan sasaran target transformasi digital yang akan dilakukan serta manfaat/dampaknya, dan telah diakhiasi oleh pimpinan unit kerja; b. Dimilai D jika matriks pada poin E terpenuhi ditambah dengan kolom kapabilitas prakiraan dan pelacakan (jadwal pelanj, target output, dll) terhadap sasaran dan target manfaat/dampak; c. Dimilai C jika matriks pada poin D terpenuhi ditambah dengan kolom kemampuan merealisasikan, antara lain kemampuan SDM (operator, dll) dan dukungan anggaran untuk programmer/pengembang aplikasi dan infrastruktur; d. Dimilai B jika matriks pada poin C terpenuhi ditambah dengan kolom implementasinya (waktu pelaksanaan dan output kegiatan); e. Dimilai A jika matriks pada poin B terpenuhi ditambah dengan kolom money dan tindak lanjut hasil money secara berkelanjutan Catatan: Jika satker menggunakan transformasi digital atas bidang administrasi pemerintahan secara terpusat dari KKP atau Eselon I, maka satker menyimpulkan bukti dukung berupa implementasi dan dampak dari adanya transformasi digital	Unit kerja telah menyusun matriks transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan yang meliputi penggunaan aplikasi terpusat namun pada matriks tersebut hanya memuat Portal belum memuat aplikasi lainnya berupa Portal KKP, epresensi, epegawai, Kinerjaaku, e-kinerja, E-SAKIP namun belum dilengkapi data dukung agar ditambahkan dokumentasi yang menggambarkan kelebihan penggunaan transformasi digital dengan kondisi sebelumnya	
	c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A/B/C/D/E	B	1. SS Aplikasi Teman SPB, SLUAK, SHIT, PPP, dan SIKAKAP 2. Matriks Ujaya Transformasi yang mencakup aspek Keterampilan, Pelayaran, Kemudahan Sistem, Kecepatan Waktu Penyelesaian, Kualitas Produk Pelayanan, Kejelasan Biaya, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Kualitas Sarana, dan Penanganan Pengaduan	https://drive.google.com/drive/folders/1246C8Xy0M10VdWdVNe4K8C7F7d22dIAZwXn81kgpJn6d4	A	1.00		1. Penilaian reform dilakukan jika unit kerja telah merumuskan rencana transformasi digital pada bidang pelayanan publik dengan penilaian sebagai berikut: 2. Penilaian: a. Dimilai E jika rumusan rencana berupa matriks hasil identifikasi proses bisnis yang belum digital maupun digital yang akan dikembangkan lebih lanjut dilampirkan sasaran target transformasi digital yang akan dilakukan serta manfaat/dampaknya, dan telah diakhiasi oleh pimpinan unit kerja; b. Dimilai D jika matriks pada poin E terpenuhi ditambah dengan kolom kapabilitas prakiraan dan pelacakan (jadwal pelanj, target output, dll) terhadap sasaran dan target manfaat/dampak; c. Dimilai C jika matriks pada poin D terpenuhi ditambah dengan kolom kemampuan merealisasikan, antara lain kemampuan SDM (operator, dll) dan dukungan anggaran untuk programmer/pengembang aplikasi dan infrastruktur; d. Dimilai B jika matriks pada poin C terpenuhi ditambah dengan kolom implementasinya (waktu pelaksanaan dan output kegiatan); e. Dimilai A jika matriks pada poin B terpenuhi ditambah dengan kolom money dan tindak lanjut hasil money secara berkelanjutan Catatan: 1. Bagi unit kerja yang karakteristik pengguna jasanya tidak kondusif untuk layanan berbasis TI (gagap teknologi) atau remote area blank spot maka transformasi digital diperbolehkan dalam bentuk selain aplikasi (non TI), contohnya layanan jemput bola dengan mobil pelayanan yg standby di wilayah pengusir jawa/keliling. 2. Jika satker menggunakan transformasi digital pada bidang pelayanan publik secara terpusat dari KKP atau Eselon I, maka satker menyimpulkan bukti dukung berupa implementasi dan dampak dari adanya transformasi digital	Telah terdapat Matriks Perencanaan Transformasi Digital atas bidang pelayanan publik dan Implementasi transformasi digital atas proses bisnis utama yang memuat dampak dan manfaat untuk aplikasi yang dibangun oleh unit kerja (SIKAKAP dan super e-PTT) telah memuat sasaran target transformasi digital yang akan dilakukan, kolom kapabilitas prakiraan dan pelacakan (jadwal pelanj, target output, dll) terhadap sasaran dan target manfaat/dampak, kolom kemampuan merealisasikan, antara lain kemampuan SDM (operator, dll) dan dukungan anggaran untuk programmer/pengembang aplikasi dan infrastruktur (waktu pelaksanaan dan output kegiatan)	
3. PENYATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		5.00							3.20	64.00%			
E. Kinerja Individu		1.50						1	1.50	100.00%			
	a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya		a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)	A/B/C	A	1. SKP Pegawai atas 83 pegawai 2. Draft MPH 2024 3. Manual RKU PPS Nizam Zachman 4. PK 2024 5. PK Revisi 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1246C8Xy0M10VdWdVNe4K8C7F7d22dIAZwXn81kgpJn6d4	A	1.00		Indikator kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) dilihat dari Rencana Kinerja Individu bukan dilihat dari IKL		
B. Assessment Pegawai		1.50						1	1.50	100.00%			
	a. Hasil asesmen telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai		a. Seluruh hasil asesmen dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil asesmen belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil asesmen belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C	B	1. Undangan dan SPF Kegiatan Penkom Tugas Belajar dan lin Belajr, tgl 9 Desember 2024 2. Undan TUBel dan Bel tgl 10 Oktober 2024 3. Pakta Integritas TKR 2024 4. Penilaian TKR Semester 1 2024 5. Undangan Pelaksanaan Tes TPA dan Toefl tgl 13 Desember 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1246C8Xy0M10VdWdVNe4K8C7F7d22dIAZwXn81kgpJn6d4	A	1.00		Pelaksanaan mutasi internal dan pengembangan karir/promosi pegawai harus melalui asesmen Jika terdapat mutasi Kepala Unit Kerja maka diungkap telah dilakukan assessment oleh Es I untuk mutasi Kepala Unit Kerja Catatan : assessment dapat berupa uji kompetensi, uji penjurjangan, pemetaan/penilaian dari pihak eksternal (BKN, instansi pembina atau lembaga sejenis)		
III. Pelanggaran Disiplin Pegawai		2.00						1	0.20	10.00%			
	a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	%	100.00%	1. Dokumen BAP atas 9 pegawai pada tahun 2024 2. Dokumen Hukdis atas 10 pegawai pada tahun 2023		10.00%	0.10		Telah jelas.		
	- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya			Jumlah	0	10		10					
	- Jumlah pelanggaran tahun ini			Jumlah	0	9		9					
	- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman			Jumlah	0	0		0					
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS		5.00						1	5.00				
E. Meningkatkan capaian kinerja unit kerja		2.00						1	2.00	100.00%			
	- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih		Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	%	100.00%	1. Seluruh Target RKU Tercapai, dengan dokumen yang terlampir SS Aplikasi Kinerjaaku 2. Data Dukung TW 1 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1246C8Xy0M10VdWdVNe4K8C7F7d22dIAZwXn81kgpJn6d4	100.00%	1.00		Perhitungan Sasaran Kinerja dari aplikasi Kinerjaaku dihitung sebagai berikut : a/100% X= Sasaran Kinerja dengan nilai > 100 = Jumlah sasaran kinerja Tahun 2024 terdapat sebanyak 7 Sasaran Kinerja, yaitu: 1. Nias PMPB Sektor Perlakuan Tangkap Meningkatkan di PPS Nizam Zachman 2. Produktivitas Perlakuan Tangkap di PPS Nizam Zachman 3. Pengelolaan PPS Nizam Zachman yang Berdaya Saing 4. Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPS Nizam Zachman yang Optimal 5. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPS Nizam Zachman 6. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Efektif/efisien/efisien di PPS Nizam Zachman 7. Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan PPS Nizam Zachman Tahun 2024 terdapat sebanyak 7 Sasaran Kinerja atau seluruhnya tercapai 100% atau lebih		
	- Jumlah Sasaran Kinerja			Jumlah	7	7		7			Berdasarkan Dashboard aplikasi Kinerjaaku triwulan IV selanjutnya hitung total Sasaran Kinerja (n) yang ada		
	- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih			Jumlah	7	7		7			Berdasarkan Dashboard aplikasi Kinerjaaku triwulan IV selanjutnya Hitung jumlah Sasaran Kinerja, yang capaiannya > 100% (n)		
B. Pemberian Reward and Punishment		1.50						1	1.50	100.00%			

Keterangan		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZJ	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit PPSNZJ	Penilaian	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZJ	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Itjen Mei 2025	
	- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi		a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> d. Capaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i>	A/B/C/D	A	1. PK 2024 2. Bukti Capaian IKU TW I, II, III, dan IV 3. Laporan Kelengkapan Hasil Penilaian Reward Pegawai 4. Lembar Penilaian Individu Dukman, Kesyahbandaran, OP, TK, dan PU 2024 5. SK Reward Pegawai 6. Surat Tugas Tim Penilai 7. Dokumentasi Pemberian Reward	https://drive.google.com/drive/folders/1H1J1Zhu0l38UUDX_huWpaxv73le892agucshatua	A	1.00			1. Apresiasi atasan Unit Kerja Organisasi Eselon I kepada Unit Kerja Organisasi Eselon II/UPT melalui Surat/Memorandum yang menginformasikan terkait reward dan punishment yang dinilai dari Nilai Kinerja Organisasi atau Capaian Indikator Kinerja. 2. Apresiasi Pimpinan Unit Kerja Organisasi Unit Kerja Organisasi Eselon II/UPT kepada Tim Kerja/Pegawai Melalui Surat/Memorandum yang menginformasikan terkait reward dan punishment.	Tahun 2024: Telah dilengkapi bukti: a. Apresiasi atasan Unit Kerja Organisasi Eselon I kepada PPS Nizam Zachman melalui Surat/Memorandum yang menginformasikan terkait reward dan punishment yang dinilai dari Nilai Kinerja Organisasi atau Capaian Indikator Kinerja berupa Hasil Evaluasi Kinerja Sangat Baik periode Maret s.d Desember 2024 dari Direktur Kepelabuhanan Perikanan b. Apresiasi Pimpinan Unit Kerja Organisasi Unit Kerja Organisasi Eselon II/UPT kepada Tim Kerja/Pegawai yang dilaksanakan pada awal tahun 2025 melalui Surat/Memorandum yang menginformasikan terkait reward dan punishment Nomor: 90/PPSNZJ/KP 540/I/2025 c. Penghargaan Pelabuhan Sehat Tahun 2024 tgl 6 Desember 2024 Tahun 2025: Terdapat bukti apresiasi Pimpinan Unit Kerja PPS Nizam Zachman kepada Tim Kerja/Pegawai Melalui Keputusan Nomor: KP/TS.01/PPSNZJ/TU.440/I/2025 yang menginformasikan terkait reward dan punishment	
iii.	Kerangka Logis Kinerja	1.50	a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai d. Kerangka Logis kinerja belum ada	A/B/C/D	A	1. Pohon Kinerja DJPT 2024 2. SS Aplikasi E-Kinerja 3. Cascading Es I ke UPT PPSNZJ 4. Cascading Ka PPSNZJ ke Tim Kerja Pegawai 5. Data dukung clear (2025)	https://drive.google.com/drive/folders/1e1U3khu7aP3AKNlStu3k3a3h3V0u4t2gawebauuq	A	1.00	1.50	100.00%		1. Matrik Peran Hasil harus selaras dan dilengkapi dengan Pohon Kinerja Level I dan II Matrik Peran Hasil Telah disusun berdasarkan kerangka logis Indikator Kinerja Organisasi dan terascading ke seluruh pegawai 2. Penilaian mengacu kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. jika seluruh IKU organisasi telah ter-cascading ke seluruh pegawai dan digunakan sebagai Indikator Kinerja Individu (IKI), maka dinilai A; b. jika seluruh IKU organisasi telah ter-cascading ke seluruh pegawai namun belum digunakan sebagai Indikator Kinerja Individu (IKI), maka dinilai B; c. jika Matrik Peran Hasil organisasi s.d. individu sudah disusun namun belum mengacu IKU atasannya maka dinilai C; d. jika belum terdapat Matrik Peran Hasil organisasi s.d. individu, maka dinilai D.	Tahun 2024: Terdapat perjanjian kinerja (Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijelaskan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai, terlihat dari: 1. Pohon Kinerja DJPT Tahun 2024 2. Matriks Cascading IKU Tahun 2024 3. Matriks Peran Hasil per tim kerja Tahun 2024 4. Pohon Kinerja PPS Nizam Zachman Tahun 2024 5. SKP Pegawai pada aplikasi e-Kinerja BKN Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2024 Tahun 2025: 1. Informasi cascading Es I (DJPT) ke PPS Nizam Zachman Tahun 2025 2. Pohon Kinerja PPS Nizam Zachman Tahun 2025 3. Matriks Cascading IKU Tahun 2025 4. Matriks Peran Hasil Tahun 2025 5. SKP Pegawai pada aplikasi e-Kinerja BKN Triwulan I Tahun 2025
5. PENGUATAN PENGAWASAN		7.50							6.88	91.67%				
i.	Mekanisme Pengendalian	2.50	a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang ter sistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanisme kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang ter sistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja c. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang ter sistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak ter sistem e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi	A/B/C/D/E	B	1. MR PPSNZJ 2024	https://drive.google.com/drive/folders/17J8d9wC1JfE5tmVdQ8a5dANK_vY30XkL4v9m3729a364agudmdeci	B	0.75	1.88	75.00%		1. Reform pada pengendalian aktivitas utama organisasi yang ter sistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja secara ter sistem, dapat berupa: a. pembuatan sistem/aplikasi terpadu pengendalian aktivitas utama organisasi; b. perubahan dalam metode/cara dalam mempermudah pengendalian aktivitas utama organisasi. 2. Indikator keberhasilan reform, antara lain: a. menghasilkan peningkatan kinerja (contoh: penyerapan anggaran sesuai target, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, temuan berkurang, dll) b. mekanisme kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali (contoh: pelaporan ke unit kerja atasannya tepat waktu, sistem pengendalian tugas lapangan, dll)	Bukti dukung yang di lampirkan baru berupa MR. Agar dilengkapi bukti dukung terkait pengendalian aktivitas utama lainnya secara berjenjang mulai dari perencanaan s.d pelaporan misalnya SIKAPAP, SI JAKA, EPT, dll
ii.	Pengawasan Pengaduan Masyarakat	3.00	- Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan - Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti - Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses - Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%		Penilaian ini mengitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	https://drive.google.com/drive/folders/1J8t0Lxudm3dAP2d64t3uWVYz9p9d32ac4d3kum3u3dci		100.00%	3.00	100.00%		1. Penilaian ini mengitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan dalam aplikasi SPAN LAPOR! 2. Memastikan unit kerja telah meng input seluruh pengaduan (aspirasi, permintaan informasi, pengaduan) dalam aplikasi SPAN LAPOR! 3. Memastikan jumlah pengaduan yang terdapat dalam laporan money sama jumlahnya dengan yang ada di aplikasi SPAN LAPOR!	13 pengaduan belum dilampirkan bukti tindak lanjutnya dan 22 pengaduan tahun 2024 belum ditupit ke aplikasi LAPOR!
				Jumlah	18				52				Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti	
				Jumlah	0				0				Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses	
				Jumlah	18				52				Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti dengan status tuntas.	
iii.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	2.00	Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE Menteri PANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005 7. SE Menteri PANRB No. 2 Tahun 2023	%		1. LHKPN a.n Kalabuh, Dki Indra, Fitriana, Iwan Amarna, Iwan Mahmudi, total sebanyak 8 pegawai 2. SPT Pegawai PPSNZJ sebanyak 80 pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1a9Bd4y3u6C5TawT6Q_08J86M2Cv0a892zccal3uom6si		2.00	100.00%				
a.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	1.00							1.00					
	- Persentase penyampaian LHKPN			%	100.00%				100.00%	1.00			1. Persentase penyampaian LHKPN yang mencapai 100%.	
	- Jumlah yang harus melaporkan			Jumlah	9.00				6.00				2. Kegiatan reform yang dilakukan antara lain monitoring perkembangan penyampaian LHKPN secara real time.	
	- Kepala satuan kerja			Jumlah	1.00				1.00				Jumlah yang harus melaporkan	
	- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN			Jumlah	8.00				5.00				Kepala satuan kerja	
	- Lainnya			Jumlah	0.00				0.00				1. Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN; 2. Jangka waktu pelaporan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara (Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020).	
	- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	9.00				6.00				Pejabat Lainnya yang Ditetapkan	
b.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non LHKPN (T)	1.00							1.00				Jumlah yang sudah melaporkan	
	- Persentase penyampaian Non LHKPN			%	100.00%				100.00%	1.00			1. Persentase penyampaian SPT Tahunan yang mencapai 100%;	
									100.00%	1.00			2. Kegiatan reform yang dilakukan:	
	- Jumlah yang harus melaporkan (tidak wajib LHKPN)			Jumlah	67.00				77.00				a. Sosialisasi tata cara penyampaian LHKPN dan kelengkapan bukti dukung kepada seluruh pegawai;	
	- Pejabat administrator (eselon III)			Jumlah	0.00				0.00				b. Monitoring perkembangan penyampaian LHKPN;	
	- Pejabat Penawas (eselon IV)			Jumlah	0.00				1.00				Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)	
													Pejabat administrator	
													Pejabat Pengawas	

Keterangan		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan Jawaban Unit PPSNZJ	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit PPSNZJ	Penilaian	Nilai	%	Catatan Tim Pokja PPSNZJ	Pedoman Pengawasan Pembangunan ZI	Catatan Ijen Mei 2025
	- Jumlah Fungsional dan Pelaksanaan			Jumlah	67.00			76.00				Jumlah Fungsional dan Pelaksanaan	
	- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	67.00			77.00				Jumlah yang sudah melaporkan	
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		5.00							3.55	71.00%			
1. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik		2.50							1.88	75.00%			
	a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesenjangan Pelayanan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/ Web 7. Perilaku Pelaksana/ Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan			A/B/C/D	B	Dokumentasi atas Inovasi pada pelayanan: 1. SPB : Check Point Kapal 2. STBLAK : Check Point Kapal 3. Pas Masuk Harian & Pas Masuk Berlangganan : E Toll Gate 4. Hasil Testimoni/Review atas Inovasi Pelayanan tersebut	https://drive.google.com/drive/folders/1a14UgN8UmcKd9N9d9C4TFP9D7zsc8tHn8e8d4	A	1.00		1. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik terhadap 9 unsur meliputi: a. Kesenjangan Pelayanan b. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur c. Kecepatan Waktu Penyelesaian d. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis e. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan f. Kompetensi Pelaksana/ Web g. Perilaku Pelaksana/ Web h. Kualitas Sarana dan prasarana i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 2. Penilaian mengacu pada kriteria jawaban, dengan tambahan keterangan: a. Jika upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan unsur pelayanan publik yang prima dan memberikan dampak pada perbaikan dengan indikator antara lain : peningkatan nilai SKM, google review, tidak ada pengaduan dll, maka dinilai A; b. Jika upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan publik yang prima (30% s.d <100%) pada indikator a. s.d.i), maka dinilai B.	Dokumentasi atas Inovasi pada pelayanan: 1. Check Point Kapal 2. Super e-PTT 3. SIRKAPAK 4. Pas Masuk Harian & Pas Masuk Berlangganan : E Toll Gate 5. SIAJAK : Tambat Labuh serta dilengkapi dengan Hasil Testimoni/Review atas Inovasi Pelayanan tersebut dan infografis terkait inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik terhadap 9 unsur	
	b. Upaya dan/atau inovasi pada perjanjian/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi		Perentase diperoleh dari Jumlah perjanjian/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perjanjian/pelayanan yang terdapat/terdaftar	%	80.00%	Dokumentasi atas Inovasi pada pelayanan: 1. SPB : Check Point Kapal 2. STBLAK : Check Point Kapal 3. Pas Masuk Harian & Pas Masuk Berlangganan : E Toll Gate	https://drive.google.com/drive/folders/1a14UgN8UmcKd9N9d9C4TFP9D7zsc8tHn8e8d4	30.00%	0.50		Dinilai sebagai pelayanan yang telah dipermudah apabila telah memenuhi minimal 3 kriteria (a,b,c) berikut: a. Waktu lebih cepat; b. Pelayanan Publik yang terpadu; c. Alur lebih pendek/singkat; 4. Terintegrasi dengan aplikasi Apabila poin d tidak mampu dipenuhi agar diberikan penjelasan terkait permasalahan tersebut. Apabila berada di luar kondisi unit kerja, maka dapat dipertimbangkan sebagai jumlah perjanjian/pelayanan yang telah dipermudah.	Pelayanan yang telah dipermudah atas Inovasi yang telah dihangkan: 1. Check Point Kapal (SPB dan STBLAK) 2. Super e-PTT (SPB dan STBLAK) 3. SIRKAPAK (SHTT) 4. E Toll Gate: Pas Masuk Harian & Pas Masuk Berlangganan 5. SIAJAK : Tambat Labuh serta dilengkapi dengan Hasil Testimoni/Review atas Inovasi Pelayanan tersebut dan infografis terkait inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik terhadap 9 unsur	
	- Jumlah perjanjian/pelayanan yang terdapat/terdaftar			Jumlah	10			10					
	- Jumlah perjanjian/pelayanan yang telah dipermudah			Jumlah	8			5					
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi		2.50							1.68	67.00%			
	a. Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab			A/B/C/D	B	1. SOP Pengaduan 2. Laporan Pengaduan TW I, II, III, dan IV 2024 3. Status dan Matriks Laporan Pengaduan	https://drive.google.com/drive/folders/1a14UgN8UmcKd9N9d9C4TFP9D7zsc8tHn8e8d4	B	0.67		1. Dalam mengukur tingkat responsif pengaduan dengan membandingkan penyelesaian/tindak lanjut/ respon atas konsultasi/pengaduan pelayanan dengan SOP yang ditetapkan pada unit kerja, yaitu: a. Permintaan informasi harus ditindaklanjuti maksimal 5 hari kerja; b. Pengaduan tidak berakad pengawasan maksimal 14 hari kerja; c. Pengaduan berakad pengawasan maksimal 60 hari kerja; 2. Saluran pengaduan dan konsultasi meliputi berbagai media, termasuk saluran resmi yang ditetapkan dalam Permen KP Nomor 56 Tahun 2020; 3. Apabila unit kerja memiliki saluran pengaduan pelayanan tersendiri/di luar saluran resmi, maka harus diintegrasikan dengan saluran resmi (LAPOR).	Seluruh konsultasi atau pengaduan yang masuk ke SPAN-LAPORI telah ditindaklanjuti hingga selesai namun belum dilakukan pada laporan terkait laju verifikasi dan laju tindak lanjut terhadap pengaduan yang masuk	
TOTAL PENGUNGKIT											51.55		
B. HASIL											37.39	93.48%	
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL											20.73	92.11%	
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)												
	17.50	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	Nilai (0-4)	3.80	Telah dilakukan survey persepsi anti korupsi pada 5 - 7 Agustus 2024 kepada 39 pengguna jasa diperoleh nilai indeks persepsi anti korupsi sebesar 3,85	https://drive.google.com/drive/folders/1U1U1Q3S8MgMgSg1LgGBAdrd1H1D7Dxhc	3.88	16.98		Unit kerja melakukan survei mandiri SPAK dan SPKP menggunakan kuesioner survei sesuai kaidah yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahun (bagasi contoh untuk Tahun 2023 mengacu Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 4 Tahun 2023) Jumlah responden minimal sebanyak 30 responden untuk seluruh jenis layanan. Apabila jumlah pengguna jasa yang dimiliki <30 responden, dapat ditambahkan dari jumlah pengguna jasa layanan yang berafit administratif/koordinatif lintas instansi. Contoh: Terkait layanan konservasi pada BPSP, bekerjasama dengan Balai Konservasi Alam, layanan perputakaan/permintaan data untuk penelitian/tugas akhir mahasiswa, layanan magang, layanan kerjasama dengan instansi lain, dll.	Telah dilakukan survei persepsi anti korupsi pada Februari-Mei 2025 kepada 116 pengguna jasa diperoleh nilai indeks persepsi anti korupsi sebesar 3.88		
	b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebel			A/B/C/D/E	B	LKJ Tahunan 2023 dan 2024							
	5.00	a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis; b.Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; c.Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja utama yang tidak tercapai; e. Kinerja utama tidak berorientasi hasil						B	3.75		Dasar pemberian nilai berdasarkan data dan informasi dalam LKJ tahunan unit kerja terkait substitusi perbandingan capaian kinerja utama tahun sebelumnya, capaian kinerja nasional, dan capaian kinerja unit yang sejenis Note : Apabila terdapat perubahan IKU (baru/hilang/berubah cara pengukuran) maka tidak bisa dibandingkan, maka yang dibandingkan adalah capaian akhir tahun yang dinilai dengan capaian tahun sebelumnya khusus terhadap IKU yang sama. Dokumen data diikut berupa LKJ Tahunan IAD B tentang capaian kinerja dan aplikasi kerjanya. Jika seluruh IKU pada Sarker tidak mengalami perubahan maka dimungkinkan untuk menggunakan nilai NPSS	Tahun 2023 NPSS 116,12% Tahun 2024 NPSS 116,52%	
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA											16.67	95.25%	
	17.50	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	Nilai (0-4)	3.75	Telah dilakukan survey persepsi kualitas pelayanan pada tanggal 5 - 7 Agustus 2024 kepada 39 pengguna jasa diperoleh nilai indeks persepsi kualitas pelayanan publik sebesar 3,78	https://drive.google.com/drive/folders/1U1U1Q3S8MgMgSg1LgGBAdrd1H1D7Dxhc	3.81	16.67		Unit kerja melakukan survei mandiri SPAK dan SPKP menggunakan kuesioner survei sesuai kaidah yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahun (bagasi contoh untuk Tahun 2023 mengacu Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 4 Tahun 2023) Jumlah responden minimal sebanyak 30 responden untuk seluruh jenis layanan. Apabila jumlah pengguna jasa yang dimiliki <30 responden, dapat ditambahkan dari jumlah pengguna jasa layanan yang berafit administratif/koordinatif lintas instansi. Contoh: Terkait layanan konservasi pada BPSP, bekerjasama dengan Balai Konservasi Alam, layanan perputakaan/permintaan data untuk penelitian/tugas akhir mahasiswa, layanan magang, layanan kerjasama dengan instansi lain, dll.	Telah dilakukan survey kualitas pelayanan pada Februari-Mei 2025 kepada 116 pengguna jasa diperoleh nilai indeks persepsi kualitas pelayanan sebesar 3.81		
TOTAL HASIL											37.39		
NILAI HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS											88.95		

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR 54/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan PPS Nizam Zachman Jakarta
Dari : Kepala Sub Bagian Umum
Hal : Capaian IKU Tingkat Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2025
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 13 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Pelabuhan Nomor 27/PPSNZJ/RC.610/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta” Triwulan IV 2025 yaitu :

Triwulanan 2025	Target IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (%)	Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (%)	Persentase Capaian (%)
Triwulan I	85	100	117,6
Triwulan II	85	100	117,6
Triwulan III	85	100	117,6
Triwulan IV	85	95,83	112,7

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Mohamad Yusuf Santoso

Lampiran

Nomor : 54/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

Rekapitulasi Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025

No	Satker	Jumlah LHP	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi Tuntas Ditindaklanjuti	Sisa Rekomendasi Belum Tuntas	%
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	1	3	3	-	100,00%
2	DIT KAPI	2	7	7	-	100,00%
3	DIT PDK	1	5	5	-	100,00%
4	DIT PP	17	97	81	16	83,51%
5	DIT PPN	1	2	-	2	0,00%
6	DIT PSDI	3	45	42	3	93,33%
7	DKP Prov Riau	1	4	-	4	0,00%
8	PPN KEJAWANAN	1	3	3	-	100,00%
9	PPS BELAWAN	1	2	2	-	100,00%
10	PPS NIZAM ZACHMAN	1	24	23	1	95,83%
11	SEKRETARIAT DJPT	23	87	79	8	90,80%
	Grand Total	52	279	245	34	87,81%

Screenshoot Aplikasi SIDAK Itjen KKP

The screenshot displays the SIDAK Itjen KKP application interface. The sidebar on the left contains navigation links: PENGAWASAN, BERANDA, MANAGE TLHP, and TUTORIAL. The main content area shows a summary of findings (Jumlah Temuan: 6, Jumlah Rekomendasi: 24, Nilai Keuangan: Rp0.00, Nilai Setoran Ke Kas Negara: Rp0.00, Prosentase Tindak Lanjut: 95.83%). Below this, there is a table of findings with columns: ID, Judul Temuan, I Rekomendasi, % Tindak Lanjut, Status, and Aksi. The table lists 6 findings, with statuses ranging from TUNTAS to PROSES. The bottom of the screen shows 'Showing 1 to 6 of 6 entries' and navigation buttons for Previous and Next.

ID	Judul Temuan	I Rekomendasi	% Tindak Lanjut	Status	Aksi
13001	Pengawasan PNBSP Tambat Labuh Kapal Non Perikanan Penunjang Kegiatan Kapal Perikanan Belum Optimal	3	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
13002	Pelaksanaan Pengawasan PNBSP SDA Perikanan Berupa Pengutan Hasil Perikanan Pascaproduksi Belum Memadai	5	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
13003	Pengawasan PNBSP Pelayanan Kibersihkan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Tidak Sesuai Ketentuan	7	85.71	PROSES	Kelola Temuan
13004	Belum Terdapat Rencana Aksi penyelesaian PVMHD atas kapal yang tidak beroperasi di Kolam PPS Nizam Zachman	4	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
13005	Pelaksanaan Pengawasan PNBSP Jasa Sewa Kendaraan Belum Sesuai Ketentuan	4	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
13006	Hal Lain-lain yang Perlu Mendapat Perhatian Kausul Sanksi Administratif Denda PNBSP dalam Persewaan Penggunaan BMN oleh Pihak Lain Tidak Sesuai Ketentuan	1	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR 58/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan PPS Nizam Zachman Jakarta
Dari : Kepala Sub Bagian Umum
Hal : Capaian IKU Nilai PM SAKIP PPS Nizam Zachman Jakarta
(Nilai) 2025
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 13 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Pelabuhan Nomor 27/PPSNZJ/RC.610/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini disampaikan Capaian IKU "Nilai PM SAKIP PPS Nizam Zachman Jakarta (Nilai) 2025" yaitu 88,4 (Nilai) dengan rincian sebagaimana Lampiran.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mohamad Yusuf Santoso

LKE PM SAKIP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot(%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	14.50	25.80
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	11.50	27.60
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	6.25	12.75
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	12.25	22.25
	TOTAL	100.00	44.50	88.40
	PREDIKAT		C	A

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot(%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.80	86.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	6.00	100.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	6.30	70.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	13.50	90.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	27.60	92.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	6.00	100.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	8.10	90.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	13.50	90.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.75	85.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	4.05	90.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	22.25	89.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	5.00	100.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	11.25	90.00%

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 2424/DJPT.1/RC.610/IX/2025

Yth. : 1. Para Direktur lingkup DJPT
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPT
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (PM SAKIP) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
Tahun 2025
Lampiran : -
Tanggal : 29 September 2025

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja sekaligus sebagai sarana pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembahasan lanjutan PM SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025 telah dilaksanakan melalui Forum Pengelolaan Kinerja pada tanggal 17 s.d. 19 September 2025. Penilaian mandiri dimaksud bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan di setiap unit kerja, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan konsisten dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan;
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP untuk seluruh unit kerja instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
3. Dalam rangka evaluasi SAKIP tersebut, telah dilakukan pembahasan lanjutan, serta verifikasi Penilaian Mandiri (PM) SAKIP pada 6 satker Pusat dan 23 satker UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap melalui pendampingan Tim Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil verifikasi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Satker	Komponen				Nilai	Predikat
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal		
1	Sekretariat	27,60	26,10	12,15	23,00	88,85	A
2	Dit. PSDI	27,60	26,10	13,80	23,00	90,50	AA
3	Dit. KAPI	30,00	30,00	15,00	21,25	96,25	AA
4	Dit. KP	27,60	27,00	13,80	23,00	91,40	AA
5	Dit. UPI	27,60	27,60	12,60	22,50	90,30	AA
6	Dit. PPN	27,60	27,60	11,85	22,50	89,55	A
7	BBPI Semarang	24,60	27,60	13,80	23,00	89,00	A
8	PPS Nizam Zachman	25,80	27,60	12,75	22,25	88,40	A
9	PPS Kendari	27,60	24,60	12,30	24,25	88,75	A
10	PPS Cilacap	30,00	30,00	15,00	25,00	100	AA
11	PPS Bungus	27,00	27,00	13,50	22,50	90,00	A
12	PPS Belawan	25,50	25,50	14,25	23,00	88,25	A
13	PPS Bitung	27,60	26,10	13,05	21,75	88,50	A
14	PPN Ambon	27,00	27,00	12,00	22,50	88,50	A
15	PPN Palabuhanratu	27,60	27,60	13,80	20,50	89,50	A
16	PPN Ternate	27,60	26,10	13,05	22,50	89,50	A
17	PPN Prigi	26,70	27,60	13,80	20,50	88,60	A
18	PPN Pemangkat	25,80	27,60	13,80	22,50	89,70	A
19	PPN Sibolga	27,60	24,00	13,80	23,00	88,40	A
20	PPN Tual	27,60	27,60	12,60	21,00	88,80	A
21	PPN Kejawanan	27,60	26,70	12,60	21,75	88,65	A
22	PPN Pekalongan	26,10	26,10	13,80	23,00	89,00	A
23	PPN Brondong	27,60	27,60	13,50	20,50	89,20	A
24	PPN Tanjung Pandan	27,60	27,60	13,80	20,50	89,50	A
25	PPN Sungailiat	26,70	27,00	12,60	22,00	88,30	A
26	PPN Pengambangan	27,60	27,60	13,50	20,00	88,70	A
27	PPN Karangantu	27,60	27,60	13,80	20,75	89,75	A
28	PPN Kwandang	25,80	27,60	13,35	22,50	89,25	A
29	PPP Teluk Batang	27,60	27,00	13,50	21,75	89,85	A

Rincian hasil verifikasi PM SAKIP seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dapat dilihat pada tautan <https://bit.ly/LampiranPMSAKIPDJPT2025>.

4. Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Seluruh satker telah memiliki dokumen perencanaan kinerja dan telah dipertahankan setidaknya dalam lima tahun terakhir. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu disusun untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound* (SMART) dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat kekurangan berupa dokumen Rencana Strategis Ditjen Perikanan Tangkap periode 2025-2029 yang masih dalam bentuk rancangan (draft) serta perlu penyempurnaan pada pohon kinerja dengan memberikan informasi hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang (crosscutting). Di beberapa satker sudah terdapat upaya yang patut dihargai dalam

pemenuhan capaian perencanaan kinerja dan upaya inovatif serta layak menjadi percontohan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan yang didukung oleh manual IK sebagai pedoman pengukuran kinerja. Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, serta dijadikan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment pada seluruh satker. Namun masih terdapat hasil pengukuran capaian dan evaluasi rencana aksi belum dilakukan secara mendalam terutama pada pengungkapan progress, hambatan dan rekomendasi.

c. Pelaporan Kinerja

Seluruh satker telah memiliki laporan yang menggambarkan kinerjanya dan setidaknya dipertahankan dalam lima tahun terakhir. Dokumen Laporan Kinerja (LKj) telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Perlu didorong pemanfaatan data laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi/kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja berikutnya.

d. Evaluasi Kinerja Internal

Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berkualitas dengan sumber daya memadai melalui penggunaan teknologi informasi berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi Kinerjaku. Pedoman evaluasi AKIP internal Ditjen Perikanan Tangkap juga telah disusun dan telah dilakukan evaluasi AKIP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap direkomendasikan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan implementasi SAKIP berupa:

- a. Menyampaikan tanggapan/saran/masukan terkait perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap periode 2025-2029, melalui identifikasi permasalahan serta usulan program/rencana kerja pada setiap satker;
- b. Identifikasi pelaksanaan inovasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas serta berdampak pada pencapaian kinerja; dan
- c. Melakukan sosialisasi informasi pengukuran kinerja secara berkala dan berkelanjutan kepada seluruh pegawai.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut diharapkan dapat kami terima paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat ini diterima.

Atas perhatian dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Inspektur Jenderal KKP c.q. Inspektur II
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR 68/PPSNZJ/RC.610/II/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan PPS Nizam Zachman Jakarta
Dari : Kepala Sub Bagian Umum
Hal : Capaian IKU IPASN PPS Nizam Zachman Jakarta Semester II
 Tahun 2025
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 14 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Pelabuhan Nomor
27/PPSNZJ/RC.610/II/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian
Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV
Tahun 2025, bersama ini disampaikan Capaian IKU IPASN PPS Nizam Zachman
Jakarta Semester II Tahun 2025 sebesar 85,19 (indeks) dengan rincian sebagaimana
Lampiran.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Mohamad Yusuf Santoso

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR : 69 /DJPT.1/TU.140/I/2026

Yth : 1. Direktur Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
2. Ketua Tim Kerja Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama IP ASN Semester II
Tahun 2025 lingkup DJPT
Tanggal : 9 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor : 8/SJ.3/TU.210/I/2026 tanggal 4 Januari 2026 tentang Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Triwulan IV/Semester II Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, berdasarkan hasil closing pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 31 Desember 2025 yaitu **88,4 (Kategori Tinggi)** terdiri dari **Kualifikasi 22,7 Kompetensi 33.59, Kinerja 26,76 dan Disiplin 4,99**, sehingga capaian sudah melebihi target dari Semester I Tahun 2025 sebesar 84.00.
2. Upaya Optimalisasi dapat diperkuat pada dimensi Kompetensi atau Diklat dan updating data disiplin pegawai pada aplikasi I-Dis BKN pada Semester I Tahun 2026 dengan target Semester I Tahun 2026 sebesar 77. IP ASN memiliki 4 (empat) dimensi pengukuran yaitu : kualifikasi (bobot 25), Kompetensi (bobot 40), Kinerja (bobot 30) dan Disiplin (bobot 5).
3. Melakukan peremajaan dan *updating* data kompetensi pegawai ASN pada Aplikasi MyASN masing masing pegawai diperlukan sebagai salah satu dimensi yang mempengaruhi nilai capaian IP ASN ,terdapat perubahan perhitungan komponen diklat 20 JP yang dihitung secara proporsional pada saat pegawai melakukan *update* data pada **Riwayat Sertifikasi** di menu “kursus” dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi yang dapat mempengaruhi nilai IP ASN.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan Mulyana

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran I
 Nomor : 69/DJPT.1/TU.140/I/2026
 Tanggal : 9 Januari 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	91	22.86	91.44 %	29.63	74.08 %	25.44	84.8 %	4.97	99.4 %	82.9	TINGGI
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN	54	22.59	90.36 %	29.99	74.97 %	25.56	85.2 %	4.94	98.8 %	83.08	TINGGI
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	65	23.69	94.76 %	30.47	76.17 %	27.46	91.53 %	5	100 %	86.62	TINGGI
4	DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN	69	23.41	93.64 %	30.85	77.13 %	25.58	85.27 %	5	100 %	84.84	TINGGI
5	DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN	35	22.86	91.44 %	31.06	77.65 %	26.43	88.1 %	4.91	98.2 %	85.26	TINGGI
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	71	22.89	91.56 %	33.85	84.63 %	26.69	88.97 %	5	100 %	88.42	TINGGI
7	DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN	37	23.51	94.04 %	26.7	66.75 %	26.22	87.4 %	4.92	98.4 %	81.34	TINGGI
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA	82	22.87	91.48 %	30	75 %	27.32	91.07 %	5	100 %	85.19	TINGGI
9	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	67	23.28	93.12 %	34.71	86.78 %	27.24	90.8 %	5	100 %	90.24	TINGGI
10	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	77	22.27	89.08 %	36.42	91.05 %	27.01	90.03 %	5	100 %	90.71	TINGGI
11	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	49	22.14	88.56 %	34.89	87.22 %	27.35	91.17 %	5	100 %	89.38	TINGGI
12	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	67	22.09	88.36 %	33.28	83.2 %	27.69	92.3 %	5	100 %	88.05	TINGGI
13	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	49	23.67	94.68 %	33.79	84.47 %	26.63	88.77 %	5	100 %	89.09	TINGGI
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	55	22.64	90.56 %	35.39	88.48 %	27	90 %	5	100 %	90.03	TINGGI
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU	54	22.31	89.24 %	36.79	91.97 %	27.59	91.97 %	5	100 %	91.7	SANGAT TINGGI

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	44	22.73	90.92 %	35.33	88.33 %	26.25	87.5 %	5	100 %	89.31	TINGGI
17	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	61	22.3	89.2 %	36.16	90.4 %	27.38	91.27 %	5	100 %	90.84	TINGGI
18	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	44	22.16	88.64 %	35.45	88.63 %	25.45	84.83 %	5	100 %	88.07	TINGGI
19	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	58	22.41	89.64 %	32.66	81.65 %	27.5	91.67 %	5	100 %	87.58	TINGGI
20	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	38	22.5	90 %	32.06	80.15 %	27.24	90.8 %	5	100 %	86.8	TINGGI
21	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	61	21.97	87.88 %	36.59	91.48 %	27.21	90.7 %	5	100 %	90.77	TINGGI
22	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	65	22.62	90.48 %	35.67	89.18 %	27.38	91.27 %	5	100 %	90.67	TINGGI
23	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	60	22.5	90 %	37	92.5 %	27.17	90.57 %	5	100 %	91.67	SANGAT TINGGI
24	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	48	22.6	90.4 %	33.95	84.88 %	25.73	85.77 %	5	100 %	87.29	TINGGI
25	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	37	22.43	89.72 %	35.46	88.65 %	25.81	86.03 %	5	100 %	88.7	TINGGI
26	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	52	22.6	90.4 %	35.35	88.38 %	27.5	91.67 %	5	100 %	90.45	TINGGI
27	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	39	23.08	92.32 %	33.64	84.1 %	27.31	91.03 %	5	100 %	89.03	TINGGI
28	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	26	22.88	91.52 %	34.67	86.67 %	25.58	85.27 %	5	100 %	88.13	TINGGI
29	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	26	22.12	88.48 %	33.83	84.58 %	25.38	84.6 %	5	100 %	86.33	TINGGI

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR 67/PPSNZJ/RC.610/II/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan PPS Nizam Zachman Jakarta
Dari : Kepala Sub Bagian Umum
Hal : Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 14 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Pelabuhan Nomor 27/PPSNZJ/RC.610/II/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini disampaikan Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025 yaitu 100% dengan rincian sebagaimana Lampiran.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Mohamad Yusuf Santoso

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 13 Januari 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 149 Satuan kerja (satker) pengelola DIPA Aktif Tahun Anggaran 2025 yang tersebar di 9 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 11 Januari 2026 pukul 23:59 WIB, dan dilanjutkan dengan OLAP (*Online Analytical Processing*) dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak akses terakhir inputan data pada SIRUP selesai dilakukan oleh satuan kerja. Dari hasil perhitungan dan olah data, dapat disampaikan secara keseluruhan satuan kerja lingkup KKP telah mencapai persentase RUP Terumumkan 100,00% pada periode penilaian capaian IKU Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 4 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode E1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 4	% Capaian Target IKU TW 4	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
01	Sekretariat Jenderal	3	357,549,859,996	448,763,141,996	91,213,282,000	Sesuai	76.00%	91.19%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	3,868,642,000	3,868,642,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	3,092,504,918,600	3,092,504,918,600	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,461,299,259,718	1,461,299,259,718	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	1,404,052,006,574	1,404,052,006,574	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	62,082,313,281	62,082,313,281	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	2,377,171,057,536	2,377,171,057,536	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	208,693,653,108	208,693,653,108	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	100,936,435,522	100,936,435,522	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
TOTAL		149	9,068,158,146,335	9,159,371,428,335	91,213,282,000			99.02%	



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 4 TAHUN ANGGARAN 2025 PER SATUAN KERJA

Sekretariat Jenderal

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9,069,898,000	-	9,069,898,000			9,069,898,000	9,069,898,000	0	100.00%
2	BIRO UMUM dan PBJ SETJEN KKP	422,159,781,996	14,006,635,000	436,166,416,996			344,953,134,996	344,953,134,996	91,213,282,000	126.44%
3	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,526,827,000		3,526,827,000			3,526,827,000	3,526,827,000	0	100.00%
TOTAL		434,756,506,996	14,006,635,000	448,763,141,996	-	-		357,549,859,996	91,213,282,000	108.81%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN 91.19%	

Inspektorat Jenderal

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	INSPEKTORAT JENDERAL	3,868,642,000	-	3,868,642,000			3,868,642,000	3,868,642,000	0	100.00%
TOTAL		3,868,642,000	-	3,868,642,000	-	-		3,868,642,000	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN 100.00%	

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,654,763,000	450,642,000	5,105,405,000		109,857,000	4,995,548,000	5,105,405,000	0	100.00%
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	2,500,368,000	1,726,822,000	4,227,190,000		173,053,000	4,054,137,000	4,227,190,000	0	100.00%
3	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	6,299,090,000	-	6,299,090,000		208,227,000	6,090,863,000	6,299,090,000	0	100.00%
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	5,026,187,000	-	5,026,187,000		216,547,000	4,809,640,000	5,026,187,000	0	100.00%
5	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	463,513,809,000	-	463,513,809,000		457,069,402,000	6,444,407,000	463,513,809,000	0	100.00%
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	4,000,680,000	-	4,000,680,000		269,268,000	3,731,412,000	4,000,680,000	0	100.00%
7	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	3,066,333,000	-	3,066,333,000		107,070,000	2,959,263,000	3,066,333,000	0	100.00%
8	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	4,391,089,000	-	4,391,089,000		686,480,000	3,704,609,000	4,391,089,000	0	100.00%
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,338,592,000	-	2,338,592,000		44,900,000	2,293,692,000	2,338,592,000	0	100.00%
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,160,369,582,000	-	1,160,369,582,000		1,156,224,800,000	4,144,782,000	1,160,369,582,000	0	100.00%
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	3,096,535,000	-	3,096,535,000		143,086,000	2,953,449,000	3,096,535,000	0	100.00%
12	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2,174,331,000	2,026,728,000	4,201,059,000		149,001,000	4,052,058,000	4,201,059,000	0	100.00%
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	2,103,023,000	6,400,000	2,109,423,000		7,744,000	2,101,679,000	2,109,423,000	0	100.00%
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,017,529,000	2,082,335,000	3,099,864,000		201,385,000	2,898,479,000	3,099,864,000	0	100.00%
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	4,871,854,000	-	4,871,854,000		611,181,000	4,260,673,000	4,871,854,000	0	100.00%
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	3,309,753,000	51,637,000	3,361,390,000		40,946,000	3,320,444,000	3,361,390,000	0	100.00%
17	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,956,661,000	-	2,956,661,000		56,249,000	2,900,412,000	2,956,661,000	0	100.00%
18	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	3,045,920,000	2,346,994,000	5,392,914,000		444,154,000	4,948,760,000	5,392,914,000	0	100.00%
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	61,243,950,000	31,000,000	61,274,950,000		55,630,617,000	5,644,333,000	61,274,950,000	0	100.00%
20	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	2,358,509,000	-	2,358,509,000		0	2,358,509,000	2,358,509,000	0	100.00%
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	6,382,333,600	-	6,382,333,600		548,134,000	5,834,199,600	6,382,333,600	0	100.00%
22	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	38,627,180,000	-	38,627,180,000		31,472,039,000	7,155,141,000	38,627,180,000	0	100.00%
23	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	20,507,865,000	-	20,507,865,000		3,614,615,000	16,893,250,000	20,507,865,000	0	100.00%
24	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1,259,136,398,836	16,790,025,164	1,275,926,424,000		1,252,038,840,210	23,887,583,790	1,275,926,424,000	0	100.00%
TOTAL		3,066,992,335,436	25,512,583,164	3,092,504,918,600	-	2,960,067,595,210	132,437,323,390	3,092,504,918,600	-	100.0000%

FORM

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	14,153,419,615	118,921,000	14,272,340,615		6,523,696,615	7,748,644,000	14,272,340,615	0	100.00%
2	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	23,779,406,000	-	23,779,406,000		18,389,599,000	5,389,807,000	23,779,406,000	0	100.00%
3	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	14,509,226,000	1,101,106,000	15,610,332,000		11,268,723,000	4,341,609,000	15,610,332,000	0	100.00%
4	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	42,758,045,000	11,655,239,000	54,413,284,000		24,328,660,000	30,084,624,000	54,413,284,000	0	100.00%
5	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	4,388,427,000	-	4,388,427,000		1,128,953,000	3,259,474,000	4,388,427,000	0	100.00%
6	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	17,324,561,000	7,151,046,000	24,475,607,000		5,342,752,000	19,132,855,000	24,475,607,000	0	100.00%
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	10,819,324,000	976,321,000	11,795,645,000		6,766,620,000	5,029,025,000	11,795,645,000	0	100.00%
8	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	9,244,294,000	-	9,244,294,000		5,564,366,000	3,679,928,000	9,244,294,000	0	100.00%
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	6,885,546,000	3,379,211,000	10,264,757,000		7,134,462,000	3,130,295,000	10,264,757,000	0	100.00%
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	9,742,232,000	5,638,145,000	15,380,377,000		10,457,450,000	4,922,927,000	15,380,377,000	0	100.00%
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	5,054,907,000	2,061,297,000	7,116,204,000		5,387,502,000	1,728,702,000	7,116,204,000	0	100.00%
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	9,787,646,000	4,338,000	9,791,984,000		6,646,293,000	3,145,691,000	9,791,984,000	0	100.00%
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	4,507,731,000	4,183,662,000	8,691,393,000		4,424,860,000	4,266,533,000	8,691,393,000	0	100.00%
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	5,293,648,000	2,703,818,000	7,997,466,000		6,797,648,000	1,199,818,000	7,997,466,000	0	100.00%
15	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	3,761,994,000	1,942,249,000	5,704,243,000		2,157,558,000	3,546,685,000	5,704,243,000	0	100.00%
16	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	1,236,302,182,103	2,071,318,000	1,238,373,500,103		1,218,838,384,103	19,535,116,000	1,238,373,500,103	0	100.00%
TOTAL		1,418,312,588,718	42,986,671,000	1,461,299,259,718	-	1,341,157,526,718	120,141,733,000	1,461,299,259,718	-	100.00%

FORMULA PERHITUNGAN

Note :

= (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100%

= (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

NILAI CAPAIAN INDIKATOR menjadi

100.00%

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	29,445,819,000	-	29,445,819,000		25,192,451,000	4,253,368,000	29,445,819,000	0	100.00%
2	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	12,662,396,999	-	12,662,396,999		7,770,543,000	4,891,853,999	12,662,396,999	0	100.00%
3	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	21,896,368,000	-	21,896,368,000		16,792,289,000	5,104,079,000	21,896,368,000	0	100.00%
4	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	17,612,902,000	-	17,612,902,000		13,374,397,000	4,238,505,000	17,612,902,000	0	100.00%
5	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	19,452,293,500	-	19,452,293,500		17,312,873,500	2,139,420,000	19,452,293,500	0	100.00%
6	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	16,739,797,500	-	16,739,797,500		14,367,938,500	2,371,859,000	16,739,797,500	0	100.00%
7	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP	1,202,705,796,575	-	1,202,705,796,575		1,191,786,130,000	10,919,666,575	1,202,705,796,575	0	100.00%
8	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	14,929,268,000	-	14,929,268,000		11,918,715,000	3,010,553,000	14,929,268,000	0	100.00%
9	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,169,047,000	-	18,169,047,000		15,535,927,000	2,633,120,000	18,169,047,000	0	100.00%
10	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,104,332,000	-	9,104,332,000		7,403,801,000	1,700,531,000	9,104,332,000	0	100.00%
11	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	9,355,502,000	-	9,355,502,000		7,660,581,000	1,694,921,000	9,355,502,000	0	100.00%
12	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	6,463,175,000	-	6,463,175,000		3,524,502,000	2,938,673,000	6,463,175,000	0	100.00%
13	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	9,899,835,000	-	9,899,835,000		8,610,962,000	1,288,873,000	9,899,835,000	0	100.00%
14	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	8,415,150,000	-	8,415,150,000		7,097,827,000	1,317,323,000	8,415,150,000	0	100.00%
15	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	7,200,324,000	-	7,200,324,000		4,931,464,000	2,268,860,000	7,200,324,000	0	100.00%
TOTAL		1,404,052,006,574	-	1,404,052,006,574	-	1,353,280,401,000	50,771,605,574	1,404,052,006,574	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								
		NILAI CAPAIAN INDIKATOR menjadi 100.00%								

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,499,025,000	-	13,499,025,000	5,947,202,000		7,551,823,000	13,499,025,000	0	100.00%
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KP	48,583,288,281	-	48,583,288,281	36,065,535,000		12,517,753,281	48,583,288,281	0	100.00%
TOTAL		62,082,313,281	-	62,082,313,281	42,012,737,000	-	20,069,576,281	62,082,313,281	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								
		NILAI CAPAIAN INDIKATOR 100.00%								

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	815,181,000	1,030,758,000	1,845,939,000	576,115,000		1,269,824,000	1,845,939,000	0	100.00%
2	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	2,534,284,000	-	2,534,284,000	-		2,534,284,000	2,534,284,000	0	100.00%
3	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	6,063,515,000	-	6,063,515,000			6,063,515,000	6,063,515,000	0	100.00%
4	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	114,882,000	-	114,882,000	-		114,882,000	114,882,000	0	100.00%
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	630,829,000	1,492,437,000	2,123,266,000	47,589,000		2,075,677,000	2,123,266,000	0	100.00%
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	3,716,863,000	5,714,647,000	9,431,510,000	5,753,200,000		3,678,310,000	9,431,510,000	0	100.00%
7	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	2,313,249,000	-	2,313,249,000	289,374,000		2,023,875,000	2,313,249,000	0	100.00%
8	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	2,124,597,000	-	2,124,597,000	276,203,000		1,848,394,000	2,124,597,000	0	100.00%
9	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	19,799,969,000	-	19,799,969,000	16,630,596,000		3,169,373,000	19,799,969,000	0	100.00%
10	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	1,453,775,000	-	1,453,775,000			1,453,775,000	1,453,775,000	0	100.00%
11	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS BRBIH	2,579,025,000	-	2,579,025,000			2,579,025,000	2,579,025,000	0	100.00%
12	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN BRPI	3,697,213,000	-	3,697,213,000			3,697,213,000	3,697,213,000	0	100.00%
13	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	2,085,628,000	-	2,085,628,000			2,085,628,000	2,085,628,000	0	100.00%
14	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,756,209,000	197,855,000	7,954,064,000	1,611,115,000		6,342,949,000	7,954,064,000	0	100.00%
15	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,935,402,000	-	4,935,402,000	-		4,935,402,000	4,935,402,000	0	100.00%
16	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	904,514,000	-	904,514,000			904,514,000	904,514,000	0	100.00%
17	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,671,292,000	543,937,000	6,215,229,000	-		6,215,229,000	6,215,229,000	0	100.00%
18	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN LPTK	219,049,000	1,237,094,000	1,456,143,000			1,456,143,000	1,456,143,000	0	100.00%
19	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT LRBR	1,223,254,000	74,096,000	1,297,350,000			1,297,350,000	1,297,350,000	0	100.00%
20	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	442,411,000	483,225,000	925,636,000			925,636,000	925,636,000	0	100.00%
21	LOKA RISET PERIKANAN TUNA LRPT	1,941,830,000	-	1,941,830,000			1,941,830,000	1,941,830,000	0	100.00%
22	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR LRSDKP	1,035,654,000	1,053,546,000	2,089,200,000			2,089,200,000	2,089,200,000	0	100.00%
23	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	15,571,107,000	-	15,571,107,000	5,777,684,000		9,793,423,000	15,571,107,000	0	100.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,209,869,000	-	2,209,869,000	1,086,997,000		1,122,872,000	2,209,869,000	0	100.00%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	1,538,411,000	3,197,761,000	4,736,172,000	1,451,020,000		3,285,152,000	4,736,172,000	0	100.00%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	2,539,286,000	2,389,850,000	4,929,136,000	3,316,996,000		1,612,140,000	4,929,136,000	0	100.00%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	711,207,000	1,923,054,000	2,634,261,000	1,156,133,000		1,478,128,000	2,634,261,000	0	100.00%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	27,426,832,644	-	27,426,832,644	24,892,476,044		2,534,356,600	27,426,832,644	0	100.00%
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	799,005,000	2,064,944,000	2,863,949,000	530,979,000		2,332,970,000	2,863,949,000	0	100.00%
30	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	1,438,446,000	-	1,438,446,000	220,898,000		1,217,548,000	1,438,446,000	0	100.00%
31	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	9,709,402,000	-	9,709,402,000	6,378,092,000		3,331,310,000	9,709,402,000	0	100.00%
32	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	2,966,563,000	5,209,960,000	8,176,523,000	6,240,852,000		1,935,671,000	8,176,523,000	0	100.00%
33	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,486,312,000	-	7,486,312,000	1,860,000		7,484,452,000	7,486,312,000	0	100.00%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	1,296,505,000	-	1,296,505,000	229,198,000		1,067,307,000	1,296,505,000	0	100.00%
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	910,955,000	1,088,140,000	1,999,095,000	755,610,000		1,243,485,000	1,999,095,000	0	100.00%
36	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	2,989,553,000	16,902,000	3,006,455,000	902,105,000		2,104,350,000	3,006,455,000	0	100.00%
37	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	851,173,000	-	851,173,000			851,173,000	851,173,000	0	100.00%
38	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,049,687,000	-	1,049,687,000			1,049,687,000	1,049,687,000	0	100.00%
39	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	1,580,550,000	-	1,580,550,000	436,305,000		1,144,245,000	1,580,550,000	0	100.00%
40	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	754,234,000	1,209,683,000	1,963,917,000	507,390,000		1,456,527,000	1,963,917,000	0	100.00%
41	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP	25,694,351,464	-	25,694,351,464	10,527,303,000		15,167,048,464	25,694,351,464	0	100.00%
42	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	183,690,000	-	183,690,000	50,650,000		133,040,000	183,690,000	0	100.00%
TOTAL		179,765,764,108	28,927,889,000	208,693,653,108	89,646,740,044	-	119,046,913,064	208,693,653,108	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
										NILAI CAPAIAN 100.00%

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR KIPM dan KHP MAKASSAR	3,242,871,000	-	3,242,871,000	181,118,000		3,061,753,000	3,242,871,000	0	100.00%
2	BALAI KIPM dan KHP BALIKPAPAN	1,323,545,000	-	1,323,545,000	202,275,000		1,121,270,000	1,323,545,000	0	100.00%
3	BALAI KIPM dan KHP LAMPUNG	945,341,324	-	945,341,324	9,638,000		935,703,324	945,341,324	0	100.00%
4	BALAI KIPM dan KHP AMBON	254,838,000	373,548,000	628,386,000	8,000,000		620,386,000	628,386,000	0	100.00%
5	BALAI KIPM dan KHP BANJARMASIN	1,490,331,000	-	1,490,331,000	182,390,000		1,307,941,000	1,490,331,000	0	100.00%
6	BALAI KIPM dan KHP DENPASAR	3,244,319,000	-	3,244,319,000	576,640,000		2,667,679,000	3,244,319,000	0	100.00%
7	BALAI KIPM dan KHP JAKARTA II	1,164,584,000	-	1,164,584,000	559,584,000		605,000,000	1,164,584,000	0	100.00%
8	BALAI KIPM dan KHP JAYAPURA	917,913,000	-	917,913,000	29,000,000		888,913,000	917,913,000	0	100.00%
9	BALAI KIPM dan KHP MANADO	2,969,998,000	-	2,969,998,000	266,630,000		2,703,368,000	2,969,998,000	0	100.00%
10	BALAI KIPM dan KHP MATARAM	1,082,514,000	-	1,082,514,000	96,044,000		986,470,000	1,082,514,000	0	100.00%
11	BALAI KIPM dan KHP MEDAN I	4,870,920,000	-	4,870,920,000	528,745,000		4,342,175,000	4,870,920,000	0	100.00%
12	BALAI KIPM dan KHP SEMARANG	1,787,939,000	-	1,787,939,000	143,680,000		1,644,259,000	1,787,939,000	0	100.00%
13	BALAI KIPM dan KHP SURABAYA I	7,981,344,000	-	7,981,344,000	606,896,000		7,374,448,000	7,981,344,000	0	100.00%
14	BALAI KIPM dan KHP TARAKAN	154,755,800	-	154,755,800	-		154,755,800	154,755,800	0	100.00%
15	BALAI UJI STANDAR KIPM dan KHP	5,422,320,000	-	5,422,320,000	2,221,352,000		3,200,968,000	5,422,320,000	0	100.00%
16	SEKRETARIAT BPPMHKP	42,257,224,000	-	42,257,224,000	34,136,701,000		8,120,523,000	42,257,224,000	0	100.00%
17	STASIUN KIPM dan KHP KENDARI	418,991,000	-	418,991,000	82,330,000		336,661,000	418,991,000	0	100.00%
18	STASIUN KIPM dan KHP MAMUJU	35,000,000	-	35,000,000	-		35,000,000	35,000,000	0	100.00%
19	STASIUN KIPM dan KHP SORONG	673,546,000	-	673,546,000	88,620,000		584,926,000	673,546,000	0	100.00%
20	STASIUN KIPM dan KHP ACEH	2,008,035,000	-	2,008,035,000	77,270,000		1,930,765,000	2,008,035,000	0	100.00%
21	STASIUN KIPM dan KHP BATAM	1,351,261,698	-	1,351,261,698	1,874,000		1,349,387,698	1,351,261,698	0	100.00%
22	STASIUN KIPM dan KHP BENGKULU	436,771,000	-	436,771,000	24,978,000		411,793,000	436,771,000	0	100.00%
23	STASIUN KIPM dan KHP CIREBON	3,140,934,000	-	3,140,934,000	450,880,000		2,690,054,000	3,140,934,000	0	100.00%
24	STASIUN KIPM dan KHP GORONTALO	599,785,000	-	599,785,000	-		599,785,000	599,785,000	0	100.00%
25	STASIUN KIPM dan KHP JAMBI	190,000,000	-	190,000,000	73,000,000		117,000,000	190,000,000	0	100.00%
26	STASIUN KIPM dan KHP KUPANG	142,659,700	58,810,000	201,469,700	21,550,000		179,919,700	201,469,700	0	100.00%
27	STASIUN KIPM dan KHP MERAK	778,352,000	-	778,352,000	120,000,000		658,352,000	778,352,000	0	100.00%
28	STASIUN KIPM dan KHP MERAUKE	768,055,000	-	768,055,000	13,500,000		754,555,000	768,055,000	0	100.00%
29	STASIUN KIPM dan KHP PADANG	1,671,509,000	-	1,671,509,000	168,960,000		1,502,549,000	1,671,509,000	0	100.00%
30	STASIUN KIPM dan KHP PALANGKARAYA	1,819,998,000	-	1,819,998,000	385,950,000		1,434,048,000	1,819,998,000	0	100.00%
31	STASIUN KIPM dan KHP PALEMBANG	1,474,110,000	-	1,474,110,000	181,490,000		1,292,620,000	1,474,110,000	0	100.00%
32	STASIUN KIPM dan KHP PALU	474,690,000	-	474,690,000	61,720,000		412,970,000	474,690,000	0	100.00%
33	STASIUN KIPM dan KHP PANGKAL PINANG	1,006,732,000	-	1,006,732,000	18,000,000		988,732,000	1,006,732,000	0	100.00%
34	STASIUN KIPM dan KHP PEKANBARU	866,989,000	-	866,989,000	8,000,000		858,989,000	866,989,000	0	100.00%
35	STASIUN KIPM dan KHP PONTIANAK	2,041,312,000	-	2,041,312,000	379,255,000		1,662,057,000	2,041,312,000	0	100.00%
36	STASIUN KIPM dan KHP TERNATE	152,919,000	-	152,919,000	-		152,919,000	152,919,000	0	100.00%
37	STASIUN KIPM dan KHP YOGYAKARTA	1,341,671,000	-	1,341,671,000	105,837,000		1,235,834,000	1,341,671,000	0	100.00%
TOTAL		100,504,077,522	432,358,000	100,936,435,522	42,011,907,000	-	58,924,528,522	100,936,435,522	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
										NILAI CAPAIAN 100.00%

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	40,994,400,000	-	40,994,400,000	36,836,599,000	272,130,000	3,885,671,000	40,994,400,000	0	100.00%
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSPL PADANG	7,576,678,000	-	7,576,678,000	174,516,000	4,673,911,000	2,728,251,000	7,576,678,000	0	100.00%
3	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	27,424,390,000	-	27,424,390,000	21,447,885,000	1,027,302,000	4,949,203,000	27,424,390,000	0	100.00%
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	26,488,912,000	-	26,488,912,000	19,886,050,000	3,418,731,000	3,184,131,000	26,488,912,000	0	100.00%
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	16,024,348,000	-	16,024,348,000	11,832,138,000	2,225,040,000	1,967,170,000	16,024,348,000	0	100.00%
6	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	14,006,000,985	-	14,006,000,985	10,488,817,000	994,620,000	2,522,563,985	14,006,000,985	0	100.00%
7	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	7,133,555,000	-	7,133,555,000	263,002,000	3,953,616,000	2,916,937,000	7,133,555,000	0	100.00%
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	33,127,842,000	-	33,127,842,000	28,419,306,000	3,247,674,000	1,460,862,000	33,127,842,000	0	100.00%
9	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	2,153,460,465,551	50,934,466,000	2,204,394,931,551	1,322,441,260,000	861,749,091,551	20,204,580,000	2,204,394,931,551	0	100.00%
TOTAL		2,326,236,591,536	50,934,466,000	2,377,171,057,536	1,451,789,573,000	881,562,115,551	43,819,368,985		-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN INDIKATOR 100.00%	



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR 69/PPSNZJ/RC.610/II/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan PPS Nizam Zachman Jakarta
Dari : Kepala Sub Bagian Umum
Hal : Capaian IKU Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan
 Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen) Tahun
 2025
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 14 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Pelabuhan Nomor 27/PPSNZJ/RC.610/II/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini disampaikan Capaian IKU Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen) Tahun 2025 sebesar 100% dengan rincian sebagaimana Lampiran.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Mohamad Yusuf Santoso

**Template Lembar Kerja Pengukuran
Persentase Pengelolaan BMN
Pada Pelabuan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta TA 2025**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Jawaban	Bobot	Nilai	Pilihan Jawaban	Kondisi/Penyebab Pencapaian Tdk Optimal	Petunjuk Penilaian	Dokumen/Data pendukung
I	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN		100	100				
1	Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025		20	20				
a	Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025	Y	10	10	Ya, jika unit kerja telah menyusun RKBMN		Penilaian dilakukan terhadap ketersediaan dokumen RKBMN Tahun 2025	Dokumen RKBMN Tahun 2025 Eselon I/Mitra
b	Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025	A	10	10	a. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 80% b. Apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL > 10% s.d. ≤ 50 % d. apabila tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL ≤ 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase pengadaan dan pemeliharaan BMN dalam dokumen RKBMN Tahun 2025 yang dialokasikan anggarannya dalam RKAKL Tahun 2025	- Dokumen RKBMN Tahun 2025 Eselon I/Mitra - Dokumen RKAKL Tahun 2025 Eselon I/Mitra
2	Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan tahun 2025 ke pengguna barang	A	20	20	a. apabila prosentase usulan PSP BMN > 80% b. apabila prosentase usulan PSP BMN > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila prosentase usulan PSP BMN > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila prosentase usulan PSP BMN ≤ 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase jumlah usulan PSP BMN terhadap NUP yang belum di PSP untuk belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Tahun 2025. Data capaian PSP dapat diperoleh dari Biro Keuangan	- Data NUP yang belum di PSP - Data usulan PSP BMN - Data capaian PSP BMN dari Biro Keuangan
3	Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat ke pengguna barang sampai dengan Tahun 2025	A	20	20	a. apabila prosentase usulan penghapusan BMN > 80% b. apabila prosentase usulan penghapusan BMN > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila prosentase usulan penghapusan BMN > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila prosentase usulan penghapusan BMN ≤ 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase jumlah usulan penghapusan BMN terhadap NUP BMN dengan Kondisi Rusak Berat sampai dengan Tahun 2025. Data capaian penghapusan BMN dapat diperoleh dari Biro Keuangan	- Data NUP BMN dengan kondisi Rusak Berat - Data usulan penghapusan BMN - Data capaian penghapusan BMN dari Biro Keuangan
4	Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2025 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian	A	20	20	a. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 80% b. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 50% s.d. ≤ 80% c. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian > 10% s.d. ≤ 50% d. apabila pemanfaatan BMN didukung BA Pemakaian ≤ 10%		Penilaian dilakukan dengan menghitung prosentase jumlah BMN hasil pengadaan Tahun 2025 yang telah dilengkapi BAST/Berita Acara Pemakaian BMN	- Data belanja modal Tahun 2025 - BAST/Berita Acara Pemakaian BMN perolehan Tahun 2025
5	Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu	A	20	20	a. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan Tepat Waktu b. apabila hanya Penyusunan Laporan BMN Semester I atau Tahunan Tepat Waktu c. apabila Penyusunan Laporan BMN Semester I dan Tahunan tidak Tepat Waktu		- Penilaian dilakukan terhadap ketepatan waktu penyusunan/pengiriman laporan BMN Semester I Tahun 2025 dan Tahunan (TA 2024) - Jadwal penyampaian mengacu pada penyampaian LK unaudited (UAPPA-E1) sesuai PMK 222 Tahun 2016: - Semesteran: 26 Juli (tahun berjalan) - Tahunan 15 Februari (tahun berikutnya)	- Laporan BMN Tahun 2024 dan Laporan BMN Semester I Tahun 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR 66/PPSNZJ/RC.610/II/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan PPS Nizam Zachman Jakarta
Dari : Kepala Sub Bagian Umum
Hal : Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 Semester II Tahun 2025
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 14 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Pelabuhan Nomor
27/PPSNZJ/RC.610/II/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian
Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV
Tahun 2025, bersama ini disampaikan Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Semester II Tahun 2025 PPS Nizam Zachman Jakarta yaitu 97,45
(Nilai) dengan rincian sebagaimana Lampiran.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mohamad Yusuf Santoso

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 111/SJ.2/RC.610/II/2026

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Plt. Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Biro Umum
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025

Tanggal : 10 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 3953/SJ.1/RC.610/XII/2025 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 11.30 WIB.
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester II tahun 2025 sebesar 90,31 dari target nilai 92.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester II tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart**, **Akuntabel**, **Integritas**, **Loyalitas**, dan **Sinergi** (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Inspektur Jenderal



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	012	032	109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
2	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
3	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
4	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
5	039	032	249169	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

6	132	032	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.84	100.00	99.98	100%	0.00	99.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.96				100.00				
7	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.67	100.00	79.97	80%	0.00	99.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.83				100.00				
8	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.67	100.00	79.87	80%	0.00	99.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.33				100.00				
9	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.18	100.00	99.72	100%	0.00	99.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.29				100.00				
10	039	032	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	97.68	100.00	79.77	80%	0.00	99.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.84				100.00				
11	100	032	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.95	100.00	99.69	100%	0.00	99.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.69	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.24				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

12	175	032	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.51	100.00	99.65	100%	0.00	99.65
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.65	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.13				100.00				
13	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	Nilai	100.00	100.00	98.88	0.00	0.00	98.18	100.00	79.59	80%	0.00	99.49
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.78	0.00	0.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.53				100.00				
14	175	032	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	98.93	100.00	100.00	95.65	100.00	99.35	100%	0.00	99.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.79	10.00	10.00	9.57	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.65				100.00				
15	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	Nilai	100.00	94.20	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	89.13	90%	0.00	99.03
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	20.00	0.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.10		100.00				100.00				
16	001	032	649589	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100.00	94.66	100.00	0.00	0.00	99.94	100.00	79.19	80%	0.00	98.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.20	20.00	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	97.33		99.97				100.00				
17	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	Nilai	100.00	92.84	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.93	100%	0.00	98.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.42		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

18	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	91.43	100.00	79.14	80%	0.00	98.93
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.14	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		95.72				100.00				
19	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	Nilai	100.00	92.71	99.61	100.00	100.00	100.00	100.00	98.83	100%	0.00	98.83
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.91	19.92	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.36		99.90				100.00				
20	055	032	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	Nilai	100.00	91.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.80	100%	0.00	98.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.80	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.99		100.00				100.00				
21	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	Nilai	100.00	91.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.78	100%	0.00	98.78
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.78	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.94		100.00				100.00				
22	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	Nilai	100.00	94.07	100.00	100.00	100.00	96.42	100.00	98.75	100%	0.00	98.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.11	20.00	10.00	10.00	9.64	25.00				
					Nilai Aspek	97.04		99.10				100.00				
23	015	032	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	93.33	100.00	94.16	100.00	98.75	100%	0.00	98.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	9.33	10.00	9.42	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.87				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

24	062	032	649767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE	Nilai	100.00	94.55	99.03	0.00	0.00	98.88	100.00	78.88	80%	0.00	98.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.18	19.81	0.00	0.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	97.28		98.96				100.00				
25	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	100.00	100.00	86.00	100.00	100.00	100.00	98.60	100%	0.00	98.60
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	8.60	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.50				100.00				
26	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	94.39	100.00	100.00	100.00	94.07	100.00	98.57	100%	0.00	98.57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.16	20.00	10.00	10.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	97.20		98.52				100.00				
27	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	Nilai	100.00	91.12	100.00	100.00	100.00	98.22	100.00	98.49	100%	0.00	98.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.67	20.00	10.00	10.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	95.56		99.55				100.00				
28	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	91.48	100.00	100.00	100.00	97.43	100.00	98.46	100%	0.00	98.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.72	20.00	10.00	10.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	95.74		99.36				100.00				
29	045	032	649593	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	Nilai	100.00	92.75	97.28	100.00	100.00	99.88	100.00	98.36	100%	0.00	98.36
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.91	19.46	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	96.38		99.29				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

30	134	032	649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	92.85	99.20	100.00	100.00	95.64	100.00	98.33	100%	0.00	98.33
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	19.84	10.00	10.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	96.43		98.71				100.00				
31	012	032	649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	Nilai	100.00	92.54	100.00	93.33	100.00	99.38	100.00	98.15	100%	0.00	98.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.88	20.00	9.33	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	96.27		98.18				100.00				
32	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Nilai	100.00	92.84	100.00	100.00	100.00	92.12	100.00	98.14	100%	0.00	98.14
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	20.00	10.00	10.00	9.21	25.00				
					Nilai Aspek	96.42		98.03				100.00				
33	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100.00	88.86	99.05	100.00	100.00	100.00	100.00	98.14	100%	0.00	98.14
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.81	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.43		99.76				100.00				
34	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	Nilai	100.00	88.59	99.36	100.00	100.00	99.69	100.00	98.13	100%	0.00	98.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.87	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	94.30		99.76				100.00				
35	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	Nilai	100.00	89.74	100.00	100.00	100.00	96.63	100.00	98.12	100%	0.00	98.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	20.00	10.00	10.00	9.66	25.00				
					Nilai Aspek	94.87		99.16				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

36	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nilai	100.00	91.73	100.00	100.00	100.00	93.55	100.00	98.11	100%	0.00	98.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.76	20.00	10.00	10.00	9.36	25.00				
					Nilai Aspek	95.87		98.39				100.00				
37	123	032	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	Nilai	100.00	87.68	100.00	100.00	100.00	99.56	100.00	98.11	100%	0.00	98.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.15	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	93.84		99.89				100.00				
38	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	87.28	100.00	100.00	100.00	99.98	100.00	98.09	100%	0.00	98.09
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.09	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.64		99.99				100.00				
39	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	93.02	95.51	100.00	100.00	99.78	100.00	98.03	100%	0.00	98.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.95	19.10	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	96.51		98.82				100.00				
40	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	Nilai	100.00	91.78	99.87	100.00	100.00	92.64	100.00	98.01	100%	0.00	98.01
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.77	19.97	10.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	95.89		98.13				100.00				
41	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100.00	87.92	100.00	100.00	100.00	98.09	100.00	98.00	100%	0.00	98.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	10.00	10.00	9.81	25.00				
					Nilai Aspek	93.96		99.52				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

42	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Nilai	100.00	88.38	100.00	0.00	100.00	99.14	100.00	88.17	90%	0.00	97.97
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.26	20.00	0.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	94.19		99.71				100.00				
43	118	032	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	Nilai	100.00	86.28	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.94	100%	0.00	97.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.94	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.14		100.00				100.00				
44	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	86.14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.92	100%	0.00	97.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.92	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.07		100.00				100.00				
45	179	032	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	88.24	99.27	100.00	100.00	98.11	100.00	97.90	100%	0.00	97.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.24	19.85	10.00	10.00	9.81	25.00				
					Nilai Aspek	94.12		99.35				100.00				
46	061	032	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	94.96	100.00	100.00	100.00	85.62	100.00	97.81	100%	0.00	97.81
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.24	20.00	10.00	10.00	8.56	25.00				
					Nilai Aspek	97.48		96.40				100.00				
47	130	032	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	Nilai	100.00	89.27	99.00	100.00	100.00	96.08	100.00	97.80	100%	0.00	97.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.39	19.80	10.00	10.00	9.61	25.00				
					Nilai Aspek	94.64		98.77				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

48	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100.00	91.04	98.68	0.00	100.00	100.00	100.00	58.66	60%	0.00	97.76
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.66	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.52		100.00				100.00				
49	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nilai	100.00	89.26	98.38	100.00	100.00	96.88	100.00	97.75	100%	0.00	97.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.39	19.68	10.00	10.00	9.69	25.00				
					Nilai Aspek	94.63		98.81				100.00				
50	021	032	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	Nilai	100.00	84.78	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.72	100%	0.00	97.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.72	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.39		100.00				100.00				
51	120	032	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	Nilai	100.00	91.62	98.54	0.00	0.00	97.12	100.00	78.16	80%	0.00	97.70
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.74	19.71	0.00	0.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	95.81		97.83				100.00				
52	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	Nilai	100.00	84.86	100.00	100.00	100.00	99.59	100.00	97.69	100%	0.00	97.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.73	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	92.43		99.90				100.00				
53	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	89.05	98.73	0.00	0.00	99.83	100.00	78.09	80%	0.00	97.61
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.36	19.75	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.53		99.28				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

54	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	87.71	100.00	0.00	0.00	99.26	100.00	78.08	80%	0.00	97.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.16	20.00	0.00	0.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	93.86		99.63				100.00				
55	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	100.00	84.74	99.24	100.00	100.00	100.00	100.00	97.56	100%	0.00	97.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.71	19.85	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.37		99.81				100.00				
56	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100.00	88.30	99.97	100.00	100.00	100.00	100.00	68.25	70%	0.00	97.49
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.25	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.15		100.00				100.00				
57	175	032	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	Nilai	100.00	87.95	100.00	100.00	100.00	92.56	100.00	97.45	100%	0.00	97.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	10.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	93.98		98.14				100.00				
58	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	Nilai	100.00	90.81	96.25	100.00	100.00	95.31	100.00	97.40	100%	0.00	97.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.62	19.25	10.00	10.00	9.53	25.00				
					Nilai Aspek	95.41		97.89				100.00				
59	103	032	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	Nilai	100.00	86.78	98.46	100.00	100.00	97.36	99.45	97.31	100%	0.00	97.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.02	19.69	10.00	10.00	9.74	24.86				
					Nilai Aspek	93.39		98.96				99.45				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

60	175	032	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	83.45	98.66	100.00	100.00	100.00	100.00	97.25	100%	0.00	97.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.52	19.73	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.73		99.67				100.00				
61	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	87.84	98.92	0.00	0.00	97.84	100.00	77.74	80%	0.00	97.18
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.18	19.78	0.00	0.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	93.92		98.38				100.00				
62	123	032	427567	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	Nilai	100.00	85.21	99.71	0.00	0.00	99.65	100.00	77.69	80%	0.00	97.11
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.78	19.94	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	92.61		99.68				100.00				
63	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	85.87	99.59	100.00	100.00	91.92	100.00	96.99	100%	0.00	96.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.88	19.92	10.00	10.00	9.19	25.00				
					Nilai Aspek	92.94		97.88				100.00				
64	165	032	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	Nilai	100.00	85.34	97.45	100.00	100.00	0.00	100.00	67.80	70%	0.00	96.86
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.80	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.67		100.00				100.00				
65	132	032	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	Nilai	100.00	81.38	97.81	100.00	100.00	99.92	100.00	96.76	100%	0.00	96.76
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.21	19.56	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	90.69		99.43				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

66	051	032	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Nilai	100.00	84.44	95.79	100.00	100.00	98.41	100.00	96.66	100%	0.00	96.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.67	19.16	10.00	10.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	92.22		98.55				100.00				
67	014	032	567481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	Nilai	100.00	81.84	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.28	80%	0.00	96.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.28	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.92		100.00				100.00				
68	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	87.66	98.00	0.00	0.00	100.00	97.96	77.24	80%	0.00	96.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.15	19.60	0.00	0.00	10.00	24.49				
					Nilai Aspek	93.83		99.00				97.96				
69	020	032	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	Nilai	100.00	88.99	99.30	93.33	100.00	99.78	100.00	97.52	100%	1.00	96.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.35	19.86	9.33	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.50		98.10				100.00				
70	015	032	649699	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	77.98	100.00	100.00	100.00	98.18	100.00	96.52	100%	0.00	96.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.70	20.00	10.00	10.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	88.99		99.55				100.00				
71	175	032	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	Nilai	100.00	81.35	98.40	100.00	100.00	96.14	100.00	96.50	100%	0.00	96.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.20	19.68	10.00	10.00	9.61	25.00				
					Nilai Aspek	90.68		98.64				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

72	103	032	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	Nilai	100.00	77.28	99.49	100.00	100.00	100.00	100.00	96.49	100%	0.00	96.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.59	19.90	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.64		99.87				100.00				
73	061	032	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	82.79	100.00	0.00	0.00	97.46	100.00	77.16	80%	0.00	96.46
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.42	20.00	0.00	0.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	91.40		98.73				100.00				
74	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100.00	81.48	98.61	100.00	100.00	95.15	100.00	96.46	100%	0.00	96.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.22	19.72	10.00	10.00	9.51	25.00				
					Nilai Aspek	90.74		98.44				100.00				
75	039	032	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	86.23	100.00	100.00	100.00	84.63	100.00	96.40	100%	0.00	96.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.93	20.00	10.00	10.00	8.46	25.00				
					Nilai Aspek	93.12		96.16				100.00				
76	010	032	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	Nilai	100.00	93.49	100.00	82.00	100.00	91.70	100.00	96.39	100%	0.00	96.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	20.00	8.20	10.00	9.17	25.00				
					Nilai Aspek	96.75		93.43				100.00				
77	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	Nilai	100.00	81.96	95.38	100.00	100.00	100.00	100.00	96.37	100%	0.00	96.37
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.29	19.08	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.98		98.85				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

78	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	Nilai	100.00	87.56	100.00	88.00	100.00	93.71	100.00	96.31	100%	0.00	96.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.13	20.00	8.80	10.00	9.37	25.00				
					Nilai Aspek	93.78		95.43				100.00				
79	134	032	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	Nilai	100.00	94.57	99.23	80.00	100.00	92.22	100.00	96.25	100%	0.00	96.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.19	19.85	8.00	10.00	9.22	25.00				
					Nilai Aspek	97.29		92.86				100.00				
80	048	032	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	Nilai	100.00	81.11	99.02	0.00	100.00	96.40	100.00	86.61	90%	0.00	96.23
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.17	19.80	0.00	10.00	9.64	25.00				
					Nilai Aspek	90.56		98.47				100.00				
81	037	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	Nilai	100.00	85.02	95.40	96.00	100.00	96.11	100.00	96.04	100%	0.00	96.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.75	19.08	9.60	10.00	9.61	25.00				
					Nilai Aspek	92.51		96.88				100.00				
82	010	032	567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	Nilai	100.00	78.62	98.69	0.00	100.00	97.45	100.00	86.28	90%	0.00	95.86
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.79	19.74	0.00	10.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	89.31		98.71				100.00				
83	010	032	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	Nilai	100.00	82.52	97.22	100.00	100.00	90.29	100.00	95.85	100%	0.00	95.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.38	19.44	10.00	10.00	9.03	25.00				
					Nilai Aspek	91.26		96.88				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

84	042	032	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	Nilai	100.00	82.26	100.00	93.33	100.00	91.14	100.00	95.79	100%	0.00	95.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.34	20.00	9.33	10.00	9.11	25.00				
					Nilai Aspek	91.13		96.12				100.00				
85	175	032	403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	93.07	84.98	100.00	100.00	97.78	100.00	95.73	100%	0.00	95.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.96	17.00	10.00	10.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	96.54		95.69				100.00				
86	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	Nilai	100.00	70.60	100.00	100.00	100.00	99.36	100.00	95.53	100%	0.00	95.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.59	20.00	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	85.30		99.84				100.00				
87	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	Nilai	100.00	69.39	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.41	100%	0.00	95.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.41	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	84.70		100.00				100.00				
88	083	032	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	Nilai	100.00	83.62	94.46	100.00	100.00	100.00	95.88	95.41	100%	0.00	95.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.54	18.89	10.00	10.00	10.00	23.97				
					Nilai Aspek	91.81		98.62				95.88				
89	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	Nilai	100.00	85.28	98.92	0.00	0.00	87.24	100.00	76.30	80%	0.00	95.38
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.79	19.78	0.00	0.00	8.72	25.00				
					Nilai Aspek	92.64		93.08				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

90	064	032	250263	STASIUN PSDKP BIAK	Nilai	100.00	78.93	92.78	100.00	100.00	99.56	100.00	95.35	100%	0.00	95.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.84	18.56	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	89.47		98.08				100.00				
91	175	032	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	Nilai	100.00	78.79	100.00	100.00	100.00	83.49	100.00	95.17	100%	0.00	95.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.82	20.00	10.00	10.00	8.35	25.00				
					Nilai Aspek	89.40		95.87				100.00				
92	061	032	215141	STASIUN PSDKP AMBON	Nilai	100.00	75.52	95.35	100.00	100.00	97.76	100.00	95.17	100%	0.00	95.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.33	19.07	10.00	10.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	87.76		98.28				100.00				
93	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Nilai	100.00	73.49	100.00	100.00	100.00	91.28	99.69	95.07	100%	0.00	95.07
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.02	20.00	10.00	10.00	9.13	24.92				
					Nilai Aspek	86.75		97.82				99.69				
94	165	032	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Nilai	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	99.17	100.00	94.92	100%	0.00	94.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	5.00	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		87.29				100.00				
95	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	Nilai	100.00	78.97	93.88	100.00	100.00	89.61	100.00	94.58	100%	0.00	94.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.85	18.78	10.00	10.00	8.96	25.00				
					Nilai Aspek	89.49		95.87				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

96	136	032	427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	77.86	99.48	80.00	100.00	100.00	100.00	94.58	100%	0.00	94.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.68	19.90	8.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.93		94.87				100.00				
97	030	032	049097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	74.55	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	66.18	70%	0.00	94.55
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.18	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.28		100.00				100.00				
98	128	032	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	Nilai	100.00	71.32	100.00	88.00	100.00	100.00	100.00	94.50	100%	0.00	94.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.70	20.00	8.80	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	85.66		97.00				100.00				
99	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	Nilai	100.00	79.65	99.91	100.00	100.00	98.23	90.67	94.42	100%	0.00	94.42
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.95	19.98	10.00	10.00	9.82	22.67				
					Nilai Aspek	89.83		99.54				90.67				
100	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	Nilai	100.00	80.39	91.65	100.00	100.00	88.38	100.00	94.23	100%	0.00	94.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.06	18.33	10.00	10.00	8.84	25.00				
					Nilai Aspek	90.20		95.01				100.00				
101	020	032	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	Nilai	100.00	74.41	99.89	100.00	100.00	80.82	100.00	94.22	100%	0.00	94.22
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.16	19.98	10.00	10.00	8.08	25.00				
					Nilai Aspek	87.21		95.18				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

102	178	032	645691	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	71.92	100.00	0.00	0.00	95.78	100.00	75.37	80%	0.00	94.21
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.79	20.00	0.00	0.00	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	85.96		97.89				100.00				
103	178	032	340150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	72.73	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65.91	70%	0.00	94.16
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.91	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	86.37		100.00				100.00				
104	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	88.89	95.03	80.00	100.00	88.24	100.00	94.16	100%	0.00	94.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.01	8.00	10.00	8.82	25.00				
					Nilai Aspek	94.45		90.82				100.00				
105	037	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Nilai	100.00	85.45	86.22	93.33	100.00	97.18	100.00	94.11	100%	0.00	94.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	17.24	9.33	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	92.73		94.18				100.00				
106	037	032	427624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	Nilai	100.00	74.12	98.73	93.33	92.31	95.95	100.00	94.02	100%	0.00	94.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.12	19.75	9.33	9.23	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	87.06		95.08				100.00				
107	175	032	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	87.86	100.00	60.00	100.00	97.94	100.00	93.97	100%	0.00	93.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.18	20.00	6.00	10.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	93.93		89.49				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

108	024	032	649732	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	Nilai	100.00	92.77	100.00	50.00	100.00	99.43	100.00	93.86	100%	0.00	93.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	5.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	96.39		87.36				100.00				
109	001	032	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	Nilai	100.00	79.43	100.00	0.00	0.00	81.61	100.00	75.08	80%	0.00	93.84
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.91	20.00	0.00	0.00	8.16	25.00				
					Nilai Aspek	89.72		90.81				100.00				
110	068	032	649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	Nilai	100.00	79.44	100.00	0.00	0.00	80.22	100.00	74.94	80%	0.00	93.67
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.92	20.00	0.00	0.00	8.02	25.00				
					Nilai Aspek	89.72		90.11				100.00				
111	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	76.73	92.89	93.33	100.00	92.43	100.00	93.66	100%	0.00	93.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.51	18.58	9.33	10.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	88.37		94.66				100.00				
112	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Nilai	100.00	86.36	96.77	100.00	100.00	84.16	90.67	93.39	100%	0.00	93.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.95	19.35	10.00	10.00	8.42	22.67				
					Nilai Aspek	93.18		95.23				90.67				
113	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	90.30	100.00	50.00	100.00	94.27	100.00	92.97	100%	0.00	92.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.55	20.00	5.00	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	95.15		86.07				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

114	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100.00	100.00	99.67	50.00	100.00	96.54	100.00	65.00	70%	0.00	92.86
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	5.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
115	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100.00	56.25	100.00	100.00	100.00	92.58	100.00	92.70	100%	0.00	92.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.44	20.00	10.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	78.13		98.15				100.00				
116	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	Nilai	100.00	92.90	70.90	100.00	100.00	95.15	100.00	92.63	100%	0.00	92.63
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.94	14.18	10.00	10.00	9.52	25.00				
					Nilai Aspek	96.45		91.51				100.00				
117	037	032	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	Nilai	100.00	88.01	90.64	60.00	100.00	98.71	100.00	92.20	100%	0.00	92.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.20	18.13	6.00	10.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	94.01		87.34				100.00				
118	175	032	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	Nilai	100.00	80.59	95.11	66.67	100.00	93.94	100.00	92.17	100%	0.00	92.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.09	19.02	6.67	10.00	9.39	25.00				
					Nilai Aspek	90.30		88.93				100.00				
119	118	032	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	Nilai	100.00	63.30	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	64.50	70%	0.00	92.14
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.50	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.65		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

120	043	032	649657	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	Nilai	100.00	84.20	97.42	50.00	100.00	100.00	100.00	92.11	100%	0.00	92.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.63	19.48	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.10		86.86				100.00				
121	010	032	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	Nilai	100.00	85.79	100.00	50.00	100.00	91.30	100.00	92.00	100%	0.00	92.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.87	20.00	5.00	10.00	9.13	25.00				
					Nilai Aspek	92.90		85.33				100.00				
122	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	75.67	99.61	50.00	100.00	100.00	100.00	91.27	100%	0.00	91.27
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.35	19.92	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.84		87.40				100.00				
123	050	032	649678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	Nilai	100.00	75.84	99.54	50.00	100.00	97.36	100.00	91.02	100%	0.00	91.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.38	19.91	5.00	10.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	87.92		86.73				100.00				
124	175	032	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	81.28	78.39	100.00	98.30	95.44	94.75	90.93	100%	0.00	90.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.19	15.68	10.00	9.83	9.54	23.69				
					Nilai Aspek	90.64		93.03				94.75				
125	017	032	649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	Nilai	100.00	85.65	100.00	50.00	100.00	99.60	92.22	90.86	100%	0.00	90.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.85	20.00	5.00	10.00	9.96	23.06				
					Nilai Aspek	92.83		87.40				92.22				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

126	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	87.54	100.00	50.00	100.00	77.19	100.00	90.85	100%	0.00	90.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.13	20.00	5.00	10.00	7.72	25.00				
					Nilai Aspek	93.77		81.80				100.00				
127	016	032	649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	Nilai	100.00	73.17	100.00	50.00	100.00	94.79	100.00	90.45	100%	0.00	90.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.98	20.00	5.00	10.00	9.48	25.00				
					Nilai Aspek	86.59		86.20				100.00				
128	020	032	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	Nilai	100.00	81.45	98.15	50.00	100.00	94.29	100.00	91.28	100%	1.00	90.28
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.22	19.63	5.00	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	90.73		85.61				100.00				
129	008	032	099325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	54.55	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.18	70%	0.00	90.26
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.18	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.28		100.00				100.00				
130	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	62.64	82.57	100.00	100.00	93.17	100.00	90.23	100%	0.00	90.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.40	16.51	10.00	10.00	9.32	25.00				
					Nilai Aspek	81.32		93.94				100.00				
131	175	032	649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	Nilai	100.00	79.26	100.00	50.00	100.00	81.86	100.00	90.08	100%	0.00	90.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.89	20.00	5.00	10.00	8.19	25.00				
					Nilai Aspek	89.63		82.97				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

132	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	74.46	96.46	50.00	100.00	93.02	100.00	89.76	100%	0.00	89.76
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.17	19.29	5.00	10.00	9.30	25.00				
					Nilai Aspek	87.23		84.87				100.00				
133	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	Nilai	100.00	83.18	65.99	93.33	100.00	97.26	100.00	89.73	100%	0.00	89.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.48	13.20	9.33	10.00	9.73	25.00				
					Nilai Aspek	91.59		89.14				100.00				
134	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.64	86.67	82.00	98.08	74.10	100.00	89.55	100%	0.00	89.55
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.80	17.33	8.20	9.81	7.41	25.00				
					Nilai Aspek	89.32		85.21				100.00				
135	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	76.50	95.75	0.00	0.00	0.00	93.00	44.73	50%	0.00	89.45
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25				
					Nilai Aspek	88.25		95.75				93.00				
136	008	032	567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	Nilai	100.00	66.20	99.37	50.00	100.00	95.96	100.00	89.40	100%	0.00	89.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.93	19.87	5.00	10.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	83.10		86.33				100.00				
137	066	032	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	70.29	100.00	50.00	100.00	86.84	100.00	89.23	100%	0.00	89.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.54	20.00	5.00	10.00	8.68	25.00				
					Nilai Aspek	85.15		84.21				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

138	175	032	691629	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.53	61.97	100.00	100.00	100.00	100.00	89.17	100%	0.00	89.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.78	12.39	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	89.27		90.49				100.00				
139	060	032	567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	Nilai	100.00	70.52	99.38	60.00	100.00	94.48	93.00	89.15	100%	0.00	89.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.58	19.88	6.00	10.00	9.45	23.25				
					Nilai Aspek	85.26		88.47				93.00				
140	107	032	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	Nilai	100.00	65.67	100.00	50.00	100.00	92.57	100.00	89.11	100%	0.00	89.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.85	20.00	5.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	82.84		85.64				100.00				
141	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	Nilai	100.00	70.82	72.20	100.00	100.00	98.89	100.00	89.95	100%	1.00	88.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.62	14.44	10.00	10.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	85.41		92.77				100.00				
142	063	032	567812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	73.29	96.94	50.00	100.00	84.86	100.00	88.87	100%	0.00	88.87
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.99	19.39	5.00	10.00	8.49	25.00				
					Nilai Aspek	86.65		82.95				100.00				
143	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	93.04	99.66	0.00	0.00	99.28	68.89	71.04	80%	0.00	88.80
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.96	19.93	0.00	0.00	9.93	17.22				
					Nilai Aspek	96.52		99.47				68.89				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

144	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Nilai	100.00	100.00	35.27	87.00	100.00	99.28	100.00	85.68	100%	0.00	85.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	7.05	8.70	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		80.39				100.00				
145	049	032	179113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	30.86	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.63	70%	0.00	85.18
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.63	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.43		100.00				100.00				
146	084	032	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	Nilai	100.00	71.73	99.96	93.33	100.00	81.07	67.70	85.12	100%	0.00	85.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.76	19.99	9.33	10.00	8.11	16.92				
					Nilai Aspek	85.87		93.59				67.70				
147	179	032	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	Nilai	100.00	94.26	38.97	90.00	100.00	91.67	100.00	85.10	100%	0.00	85.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.14	7.79	9.00	10.00	9.17	25.00				
					Nilai Aspek	97.13		80.16				100.00				
148	060	032	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	Nilai	100.00	76.64	54.66	86.00	100.00	88.68	100.00	84.90	100%	0.00	84.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.50	10.93	8.60	10.00	8.87	25.00				
					Nilai Aspek	88.32		82.33				100.00				
149	060	032	209117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGERA	Nilai	100.00	28.92	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.34	70%	0.00	84.77
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.34	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.46		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

150	009	032	329087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	28.84	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.33	70%	0.00	84.75
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.33	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.42		100.00				100.00				
151	136	032	199137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	28.36	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.25	70%	0.00	84.65
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.25	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.18		100.00				100.00				
152	020	032	299391	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	27.89	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.18	70%	0.00	84.55
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.18	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.95		100.00				100.00				
153	024	032	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nilai	100.00	76.37	41.75	100.00	100.00	97.01	100.00	84.51	100%	0.00	84.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.46	8.35	10.00	10.00	9.70	25.00				
					Nilai Aspek	88.19		84.69				100.00				
154	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	80.00	55.39	78.45	88.80	100.00	85.54	100.00	84.43	100%	0.00	84.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	8.31	15.69	8.88	10.00	8.55	25.00				
					Nilai Aspek	67.70		88.20				100.00				
155	038	032	239138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.09	70%	0.00	84.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

156	061	032	219098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.09	70%	0.00	84.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				100.00				
157	042	032	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	Nilai	100.00	62.21	64.61	60.00	100.00	99.81	100.00	83.23	100%	0.00	83.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.33	12.92	6.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	81.11		81.10				100.00				
158	175	032	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	80.00	55.08	64.34	84.00	100.00	93.28	100.00	81.86	100%	0.00	81.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	8.26	12.87	8.40	10.00	9.33	25.00				
					Nilai Aspek	67.54		85.40				100.00				
159	066	032	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	Nilai	100.00	54.47	57.19	50.00	100.00	100.00	100.00	79.61	100%	0.00	79.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.17	11.44	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.24		76.80				100.00				
160	175	032	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	53.74	71.34	93.33	99.64	97.24	68.07	78.37	100%	0.00	78.37
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.06	14.27	9.33	9.96	9.72	17.02				
					Nilai Aspek	76.87		90.39				68.07				
161	043	032	149124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	30.96	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.64	70%	0.00	78.06
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.64	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.48		75.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

162	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	62.43	54.97	63.33	100.00	63.47	100.00	78.04	100%	0.00	78.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.36	10.99	6.33	10.00	6.35	25.00				
					Nilai Aspek	81.22		70.44				100.00				
163	014	032	119114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	28.14	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.22	70%	0.00	77.46
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.22	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.07		75.00				100.00				
164	095	032	029172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	27.67	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.15	70%	0.00	77.36
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.15	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.84		75.00				100.00				
165	042	032	139138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	29.59	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	49.44	70%	0.00	70.63
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.44	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.80		50.00				100.00				
166	134	032	039163	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	75.95	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	48.89	70%	0.00	69.85
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.39	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	87.98		100.00				30.00				
167	175	032	019062	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	41.59	70%	0.00	59.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				30.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

168	037	032	229110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	75.72	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36	70%	0.00	59.08
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.36	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	87.86		100.00				0.00				
169	051	032	189143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	47.81	75.00	0.00	0.00	0.00	30.00	39.67	70%	0.00	56.67
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.17	15.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	73.91		75.00				30.00				
170	010	032	089143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	28.98	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.35	70%	0.00	49.07
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.35	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	64.49		100.00				0.00				
171	017	032	129123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	28.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.25	70%	0.00	48.93
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.25	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	64.17		100.00				0.00				
172	015	032	309170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09	70%	0.00	48.70
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				0.00				
173	135	032	059190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09	70%	0.00	48.70
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				0.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

174	123	032	079136	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	36.36	25.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.95	70%	0.00	39.93
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.45	5.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	68.18		25.00				30.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.91	97.29	100.00	100.00	99.60	100.00	97.30	100%	0.00	97.30
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.89	19.46	10.00	10.00	9.96	25.00				
			Nilai Aspek	92.96		99.22				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	88.95	95.26	100.00	100.00	96.30	100.00	97.02	100%	0.50	96.52
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.34	19.05	10.00	10.00	9.63	25.00				
			Nilai Aspek	94.48		97.89				100.00				
3	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	70.82	100.00	100.00	100.00	99.57	100.00	95.58	100%	0.00	95.58
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	10.62	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
			Nilai Aspek	85.41		99.89				100.00				
4	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	84.35	98.96	82.80	98.98	95.15	100.00	95.14	100%	0.50	94.64
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.65	19.79	8.28	9.90	9.51	25.00				
			Nilai Aspek	92.18		93.97				100.00				
5	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	87.86	98.04	60.00	100.00	97.94	100.00	93.58	100%	0.00	93.58
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.18	19.61	6.00	10.00	9.79	25.00				
			Nilai Aspek	93.93		89.00				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.36	82.22	97.48	99.62	94.93	100.00	93.45	100%	0.00	93.45
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.80	16.44	9.75	9.96	9.49	25.00				
			Nilai Aspek	92.68		93.56				100.00				
7	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	98.46	60.52	85.06	88.13	100.00	98.21	100.00	89.57	100%	0.00	89.57
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.85	9.08	17.01	8.81	10.00	9.82	25.00				
			Nilai Aspek	79.49		92.85				100.00				
8	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	63.26	72.22	90.48	99.96	98.06	90.87	85.50	100%	0.00	85.50
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	9.49	14.44	9.05	10.00	9.81	22.72				
			Nilai Aspek	81.63		90.18				90.87				
9	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	97.78	61.16	65.41	85.50	100.00	93.50	100.00	84.93	100%	0.75	84.18
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.78	9.17	13.08	8.55	10.00	9.35	25.00				
			Nilai Aspek	79.47		86.10				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	99.76	70.61	82.69	90.82	99.89	96.56	99.91	90.81	100%	0.50	90.31
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.98	10.59	16.54	9.08	9.99	9.66	24.98				
			Nilai Aspek	85.19		92.49				99.91				

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR 65/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan PPS Nizam Zachman Jakarta
Dari : Kepala Sub Bagian Umum
Hal : Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) (Nilai)
Tahun 2025
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 14 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Pelabuhan Nomor 27/PPSNZJ/RC.610/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini disampaikan Capaian IKU "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Nilai) Tahun 2025" PPS Nizam Zachman Jakarta yaitu 100 (Nilai) dengan rincian sebagaimana Lampiran.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Mohamad Yusuf Santoso

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 138/SJ.2/RC.610/II/2026

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Para Plt. Sekretaris Badan
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Lampiran : Satu berkas

Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian seluruh Unit Eselon I sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,5 dan Capaian seluruh Satuan Kerja (Satker) sudah mencapai target sebesar 71,5 sebagaimana data terlampir.
2. Capaian IK NKPA level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IK NKPA Tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:
Sekretaris Jenderal



**Ditandatangani
Secara Elektronik**
Sutrisno Subagyo

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	01	Sekretariat Jenderal	91.50	100.00	96.65	84.62	63.65
2	02	Inspektorat Jenderal	85.00	50.00	100.00	100.00	100.00
3	03	Ditjen Perikanan Tangkap	85.83	79.78	96.66	91.01	62.00
4	04	Ditjen Perikanan Budidaya	87.52	77.75	99.55	79.10	76.60
5	05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	85.31	85.71	99.45	85.64	41.90
6	06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	88.53	75.96	100.00	100.00	71.60
7	07	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	87.09	61.53	100.00	93.42	95.25
8	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	98.53	100.00	99.99	98.13	91.45
9	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	89.11	75.00	98.48	89.71	88.85

Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan All entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.01.622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	95,63	100,00	77,78	85,70
2	032.01.632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	75,00	100,00	0,00	0,00
3	032.01.660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	79,70	87,93	100,00	25,00
4	032.01.690925	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	032.01.690926	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	032.01.690927	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
7	032.01.690928	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	032.01.690929	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
9	032.01.690930	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
10	032.01.690931	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	032.01.690932	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
12	032.01.690933	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
13	032.01.690934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
14	032.01.690935	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
15	032.01.690936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.01.690937	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.01.690938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
18	032.01.690939	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.01.690940	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
20	032.01.690941	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	032.01.690942	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
22	032.01.690943	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
23	032.01.690944	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
24	032.01.690945	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
25	032.01.690946	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
26	032.01.690947	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
27	032.01.690948	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
28	032.01.690949	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	032.01.690950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
30	032.01.690951	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
31	032.01.690952	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
32	032.01.690953	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
33	032.01.690954	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.01.690955	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.01.690956	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.01.690957	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
37	032.01.690958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
38	032.01.690959	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
39	032.01.690960	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
40	032.01.690961	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
41	032.01.690962	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 41 dari 41 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya



NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.02.622098	INSPEKTORAT JENDERAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan All 1 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	032.01.019062	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
2	032.02.028172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
3	032.02.039263	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	032.01.049097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
5	032.02.069290	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00
6	032.01.069245	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
7	032.01.079236	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	032.01.089243	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
9	032.01.099328	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU	100,00	100,00	100,00	100,00
10	032.01.109133	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	100,00	100,00	100,00	100,00
11	032.01.118214	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
12	032.01.129223	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
13	032.01.139238	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
14	032.02.149224	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00
15	032.01.159218	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.01.169224	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.01.179213	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00
18	032.01.189243	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.02.199237	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
20	032.01.209217	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	100,00	100,00	100,00	100,00
21	032.01.219098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	100,00	100,00	100,00	100,00
22	032.01.229210	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	100,00	100,00	100,00	100,00
23	032.01.238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	81,52	91,13	95,24	24,30
24	032.01.239236	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
25	032.01.239246	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANYU	97,00	100,00	100,00	80,00
26	032.01.239290	BALAI BESAR PEMANGKAPAN IKAN	97,00	100,00	100,00	80,00
27	032.01.239273	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	94,25	100,00	80,00	75,00
28	032.02.239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIT	97,00	100,00	100,00	80,00
29	032.01.239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAR	97,00	100,00	100,00	80,00
30	032.01.239298	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	94,25	100,00	80,00	75,00
31	032.01.239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	94,53	100,00	100,00	63,55
32	032.01.249269	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00
33	032.01.259267	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.01.269220	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.01.269213	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.01.299293	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	100,00	100,00	100,00	100,00
37	032.01.309270	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
38	032.01.319718	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWAHANG	96,25	100,00	100,00	75,00
39	032.01.319098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	032.01.329097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	100,00	100,00	100,00	100,00
41	032.01.339096	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
42	032.02.349250	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
43	032.01.429658	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAUAN	92,92	100,00	100,00	52,80
44	032.01.429661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	88,14	100,00	50,00	54,25
45	032.01.439670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	94,93	100,00	100,00	66,20
46	032.01.439692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BROMOH	90,50	100,00	80,00	50,00
47	032.01.518217	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	93,57	100,00	100,00	57,15
48	032.02.533488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	95,00	100,00	100,00	66,65
49	032.01.539611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA HIZAM ZACHMAN	100,00	100,00	100,00	100,00
50	032.01.539650	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	93,57	100,00	100,00	57,15
51	032.02.569293	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	97,00	100,00	100,00	80,00
52	032.01.569401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	94,25	100,00	80,00	75,00
53	032.01.623461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBOI	96,67	100,00	66,67	100,00
54	032.01.623478	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	86,57	92,31	83,33	60,00
55	032.01.623482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWARAN	97,00	100,00	100,00	80,00
56	032.02.623225	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
57	032.02.639693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	91,41	100,00	100,00	42,70
58	032.01.639707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	90,50	100,00	80,00	50,00

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Saterker

Download Excel

Tampilkan All 1 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	032.04.013063	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00		0,00	0,00
2	032.04.028172	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00		0,00	0,00
3	032.04.039264	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00		0,00	0,00
4	032.04.049098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00		0,00	0,00
5	032.04.069253	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00		0,00	0,00
6	032.04.069246	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00		0,00	0,00
7	032.04.079237	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00		0,00	0,00
8	032.04.089244	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00		0,00	0,00
9	032.04.099228	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BIAU	0,00	0,00		0,00	0,00
10	032.04.109212	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00		0,00	0,00
11	032.04.119242	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00		0,00	0,00
12	032.04.129234	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00		0,00	0,00
13	032.04.139239	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00		0,00	0,00
14	032.04.149213	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00		0,00	0,00
15	032.04.159219	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00		0,00	0,00
16	032.04.169228	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00		0,00	0,00
17	032.04.179214	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00		0,00	0,00
18	032.04.189244	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00		0,00	0,00
19	032.04.199218	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00		0,00	0,00
20	032.04.209218	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00		0,00	0,00
21	032.04.219099	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00		0,00	0,00
22	032.04.229211	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00		0,00	0,00
23	032.04.237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	91,76	96,93		83,33	71,50
24	032.04.238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	95,33	100,00		83,33	80,00
25	032.04.239238	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. HUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00		0,00	0,00
26	032.04.239283	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	95,00	100,00		50,00	100,00
27	032.04.249210	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. HUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00		0,00	0,00
28	032.04.259208	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00		0,00	0,00
29	032.04.269212	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00		0,00	0,00
30	032.04.289213	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00		0,00	0,00
31	032.04.299396	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RANTEN	0,00	0,00		0,00	0,00
32	032.04.309272	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00		0,00	0,00
33	032.04.319099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00		0,00	0,00
34	032.04.329068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BIAU	0,00	0,00		0,00	0,00
35	032.04.339097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00		0,00	0,00
36	032.04.349213	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	0,00	0,00		0,00	0,00
37	032.04.427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	94,00	100,00		100,00	60,00
38	032.04.445283	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPI) KABANGANG	95,33	100,00		83,33	80,00
39	032.04.445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UMGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEH	96,92	100,00		100,00	79,45
40	032.04.528911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	97,50	100,00		75,00	100,00
41	032.04.567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	97,50	100,00		75,00	100,00
42	032.04.567389	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATER	95,00	100,00		50,00	100,00
43	032.04.567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	96,56	100,00		100,00	77,05
44	032.04.567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDANGIN	94,25	100,00		80,00	75,00
45	032.04.567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	74,99	99,98		0,00	0,00
46	032.04.567728	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	91,84	98,56		66,67	75,00
47	032.04.567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	97,00	100,00		100,00	80,00
48	032.04.567880	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	72,50	96,67		0,00	0,00
49	032.04.623462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	90,91	100,00		75,00	56,05
50	032.04.690968	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	0,00	0,00		0,00	0,00
51	032.04.690967	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	0,00	0,00		0,00	0,00
52	032.04.690968	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	0,00	0,00		0,00	0,00
53	032.04.690968	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	0,00	0,00		0,00	0,00
54	032.04.691247	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00		0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 54 dari 54 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan All 1 entri

Cari:

No. ↑	Kode Satuan Kerja ↕	Satuan Kerja ↕	NK Perencanaan Anggaran ↕	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↕	Penggunaan SBK ↕	Efisiensi SBK ↕
1	032.05.013050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2	032.05.031003	STASIUN PSDKP CILACAP	90,09	100,00	90,91	40,00
3	032.05.039017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	032.05.049013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	032.05.060135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	88,76	100,00	72,73	43,25
6	032.05.089004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7	032.05.119018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	032.05.129014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
9	032.05.139017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	032.05.169014	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
11	032.05.179013	STASIUN PSDKP TAHUNA	84,16	94,12	84,62	34,05
12	032.05.189016	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
13	032.05.199013	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
14	032.05.209013	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	032.05.213141	STASIUN PSDKP AMBON	89,50	100,00	100,00	30,00
16	032.05.319018	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.05.328113	PANGKALAN PSDKP RENGA	89,77	100,00	72,73	50,00
18	032.05.339017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.05.345160	STASIUN PSDKP KUPANG	89,62	100,00	91,67	36,35
20	032.05.349016	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
21	032.05.359013	STASIUN PSDKP BIAK	89,77	100,00	72,73	50,00
22	032.05.389018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DASAR PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	032.05.389018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
24	032.05.399013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
25	032.05.319013	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	032.05.323116	PANGKALAN PSDKP BATAM	88,26	98,19	91,67	36,35
27	032.05.319013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
28	032.05.339014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
29	032.05.351013	STASIUN PSDKP TARAKAN	89,66	100,00	91,67	36,60
30	032.05.449016	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	92,62	99,81	100,00	51,75
31	032.05.449013	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	88,78	99,37	75,00	45,00
32	032.05.449013	STASIUN PENGAWASAN SDKP SELATAN	90,83	100,00	83,33	50,00
33	032.05.449017	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	89,41	100,00	80,00	42,70
34	032.05.449013	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	91,36	100,00	100,00	42,40
35	032.05.449013	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	89,58	100,00	80,95	43,25
36	032.05.609010	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTAMAHAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
37	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
38	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
39	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
40	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
41	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
42	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
43	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
44	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
45	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
46	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
47	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
48	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
49	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
50	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
51	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
52	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
53	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
54	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
55	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
56	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
57	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
58	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
59	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
60	032.05.609011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00

61	032.05.090955	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
62	032.05.090956	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
63	032.05.090957	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
64	032.05.090958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
65	032.05.090959	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
66	032.05.091000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
67	032.05.091001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
68	032.05.091003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
69	032.05.091005	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 69 dari 69 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan

All

 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	032.06.427666	BALAI BESAR PENGULAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	100,00	100,00	100,00	100,00
2	032.06.621111	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,23	100,00	100,00	61,55
3	033.06.491008	DINAS KETAHANAN PANGSA, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	033.06.491009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
5	033.06.491010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
6	033.06.491011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	033.06.491012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
8	033.06.491013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
9	033.06.491014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	033.06.491015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
11	033.06.491016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BATAVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12	033.06.491017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
13	033.06.491018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
14	033.06.491019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
15	033.06.491020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
16	033.06.491021	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
17	033.06.491022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
18	033.06.491023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
19	033.06.491024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	033.06.491025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
21	033.06.491026	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
22	033.06.491027	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	033.06.491028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
24	033.06.491029	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
25	033.06.491030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
26	033.06.491031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
27	033.06.491032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	033.06.491033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
29	033.06.491034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
30	033.06.491035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
31	033.06.491036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
32	033.06.491037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
33	033.06.491038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BATAVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
34	033.06.491039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
35	033.06.491040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
36	033.06.491041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 36 dari 36 entri

Sebelumnya

1

 Selanjutnya

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan All 43 entri

Cari:

No. ↑	Kode Satuan Kerja ↑	Satuan Kerja ↑	NK Perencanaan Anggaran ↑	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑	Penggunaan SBK ↑	Efisiensi SBK ↑
1	032.07.290143	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	98,33	100,00	83,33	100,00
2	032.07.477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	97,86	100,00	100,00	85,70
3	032.07.477428	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	98,57	100,00	85,71	100,00
4	032.07.477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	100,00	100,00	100,00	100,00
5	032.07.477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	98,57	100,00	85,71	100,00
6	032.07.477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKAMBARU	99,24	100,00	100,00	94,95
7	032.07.490346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	97,14	100,00	71,43	100,00
8	032.07.490353	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN) KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00
9	032.07.613143	SEKRETARAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	98,68	100,00	100,00	91,20
10	032.07.691046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	032.07.691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
12	032.07.691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
13	032.07.691049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
14	032.07.691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	032.07.691051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROECHE DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.07.691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.07.691053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
18	032.07.691054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.07.691055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
20	032.07.691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
21	032.07.691057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
22	032.07.691058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
23	032.07.691059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
24	032.07.691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
25	032.07.691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
26	032.07.691062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
27	032.07.691063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
28	032.07.691064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
29	032.07.691065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
30	032.07.691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
31	032.07.691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
32	032.07.691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
33	032.07.691069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.07.691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DASRAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.07.691071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.07.691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
37	032.07.691073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
38	032.07.691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
39	032.07.691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	032.07.691076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
41	032.07.691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
42	032.07.691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
43	032.07.691079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 43 dari 43 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan All 42 entri

Cari:

No. ↑	Kode Satuan Kerja ↗	Satuan Kerja ↗	NK Perencanaan Anggaran ↗	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↗	Penggunaan SBK ↗	Efisiensi SBK ↗
1	032.12.337373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	92,50	100,00	100,00	50,00
2	032.12.338010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
3	032.12.338743	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	100,00	100,00	100,00	100,00
4	032.12.338708	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	100,00	100,00	100,00	100,00
5	032.12.338763	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	100,00	100,00	100,00	100,00
6	032.12.338188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	100,00	100,00	100,00	100,00
7	032.12.339260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
8	032.12.383595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBII (AK KP WAKATOBII)	84,42	99,22	100,00	0,00
9	032.12.403617	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KEKENTANAN PESISIR	100,00	100,00	100,00	100,00
10	032.12.403820	LOKA PERKHAHASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	100,00	100,00	100,00	100,00
11	032.12.403822	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
12	032.12.403823	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	100,00	100,00	100,00	100,00
13	032.12.403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
14	032.12.403824	BALAI RISET PENULIHAN SUMBER DAYA IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00
15	032.12.403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	100,00	100,00	100,00	100,00
16	032.12.403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
17	032.12.403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
18	032.12.403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
19	032.12.403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HAS	100,00	100,00	100,00	100,00
20	032.12.403832	BALAI RISET PENULIHAN IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00
21	032.12.403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	100,00	100,00	100,00	100,00
22	032.12.403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
23	032.12.403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
24	032.12.403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
25	032.12.403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	92,50	100,00	100,00	50,00
26	032.12.403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00
27	032.12.403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	100,00	100,00	100,00	100,00
28	032.12.403878	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	90,00	100,00	100,00	33,35
29	032.12.403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	75,00	100,00	0,00	0,00
30	032.12.427513	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	92,50	100,00	100,00	50,00
31	032.12.427553	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADANG	100,00	100,00	100,00	100,00
32	032.12.427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PANJAMAN	100,00	100,00	100,00	100,00
33	032.12.427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAR	75,00	100,00	0,00	0,00
34	032.12.427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WACHIBU	92,50	100,00	100,00	50,00
35	032.12.427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	100,00	100,00	100,00	100,00
36	032.12.443613	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBERANA (POLTEK KP JEMBERANA)	100,00	100,00	100,00	100,00
37	032.12.622839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	100,00	100,00	100,00	100,00
38	032.12.625402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,48	100,00	87,50	71,50
39	032.12.634346	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SOBONG	75,00	100,00	0,00	0,00
40	032.12.652809	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	75,00	100,00	0,00	0,00
41	032.12.858536	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUM SUKAMANDI	100,00	100,00	100,00	100,00
42	032.12.893629	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 42 dari 42 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan

All

 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.11.42.7542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	95,00	100,00	50,00	100,00
2	032.11.42.7547	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	92,50	100,00	100,00	50,00
3	032.11.42.7558	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	100,00	100,00	100,00	100,00
4	032.11.42.7624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	100,00	100,00	100,00	100,00
5	032.11.42.7649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	97,23	96,30	100,00	100,00
6	032.11.44.0807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,47	100,00	87,50	71,45
7	032.11.56.7433	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	96,67	100,00	66,67	100,00
8	032.11.56.7433	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	100,00	100,00	100,00	100,00
9	032.11.56.7463	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PLEMBANG	100,00	100,00	100,00	100,00
10	032.11.56.7538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PORTOLANAR	75,00	100,00	0,00	0,00
11	032.11.56.7610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	75,00	100,00	0,00	0,00
12	032.11.56.7633	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	99,83	99,77	100,00	100,00
13	032.11.56.7654	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	87,50	90,00	50,00	100,00
14	032.11.56.7758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	100,00	100,00	100,00	100,00
15	032.11.56.7813	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	100,00	100,00	100,00	100,00
16	032.11.64.9651	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MALUKU	100,00	100,00	100,00	100,00
17	032.11.64.9651	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	95,00	100,00	100,00	66,65
18	032.11.64.9672	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TASIKAN	100,00	100,00	100,00	100,00
19	032.11.64.9689	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	100,00	100,00	100,00	100,00
20	032.11.64.9693	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	100,00	100,00	100,00	100,00
21	032.11.64.9693	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	100,00	100,00	100,00	100,00
22	032.11.64.9618	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	67,48	69,03	66,67	60,25
23	032.11.64.9613	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	92,50	100,00	100,00	50,00
24	032.11.64.9636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	100,00	100,00	100,00	100,00
25	032.11.64.9657	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	100,00	100,00	100,00	100,00
26	032.11.64.9661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	100,00	100,00	100,00	100,00
27	032.11.64.9678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	100,00	100,00	100,00	100,00
28	032.11.64.9683	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	92,51	96,68	50,00	100,00
29	032.11.64.9688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERANG	95,00	100,00	50,00	100,00
30	032.11.64.9699	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	100,00	100,00	100,00	100,00
31	032.11.64.9704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	100,00	100,00	100,00	100,00
32	032.11.64.9713	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	93,18	90,91	100,00	100,00
33	032.11.64.9728	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
34	032.11.64.9733	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	92,50	100,00	100,00	50,00
35	032.11.64.9750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	100,00	100,00	100,00	100,00
36	032.11.64.9767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TEHATE	100,00	100,00	100,00	100,00
37	032.11.66.3897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	75,00	100,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 37 dari 37 entri

Sebelumnya

1

Selanjutnya

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR 55/PPSNZJ/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Pelabuhan PPS Nizam Zachman Jakarta
Dari : Kepala Sub Bagian Umum
Hal : Capaian IKU Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPS
 Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2025
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 13 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Nomor 27/PPSNZJ/RC.610/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini disampaikan Capaian IKU “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPS Nizam Zachman Jakarta Triwulan IV 2025” yaitu 93,21 dengan jumlah responden sebanyak 160 sebagaimana Lampiran Nota Dinas ini. Demikian disampaikan atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Mohamad Yusuf Santoso

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 76/DJPT.1/OT.710/I/2026

Yth. : 1. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
3. Direktur Kepelabuhanan Perikanan
4. Direktur Usaha Penangkapan Ikan
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Dari : Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup
Ditjen Perikanan Tangkap Periode Triwulan IV Tahun 2025

Tanggal : 9 Januari 2026

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Validasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap periode pelaksanaan Triwulan III Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hasil sebagai berikut:

1. Validasi dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP;
2. Hasil SKM diambil berdasarkan validasi data SKM Triwulan IV Tahun 2025 yang dilakukan tanggal 1 s.d. 8 Januari 2026;
3. Hasil penyelenggaraan SKM Ditjen Perikanan Tangkap periode Triwulan IV Tahun 2025 per Unit Pelayanan Publik (UPP) terlampir (lampiran II).
4. Analisis atas hasil SKM Ditjen Perikanan Tangkap dijabarkan berikut:
 - a. Target nilai SKM sebagaimana IKU Ditjen Perikanan Tangkap adalah 88,50;
 - b. Jumlah responden sebanyak 4.133 dengan hasil SKM **92,42** (kategori mutu pelayanan **Sangat Baik**);
 - c. Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 39 layanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025. Jumlah layanan yang diselenggarakan oleh UPP Ditjen Perikanan Tangkap merupakan yang terbanyak di lingkungan KKP;
 - d. Nilai SKM tertinggi diperoleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan nilai sebesar 99,60. Sedangkan, nilai terendah diperoleh Direktorat Usaha Penangkapan Ikan dengan nilai 89,25;
 - e. Seluruh unsur pelayanan (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Perilaku, U8 Layanan Konsultasi, U9 Kualitas Isi/Sarana) mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,70;

5. Atas hasil SKM tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap menghimbau agar masing-masing UPP untuk dapat:
- Mengidentifikasi 3 (tiga) unsur terendah dari U1 s.d. U9 dan menjadikan unsur tersebut sebagai bahan dalam menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM dalam laporan;
 - Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan in-house training, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan yang dimiliki UPP, dan melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP;
 - Memperhatikan kecukupan jumlah responden per UPP, dengan mengacu tabel sampel dari *Krejcie and Morgan* sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 - Menindaklanjuti hasil validasi dengan penyusunan laporan, inventarisasi saran dan masukan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta publikasi hasil SKM Triwulan III Tahun 2025 melalui media sosial dan sarana prasarana yang tersedia paling lambat tanggal **14 Januari 2026**.
 - memastikan kesesuaian format penyusunan laporan pelaksanaan SKM per UPP mengacu Pedoman Kementerian PANRB yang dapat diunduh pada menu Download pada Tools SKM KKP.
6. Rincian data SKM berdasarkan hasil validasi Triwulan III Tahun 2025 dapat diunduh secara mandiri melalui menu Laporan Data Detail pada Tools SKM KKP.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara , kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan Mulyana

Tembusan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran
 Nomor : 76/DJPT.1/OT.710/I/2026
 Tanggal : 9 Januari 2026

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan IV tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
BBPI Semarang	167	3,683	3,617	3,617	3,641	3,677	3,647	3,617	3,665	3,671	91,20
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	52	3,808	3,750	3,788	3,808	3,769	3,654	3,712	3,788	3,827	94,18
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	7	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,857	4,000	4,000	99,60
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	805	3,609	3,575	3,564	3,581	3,578	3,529	3,548	3,553	3,594	89,25
PPN Ambon	167	3,575	3,641	3,593	3,611	3,599	3,707	3,743	3,689	3,772	91,47
PPN Brondong	115	3,765	3,739	3,722	3,757	3,687	3,670	3,748	3,652	3,617	92,66
PPN Karangantu	238	3,765	3,718	3,744	3,815	3,714	3,735	3,786	3,647	3,504	92,86
PPN Kejawanan	145	3,779	3,759	3,745	3,752	3,731	3,759	3,772	3,759	3,752	93,91
PPN Kwandang	84	3,798	3,750	3,667	3,726	3,786	3,548	3,714	3,667	3,786	92,89
PPN Palabuhanratu	81	3,963	3,975	3,963	3,938	3,938	3,926	3,914	3,951	3,926	98,59
PPN Pekalongan	117	3,701	3,718	3,684	3,667	3,761	3,667	3,786	3,667	3,530	92,17
PPN Pemangkat	190	3,826	3,805	3,768	3,853	3,784	3,779	3,811	3,826	3,800	95,15
PPN Pengambengan	180	3,694	3,711	3,678	3,722	3,728	3,717	3,750	3,689	3,639	92,58
PPN Prigi	159	3,830	3,786	3,686	3,698	3,774	3,717	3,736	3,730	3,717	93,54
PPN Sibolga	31	3,968	3,903	3,935	3,903	3,935	3,968	3,903	3,935	3,903	98,21

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
PPN Sungailiat	187	3,824	3,813	3,813	3,786	3,743	3,684	3,727	3,717	3,717	93,95
PPN Tanjungpandan	88	3,727	3,693	3,705	3,705	3,659	3,670	3,784	3,625	3,636	92,23
PPN Ternate	288	3,774	3,736	3,733	3,715	3,701	3,743	3,747	3,743	3,750	93,45
PPN Tual	87	3,885	3,885	3,862	3,931	3,851	3,851	3,828	3,816	3,793	96,39
PPP Teluk Batang	69	3,768	3,710	3,725	3,696	3,739	3,710	3,725	3,739	3,725	93,16
PPS Belawan	111	3,667	3,649	3,604	3,541	3,613	3,595	3,577	3,622	3,559	90,07
PPS Bitung	206	3,723	3,738	3,675	3,738	3,738	3,714	3,738	3,684	3,748	93,04
PPS Bungus	194	3,784	3,603	3,747	3,572	3,753	3,567	3,768	3,608	3,758	92,11
PPS Cilacap	81	3,778	3,765	3,691	3,716	3,728	3,753	3,790	3,753	3,778	93,76
PPS Kendari	124	3,726	3,734	3,677	3,661	3,637	3,718	3,710	3,726	3,726	92,54
PPS Nizam Zachman	160	3,775	3,750	3,744	3,731	3,694	3,725	3,700	3,738	3,700	93,21
DJPT	4133	3,732	3,704	3,690	3,698	3,697	3,675	3,708	3,682	3,686	92,42